



PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

RENSTRA DINAS PPKUKM TAHUN 2025 - 2029



Halaman ini sengaja dikosongkan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen ini dapat disusun dengan baik. Penyusunan dokumen ini merupakan bagian dari upaya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan arah kebijakan, program, serta kegiatan yang selaras dengan visi pembangunan daerah. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting dalam mendukung peningkatan daya saing, keberlanjutan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di Ibu Kota.

Sebagai instansi yang membidangi urusan industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM, Dinas memiliki peran strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Hal ini diwujudkan melalui dukungan terhadap iklim usaha yang kondusif, fasilitasi pengembangan wirausaha baru, serta penguatan koperasi sebagai sokoguru perekonomian. Selain itu, program dan kegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk menjawab tantangan globalisasi, digitalisasi, dan tuntutan pasar, sehingga sektor UMKM dan koperasi dapat tumbuh berkelanjutan serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam penyusunan dokumen ini, berbagai pihak telah berperan aktif melalui sumbangan pemikiran, data, dan masukan yang konstruktif. Kolaborasi ini mencerminkan semangat gotong royong dan komitmen bersama untuk mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas penyusunan dan implementasi kebijakan di masa yang akan datang. Dengan demikian, dokumen ini dapat senantiasa relevan, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Akhirnya, kami berharap dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan program pembangunan sektor industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM di Provinsi DKI Jakarta. Semoga segala ikhtiar yang kita lakukan bersama



dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Jakarta, 2 Oktober 2025

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi DKI Jakarta

Elisabeth Ratu Rante Allo
NIP 197009241998032004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR GAMBAR	V
DAFTAR TABEL.....	VI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	20
2.1.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta	25
2.1.3 Implikasi manajerial & rekomendasi pengembangan	30
2.1.4 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta	31
2.1.5 Kelompok Sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta	35
2.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA.....	36
2.3 IDENTIFIKASI ISU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA	45
2.3.1 Telaah Dokumen RPJMN Tahun 2025-2029.....	46
2.3.2 Telaah Renstra K/L	46



2.3.3 Telaah Isu KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029	48
2.3.4 Telaah Isu RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024–2044	48
2.3.5 Telaah RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045	49
2.3.6 Telaah RPJMD DKI Jakarta Tahun 2025-2029	49
2.3.7 Telaah Isu Berdasarkan Urusan	50
2.3.8 Telaah Isu berdasarkan Kewilayahan	52
2.3.9 Telaah Isu berdasarkan UPT	54
2.3.10 Isu Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029	58
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	65
3.1 TUJUAN DAN SASARAN.....	68
3.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	87
3.2.1 Strategi	87
3.2.2 Arah Kebijakan.....	89
3.2.3 Kebijakan Perangkat Daerah di Tingkat UPT	91
3.2.4 Kebijakan Perangkat Daerah di Tingkat Kewilayahan.....	93
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	101
4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN OPD.....	101
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	136
BAB V PENUTUP.....	139
5.1 PEDOMAN TRANSISI.....	139
5.2 KAIDAH PELAKSANAAN.....	139



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	4
Gambar 2. 1 Capaian Pendampingan Industri Kreatif dan Digital	11
Gambar 2. 2 Capaian Penumbuhan Wirausaha Industri Baru (WUIB)	12
Gambar 2. 3 Capaian Pendampingan IKM Berkualitas	12
Gambar 2. 4 Capaian Pendampingan Batik Betawi	13
Gambar 2. 5 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25
Gambar 2. 6 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	26
Gambar 2. 7 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan GolonganRekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	27
Gambar 2. 8 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir	28
Gambar 2. 9 Framework Telaahan Isu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	60
Gambar 3. 1 Kerangka Logis Urusan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	67
Gambar 3. 2 Logical Framework Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	70
Gambar 3. 3 Rumusan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	72
Gambar 3. 4 Kerangka Pohon Kinerja Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	75
Gambar 3. 5 Logical Framework Urusan Perindustrian	83
Gambar 3. 6 Logical Framework Urusan Perdagangan.....	84
Gambar 3. 7 Logical Framework Suburusan Usaha Kecil dan Menengah	85
Gambar 3. 8 Logical Framework Suburusan Koperasi	86



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Kinerja Sektor	11
Tabel 2. 2 Program/Kegiatan Unggulan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023-2026	33
Tabel 2. 4 Pemetaan Masalah	36
Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Kementerian	47
Tabel 2. 6 Telaah Isu RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024–2044	48
Tabel 2. 7 Telaah Isu Dinamis	56
Tabel 2. 8 Perumusan Isu Strategis	61
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta	76
Tabel 3. 2 Perumusan Critical Success Factor	87
Tabel 3. 3 Tahapan Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029	88
Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah yang selaras dengan Arah Kebijakan Pemerintah Daerah	89
Tabel 3. 5 Arah Kebijakan Perangkat Daerah di Tingkat UPT	92
Tabel 3. 6 Pemetaan Program Jakarta Sebagai Kota Global	94
Tabel 4. 1 Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah	102
Tabel 4. 2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas	115
Tabel 4. 3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan DPPKUKM	121
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta	137
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta	138



BAB I PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan proses awal yang sangat penting dalam rangka mencapai hasil pembangunan yang optimal. Bagi Perangkat Daerah, perencanaan dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan jangka menengah, selaras dengan visi, misi, dan tujuan pemerintah daerah. Pada bagian pendahuluan, dokumen Renstra memuat uraian mengenai latar belakang penyusunan. Selain itu, pendahuluan juga dilengkapi dengan landasan hukum yang menjadi dasar normatif, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri, yang relevan dengan penyusunan Renstra. Selanjutnya, pendahuluan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan Renstra. Bagian ini juga memberikan penjelasan mengenai sistematika penulisan dokumen Renstra.

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi DKI Jakarta atau Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta menempati posisi strategis dalam menentukan arah transformasi ekonomi perkotaan Indonesia. Kinerja sektor industri menunjukkan capaian yang relatif rendah, dengan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sektor industri tahun 2024 hanya sebesar 1,14 persen dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 11,49 persen. Angka ini jauh di bawah provinsi-provinsi basis manufaktur seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, yang menandakan bahwa Jakarta tidak lagi menjadi pusat manufaktur padat modal. Kondisi tersebut mengarahkan orientasi pembangunan industri Jakarta pada penguatan sektor kecil, menengah, kreatif, dan berbasis digital, yang memanfaatkan ekosistem perkotaan, mendukung hilirisasi UMKM, serta berorientasi pada integrasi teknologi ramah lingkungan.

Sebaliknya, sektor perdagangan Jakarta menunjukkan kinerja yang jauh lebih kuat dengan pertumbuhan sektor perdagangan di tahun 2024 mencapai 6,87 persen dan kontribusi 18,01 persen terhadap PDRB, mendekati capaian tertinggi Jawa Timur (BPS Republik Indonesia, 2025). Hal ini mempertegas posisi Jakarta sebagai pusat perdagangan nasional maupun global, simpul logistik, sekaligus episentrum ekspor-impor. Peran ini ditopang oleh infrastruktur yang relatif memadai, mulai dari pasar induk dan pusat distribusi grosir hingga jaringan ritel modern dan fasilitas logistik



yang efisien, sehingga sektor perdagangan mampu menjadi penopang stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional.

Di sisi lain, koperasi dan UMKM tampil sebagai pilar inklusi ekonomi yang semakin signifikan. Data menunjukkan bahwa nilai ekspor UMKM Jakarta melonjak hampir empat kali lipat pasca pandemi, menandakan ketangguhan dan potensi besar sektor ini. Data tersebut terlihat dari peningkatan nilai ekspor yang naik dari USD 11.273 juta pada tahun 2021 menjadi USD 40.272 juta pada tahun 2022, atau hampir empat kali lipat dalam kurun satu tahun, yang menunjukkan akselerasi signifikan daya saing UMKM Jakarta di pasar global (RPJMD DKI Jakarta 2025-2029, 2025). Keberhasilan tersebut diperkuat oleh dukungan sarana prasarana seperti kawasan UKM Pulogadung, pusat promosi produk, serta sistem database digital. Dengan adanya tekanan global berupa digitalisasi, persaingan e-commerce, dan tuntutan sertifikasi mutu, penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM menjadi kunci strategis bagi Jakarta untuk menjaga ketahanan sekaligus mendorong keberlanjutan ekonomi berbasis masyarakat.

Berdasarkan kondisi strategis yang dihadapi, diperlukan penyusunan alat ukur kinerja dan arah kebijakan jangka menengah lima tahun ke depan agar Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta memiliki pedoman yang jelas dalam menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan instrumen penting dalam siklus pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Renstra menjadi dokumen resmi yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Bagi Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta Renstra berfungsi sebagai alat navigasi kinerja yang memastikan agar pelaksanaan urusan pemerintahan selaras dengan RPJMD Provinsi, RPJMN, maupun rencana strategis kementerian/lembaga agar tercapai konsistensi dan keterpaduan pencapaian sasaran pembangunan nasional serta arah kebijakan nasional seperti hilirisasi industri, digitalisasi UMKM, dan penguatan koperasi modern.

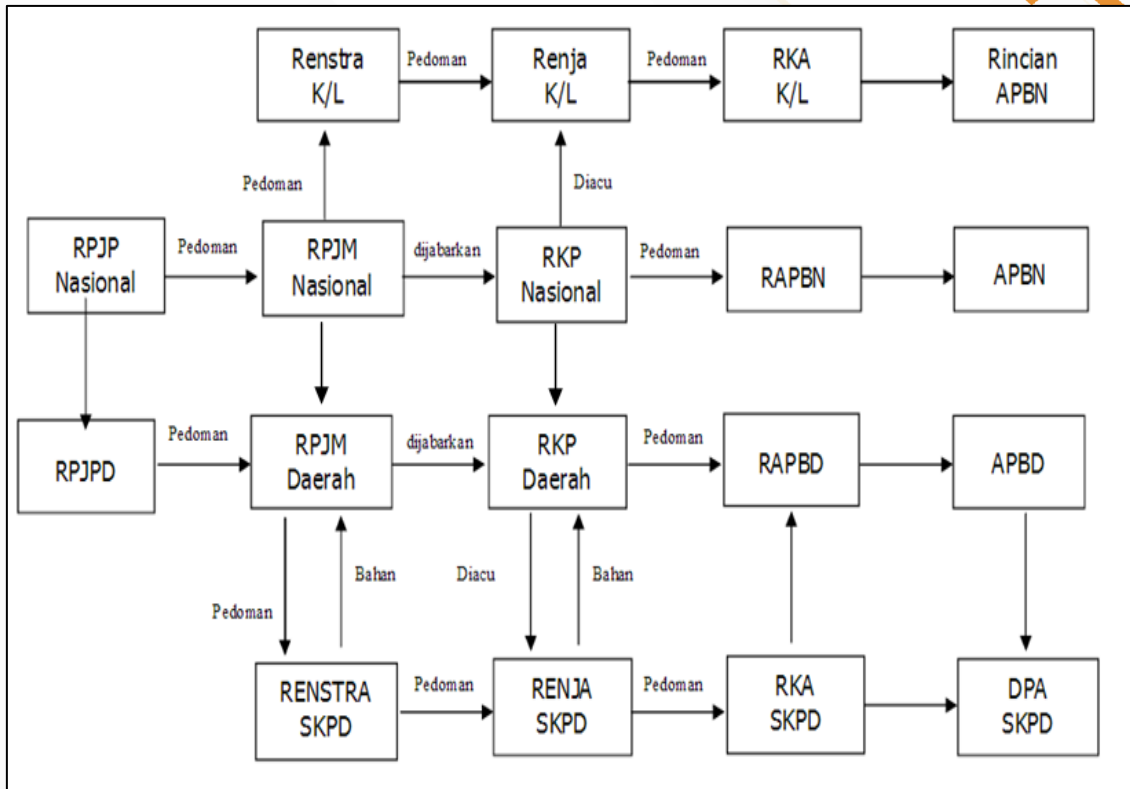
Penyusunan Renstra Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta periode 2025–2029 menjadi penting mengingat Jakarta tidak lagi berposisi sebagai basis manufaktur berskala besar, melainkan sebagai simpul perdagangan, distribusi, dan inovasi ekonomi perkotaan. Transformasi industri kecil dan menengah, penguatan perdagangan domestik dan global, pemberdayaan koperasi modern, serta



pengembangan UMKM inklusif dan berdaya saing memerlukan arah strategis yang konsisten dan terukur. Renstra akan menjadi strategi besar untuk menata ulang peran Jakarta dalam ekosistem ekonomi nasional dan global, sekaligus memastikan bahwa penguatan sistem pengawasan berbasis risiko mampu menjamin kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat. Dengan demikian, Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta akan memiliki kerangka kerja yang jelas untuk bertindak sebagai katalis utama dalam mewujudkan ekonomi Jakarta yang inovatif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Renstra Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung pembangunan daerah. Dokumen ini tidak hanya menguraikan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sektor industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM, tetapi juga dirancang untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang belum tertangani pada periode sebelumnya serta merespons perubahan lingkungan strategis lima tahun ke depan. Dengan mengacu pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025–2029, Renstra ini menjamin keberlanjutan dan konsistensi program, menjaga fokus sasaran pembangunan, serta menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Oleh karena itu, Renstra Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta berfungsi sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahunan sekaligus pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM.

Keterkaitan antara Renstra Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta dengan dokumen perencanaan lainnya juga sangat erat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Renstra menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan yang menjembatani RPJMD dengan rencana kerja, dokumen anggaran, serta kebijakan sektoral. Hubungan antar dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut divisualisasikan dalam bagan yang menunjukkan keterpaduan proses mulai dari perencanaan jangka panjang hingga tahunan, sehingga setiap langkah pembangunan dapat diarahkan secara konsisten, berkesinambungan, dan terukur.



Gambar 1. 1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Gambar di atas memperlihatkan hubungan hierarkis antara dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam konteks tersebut, Renstra Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta menempati posisi penting sebagai dokumen strategis perangkat daerah yang disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025–2029 serta harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan di atasnya, yaitu RPJMN dan RKP Nasional. Kedudukan ini menjadikan Renstra bukan hanya instrumen internal dinas, melainkan juga bagian dari rantai perencanaan nasional yang berperan dalam memastikan konsistensi pencapaian sasaran pembangunan daerah dan nasional.

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Renstra Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini mencakup koreksi indikator, satuan, kodefikasi, serta nomenklatur, sekaligus penonaktifan unsur yang tidak relevan agar selaras dengan regulasi terbaru. Lebih lanjut, penyusunan Renstra juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan



Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 yang menekankan konsistensi visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional. Dengan dasar tersebut, Renstra Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta disusun sebagai pedoman strategis yang menjamin kesinambungan perencanaan, menjaga konsistensi pelaksanaan program pembangunan, serta memastikan sinkronisasi dengan RPJMN 2025–2029 dalam rangka mendukung pencapaian visi daerah sekaligus agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Renstra Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089);
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 5 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



- 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900,1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 13 Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta;
- 14 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2044 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 103);
- 15 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 104);



- 16 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 101);
- 17 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
- 18 Keputusan Gubernur Nomor 294 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia.
- 19 Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 243 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta adalah untuk menyediakan landasan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pada bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, serta inovasi daerah dalam kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2025–2029. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman utama agar setiap langkah pembangunan yang dijalankan selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sekaligus mampu menjawab dinamika tantangan pembangunan di masa mendatang. Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta.
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja (Renja) serta Penetapan Kinerja perangkat daerah.
4. Menjadi dasar evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

Dengan demikian, Renstra ini memiliki peran strategis sebagai instrumen yang menjembatani visi pembangunan daerah dengan implementasi nyata melalui program dan kegiatan yang terukur, konsisten, serta berorientasi pada hasil.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta disusun dengan sistematika sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan
Berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan,
- BAB II** Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah
Berisi gambaran pelayanan perangkat daerah meliputi tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah
- BAB III** Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025-2029.
- BAB IV** Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD,
- BAB V** Penutup
Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi aktual penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM. Bab ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai struktur, fungsi, sarana prasarana, capaian kinerja, kelompok sasaran, serta pola kemitraan yang telah dijalankan, sekaligus mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam periode perencanaan mendatang.

2.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA

Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta memiliki mandat penting dalam memperkuat struktur ekonomi daerah melalui pemberdayaan koperasi, pengembangan UMKM, serta pengelolaan perdagangan dan jasa. Urusan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang menegaskan kedudukan koperasi dan UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional. Pemerintah Provinsi Jakarta berperan sebagai fasilitator dan penggerak yang memastikan terciptanya iklim usaha yang kondusif, akses pembiayaan yang adil, serta penguatan kelembagaan usaha rakyat agar mampu bersaing di era global.

Dalam bidang koperasi, pemerintah daerah berperan memberikan stimulus, pembinaan, serta dukungan kelembagaan agar koperasi tetap tumbuh berkelanjutan. Meski pandemi Covid-19 sempat menurunkan jumlah koperasi aktif pada tahun 2020, daya tahan koperasi Jakarta terlihat dari peningkatan volume usaha yang terus naik hingga mencapai Rp22,04 triliun pada 2022. Jumlah koperasi aktif pun kembali meningkat, menandakan adanya pemulihan dan kepercayaan masyarakat terhadap model usaha bersama ini.

Pada sisi UMKM, Jakarta menampilkan potensi luar biasa. Nilai ekspor produk UMKM sempat terdampak pandemi, namun pada 2022 justru melesat hampir empat kali lipat menjadi USD 40,27 juta. Fakta ini menunjukkan daya saing UMKM Jakarta



yang tinggi di pasar global, terutama bila didukung inovasi, digitalisasi, dan perluasan akses permodalan. UMKM juga berperan besar dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal, sehingga pemberdayaannya merupakan prioritas strategis.

Selain itu, fasilitas perdagangan dan jasa menjadi penopang vital kegiatan ekonomi di Jakarta. Data menunjukkan bahwa efisiensi biaya logistik mengalami perbaikan signifikan, dari Rp664 triliun pada 2020 menjadi Rp456 triliun pada 2022, meskipun kembali meningkat di 2023. Jakarta juga memiliki infrastruktur pasar yang cukup lengkap, terdiri dari pasar induk, pasar grosir, pasar khusus, hingga 144 pasar eceran/ritel, disertai ribuan minimarket modern yang tersebar merata. Kondisi ini memberikan akses yang luas bagi masyarakat terhadap pusat distribusi barang, sekaligus memperkuat ekosistem perdagangan modern. Namun demikian, tantangan masih ada, terutama dalam modernisasi pasar tradisional, integrasi sistem pembayaran non-tunai, serta ketimpangan daya saing antara pasar modern dan tradisional.

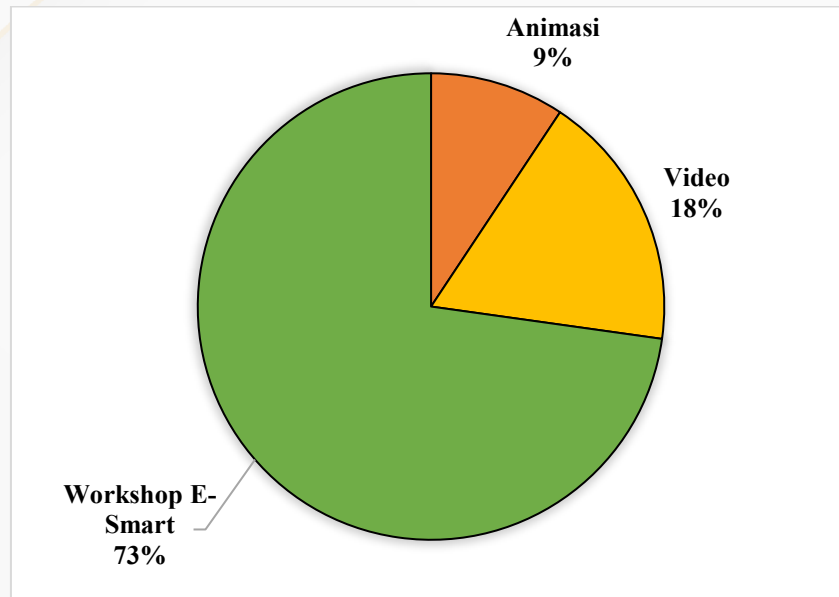
Dengan demikian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang tidak hanya membina koperasi dan UMKM, tetapi juga memastikan ekosistem perdagangan dan jasa berkembang secara inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Peran ini akan semakin penting dalam periode 2025–2029, seiring dengan tuntutan globalisasi, percepatan transformasi digital, serta kebutuhan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Capaian kinerja sektor pendampingan industri kreatif dan digital menunjukkan langkah strategis Dinas PPKUKM DKI Jakarta dalam mendorong transformasi pelaku usaha menuju ekosistem digital. Hingga September tahun 2025, tercatat 1.929 unit usaha yang mendapatkan pendampingan, dengan rincian 180 unit di bidang animasi, 345 unit di bidang produksi video, serta 1.404 unit melalui workshop E-Smart. Capaian ini menandakan semakin meningkatnya minat dan kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pengembangan usaha dan peningkatan daya saing.

Tabel 2. 1 Data Kinerja Sektor

	Sektor Perindustrian	Sektor Perdagangan	Sektor Koperasi	Sektor Usaha Kecil dan Menengah
Data Kinerja	7.298 Unit Usaha Industri (Data SIINas per 22 September) 2 Kawasan Industri (KBN, JIEP)	Jumlah Pasar Rakyat: 146 Pasar Rakyat Jumlah Pusat Perbelanjaan/Mall: 101 Lokasi	Koperasi Primer: 4.508 Koperasi (data ODS Kemenkop tanggal 30 Septmber 2025) Koperasi Primer Aktif: 2.804 Koperasi (data ODS Kemenkop tanggal 30 Septmber 2025)	Jumlah Wirausaha: 413. 545 UKM (data Jakpreneur tanggal 23 september 2025) Jumlah Lokasi Binaan (Lokbin): 20 Lokasi Jumlah Lokasi Sementara (Loksem): 181 Lokasi Jumlah Lokasi Promosi (Lokprom): 4 Lokasi

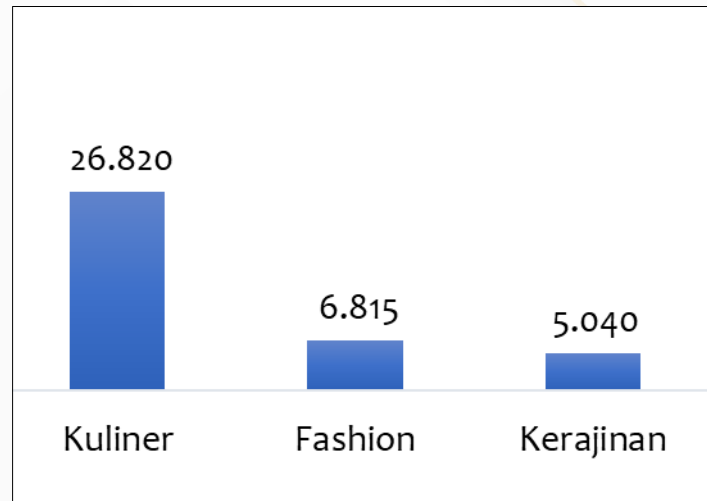
Sumber: DPPKUKM DKI Jakarta, per September 2025



Gambar 2. 1 Capaian Pendampingan Industri Kreatif dan Digital

Sumber: DPPKUKM DKI Jakarta, 2025

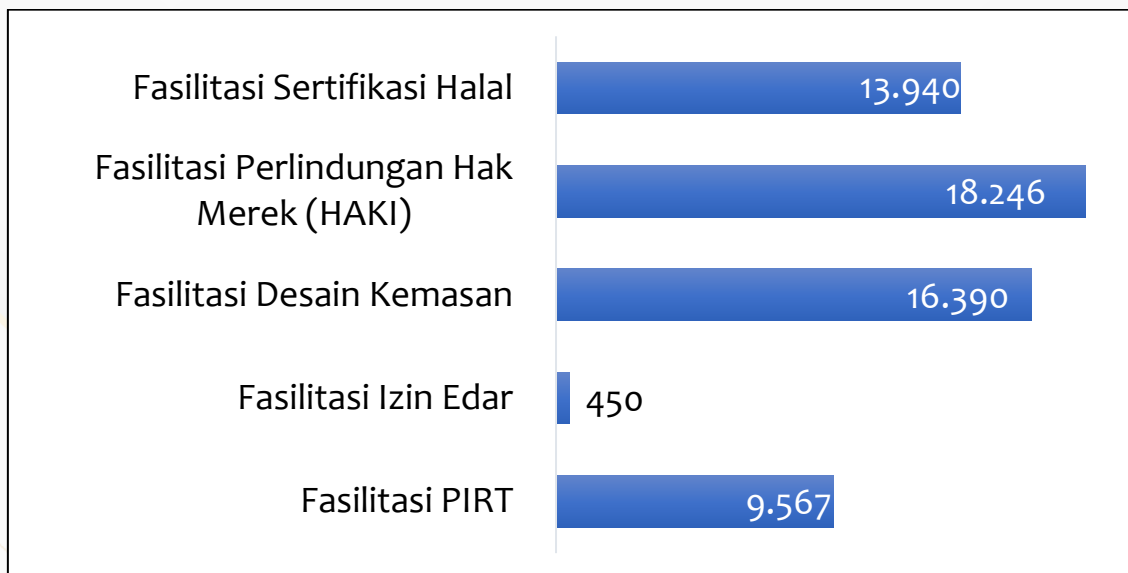
Pada sektor penumbuhan wirausaha industri baru (WUIB), Dinas PPKUKM berhasil menumbuhkan 38.675 unit usaha baru yang tersebar di berbagai subsektor unggulan. Dari jumlah tersebut, subsektor kuliner menempati porsi terbesar dengan 26.820 unit usaha, diikuti subsektor fashion sebanyak 6.815 unit usaha, serta subsektor kerajinan dengan jumlah yang sama, yakni 5.040 unit usaha. Pertumbuhan ini menunjukkan potensi besar Jakarta sebagai pusat ekonomi kreatif, sekaligus memperkuat struktur perekonomian daerah melalui diversifikasi sektor usaha baru yang berbasis pada kreativitas masyarakat.



Gambar 2. 2 Capaian Penumbuhan Wirausaha Industri Baru (WUIB)

Sumber: DPPKUKM DKI Jakarta, 2025

Sementara itu, capaian pada sektor pendampingan IKM berkualitas juga cukup signifikan, dengan total ribuan produk yang memperoleh fasilitasi peningkatan mutu dan legalitas. Tercatat 9.567 produk telah mendapatkan pendaftaran PIRT, 450 produk memperoleh fasilitasi izin edar MD, 16.390 produk didukung dalam pengembangan desain kemasan, 18.246 produk mendapatkan perlindungan hak merek (HAKI), serta 13.940 produk difasilitasi sertifikasi halal.

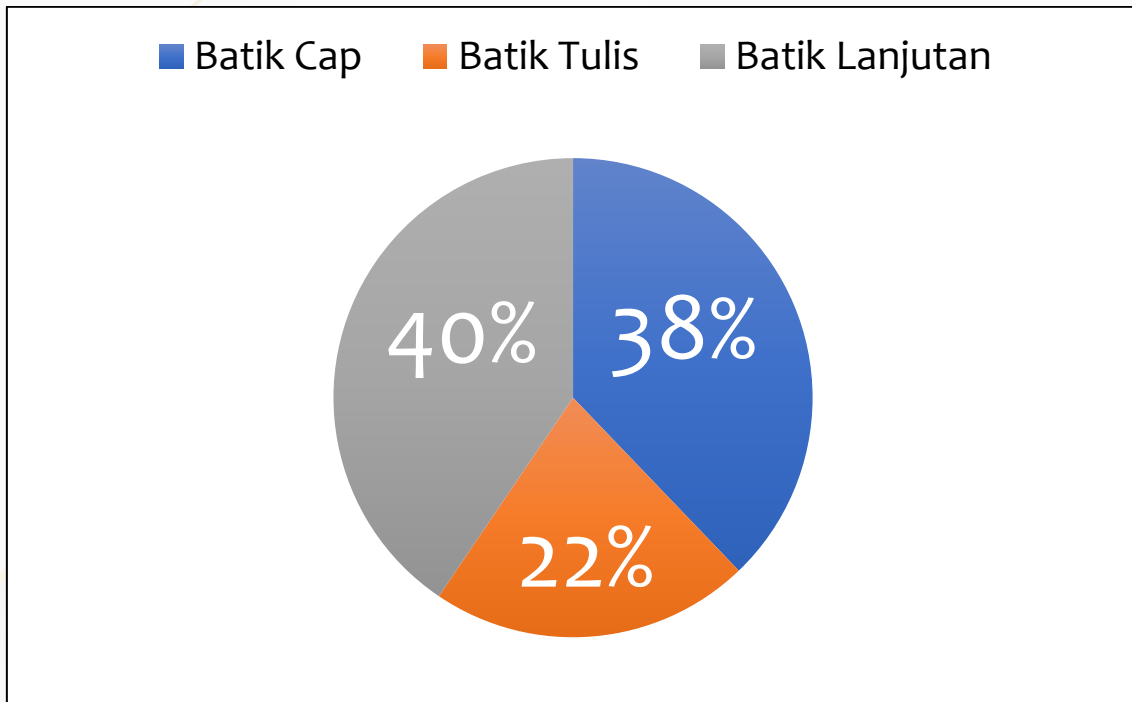


Gambar 2. 3 Capaian Pendampingan IKM Berkualitas

Sumber: DPPKUKM DKI Jakarta, 2025

Selain itu, pada aspek pelestarian budaya lokal, program pendampingan Batik Betawi berhasil mencatat pemberdayaan kepada 800 unit usaha pada rentang tahun 2022-2025, yang terdiri dari 400 unit batik cap, 100 unit batik tulis, dan 300 unit batik

lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas PPKUKM tidak hanya berfokus pada penguatan daya saing modern, tetapi juga konsisten menjaga keberlanjutan produk budaya khas daerah sebagai bagian dari ekonomi kreatif Jakarta.



Gambar 2. 4 Capaian Pendampingan Batik Betawi

Sumber: DPPKUKM DKI Jakarta, 2025

Sepanjang periodenya, Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta berhasil menorehkan sejumlah prestasi yang mencerminkan kinerja unggul, inovasi berkelanjutan, serta kontribusi nyata dalam penguatan sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

1. Penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI)

Pada tahun 2023, Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta berhasil mencatatkan prestasi membanggakan melalui penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan penyelenggaraan bazar serentak dengan jumlah peserta terbanyak di Indonesia. Capaian tersebut tidak hanya menunjukkan kapasitas Jakarta dalam mengorganisasi kegiatan berskala besar, tetapi juga mencerminkan sinergi kuat antara pemerintah, pelaku UMKM, serta masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Penghargaan Booth Terbaik Pemerintahan Daerah

Dalam ajang Pameran Inabuyer 2023, booth Jakarta Entrepreneur yang diinisiasi oleh Dinas PPKUKM berhasil meraih penghargaan sebagai Booth Terbaik Pemerintahan Daerah. Prestasi ini menunjukkan kemampuan Jakarta dalam



mempromosikan produk dan inovasi daerah secara menarik, informatif, dan kompetitif. Selain itu, penghargaan ini juga memperkuat citra Dinas PPKUKM sebagai lembaga yang aktif mendorong promosi produk lokal di tingkat nasional maupun internasional.

3. **Inovasi Terbaik ke-3 Kategori Pemerintah**

Program Jakarta Entrepreneur yang digagas oleh Dinas PPKUKM mendapatkan penghargaan sebagai Inovasi Terbaik ke-3 Kategori Pemerintah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penghargaan ini menjadi bukti keberhasilan program dalam mendorong pengembangan wirausaha baru, memperkuat ekosistem UMKM, serta meningkatkan daya saing ekonomi kreatif di ibu kota. Dengan capaian ini, Jakarta semakin dikenal sebagai pusat inovasi kewirausahaan yang mampu mengintegrasikan teknologi, kreativitas, dan pasar.

4. **Kinerja Terbaik Program Pendataan Lengkap KUMKM 2022**

Pada tahun 2022, Dinas PPKUKM memperoleh penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI sebagai dinas dengan kinerja terbaik dalam pelaksanaan Program Pendataan Lengkap KUMKM. Penghargaan ini mencerminkan komitmen kuat Jakarta dalam menyediakan data akurat sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi rakyat. Keberhasilan pendataan ini menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan program pembinaan dan pemberdayaan KUMKM secara berkelanjutan.

5. **Fasilitasi Pendaftaran Merek**

Dinas PPKUKM juga menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI atas peran aktif dalam fasilitasi pendaftaran merek bagi pelaku usaha. Penghargaan ini menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi hak kekayaan intelektual UMKM, sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas melalui kepastian hukum. Dengan adanya perlindungan merek, produk UMKM Jakarta semakin memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar nasional maupun global.

6. **Anugerah Pengadaan 2023**

Dalam Anugerah Pengadaan 2023 yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dinas PPKUKM berhasil meraih penghargaan pada dua kategori penting, yakni nilai transaksi Produk Dalam Negeri (PDN) terbesar dan nilai transaksi produk usaha menengah serta kecil.



Capaian ini mencerminkan dukungan nyata Dinas terhadap Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) sekaligus memperkuat kontribusi UMKM dalam rantai pasok pengadaan barang dan jasa pemerintah.

7. **Peringkat 1 Inovasi Kehumasan**

Unit Pelaksana Metrologi yang berada di bawah Dinas PPKUKM berhasil meraih penghargaan Peringkat 1 kategori Inovasi Kehumasan dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Prestasi ini menegaskan pentingnya komunikasi publik yang kreatif dan efektif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kemetrologian. Inovasi tersebut juga memperlihatkan kemampuan lembaga dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

8. **Peringkat 2 Komunikasi Publik**

Selain itu, Unit Pelaksana Metrologi juga meraih penghargaan Peringkat 2 kategori Komunikasi Publik. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya Dinas dalam menyampaikan informasi secara transparan, cepat, dan akurat kepada masyarakat. Keterbukaan informasi yang dilakukan mendorong terciptanya hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam layanan perlindungan konsumen.

9. **Peringkat 2 Media Sosial**

Unit Pelaksana Metrologi juga dianugerahi penghargaan Peringkat 2 kategori Media Sosial dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pengelolaan media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang efektif. Melalui platform digital, Dinas mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas, menyampaikan edukasi terkait kemetrologian, serta meningkatkan partisipasi publik dalam mendukung budaya tertib ukur.

10. **Penghargaan Daerah Peduli Perlindungan Konsumen**

Kementerian Perdagangan RI memberikan penghargaan Daerah Peduli Perlindungan Konsumen kepada Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta. Penghargaan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga hak-hak konsumen, sekaligus memperkuat tata kelola pasar yang sehat. Dengan pencapaian ini, Jakarta semakin dikenal sebagai daerah yang serius dalam menciptakan ekosistem perdagangan yang adil dan berintegritas.

11. **Penghargaan Daerah Tertib Ukur**



Dinas PPKUKM juga menerima penghargaan Daerah Tertib Ukur dari Kementerian Perdagangan RI. Penghargaan ini menjadi bukti keberhasilan dalam menjaga standar keakuratan alat ukur di pasar, SPBU, dan berbagai unit usaha lainnya. Dengan predikat ini, masyarakat Jakarta mendapatkan jaminan perlindungan yang lebih baik dalam transaksi perdagangan sehari-hari.

12. **Anugerah Pasar Tertib Ukur**

Sebanyak 58 pasar di Provinsi DKI Jakarta dinyatakan sebagai Pasar Tertib Ukur oleh Kementerian Perdagangan RI. Penghargaan ini memperlihatkan upaya konsisten Dinas PPKUKM dalam membina pasar tradisional agar menerapkan prinsip kejujuran, akurasi, dan perlindungan konsumen. Hal ini sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar tradisional sebagai pusat perdagangan yang aman dan terpercaya.

13. **Tata Kelola Standardisasi Perlindungan Konsumen Level 3**

Badan Standardisasi Nasional (BSN) memberikan penghargaan Tata Kelola Standardisasi Perlindungan Konsumen Level 3 kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas PPKUKM. Capaian ini menunjukkan bahwa Jakarta telah mencapai standar tata kelola yang solid dalam perlindungan konsumen, sekaligus menjadi rujukan bagi daerah lain dalam penerapan kebijakan standardisasi.

14. **Badan Publik Informatif**

Pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023, Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebagai Badan Publik Informatif berdasarkan hasil e-Monev. Penghargaan dari Komisi Informasi ini mempertegas komitmen Dinas dalam membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi.

15. **Inabuyer Award 2025**

Pada Penghargaan Inabuyer Award 2025, Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebagai Pemerintah Provinsi dengan Belanja Produk UMK Terbesar Tahun Anggaran 2024. Penghargaan dari Komisi Informasi ini mempertegas komitmen Dinas dalam membangun.

Berbagai capaian prestasi yang diraih Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta menjadi fondasi penting sekaligus bukti keberhasilan implementasi kebijakan, yang kemudian diperkuat melalui pelaksanaan program-program unggulan. Program unggulan Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta dirancang untuk memperkuat peran



sektor industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM sebagai motor penggerak perekonomian daerah sekaligus mendukung daya saing nasional. Melalui berbagai kegiatan seperti fasilitasi penggunaan produk dalam negeri, pengembangan industri kreatif dan digital, pemberdayaan koperasi, pendampingan usaha kecil dan menengah, hingga pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen, program-program tersebut diorientasikan pada pencapaian ekosistem usaha yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan. Dukungan unit pelaksana di tingkat Provinsi maupun wilayah memastikan implementasi program berjalan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana-prasarana, hingga penguatan sistem berbasis digital.

Tabel 2. 2 Program/Kegiatan Unggulan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	UNIT KERJA	PROGRAM / KEGIATAN UNGGULAN
1	Dinas PPKUKM	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, di antaranya melalui Penyelenggaraan Business matching P3DN dan Fasilitasi Sertifikasi TKDN
		Fasilitasi keamanan pangan bagi Industri dan Penjamah Pangan
		Pendampingan Industri Kreatif dan Digital serta Batik Betawi
		Fasilitasi Pemasaran Tingkat Provinsi, di antaranya melalui penyelenggaraan bazar Provinsi dan JITEX
		Pengembangan Produk Ekspor, melalui Partisipasi Pameran Dalam Kota, Luar Kota, Luar Negeri dan Pendampingan Peningkatan Mutu dan Kualitas Produk Ekspor
		Fasilitasi Promosi dan Pemasaran, melalui kurasi produk
		Stabilisasi Harga, melalui Penyelenggaraan Pasar Murah
		Pemberdayaan Koperasi, di antaranya melalui Fasilitasi Pendirian Akta Koperasi
		Pengawasan Perindustrian, Perdagangan, UKM dan Metrologi serta Pemeriksaan Kesehatan Koperasi
		Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen, melalui Penyelenggaraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)



NO	UNIT KERJA	PROGRAM / KEGIATAN UNGGULAN
2	Sudin PPKUKM Kota & Kabupaten	Pendampingan Industri Kecil dan Menengah Berkualitas, di antaranya melalui fasilitasi sertifikasi Halal, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Desain Kemasan, Izin Edar MD
		Penataan Sarana & Prasarana Pedagang Kaki Lima (PKL)
		Fasilitasi pemasaran Tingkat Wilayah, di antaranya melalui penyelenggaraan Bazar Tingkat Kota, Bazar Tingkat Kecamatan dan partisipasi APKASI/APEKSI
		Penumbuhan Wirausaha Industri Baru (<i>Hardskill</i>)
		Pembinaan Kewirausahaan Usaha Kecil dan Menengah, melalui pelatihan <i>Softskill</i>
		Pendampingan Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
3	Pusdiklat PPKUKM	Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM Perkoperasiaan dan SDM Kewirausahaan
4	UP Metrologi	Perlindungan Konsumen melalui metrologi legal (tera dan tera ulang), pengujian dan kalibrasi
	UP PISP	Peningkatan Pelayanan Pengujian, kalibrasi dan sertifikasi melalui Pengadaan Alat Uji Laboratorium dan Sumber daya lain (SDM, Sistem manajemen) yang terdiri dari kaji ulang, audit internal dan dokumen mutu
	UP PKB2T	
5	Pusdatin PPKUKM	Peningkatan kinerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melalui peningkatan dan pemeliharaan Sistem Informasi PPKUKM

Sumber: DPPKUKM DKI Jakarta, 2025

Dalam penelaahan lebih lanjut program-program unggulan ini memiliki nilai strategis dalam menjawab tantangan global, nasional, dan regional yang dihadapi Jakarta. Upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta fasilitasi sertifikasi TKDN, halal, dan izin edar menunjukkan dukungan nyata terhadap agenda hilirisasi dan kemandirian ekonomi. Program pemasaran melalui penyelenggaraan bazar, JITEX, dan partisipasi pameran dalam maupun luar negeri membuka peluang ekspor produk lokal sekaligus memperluas pasar UMKM. Di sisi lain, kegiatan pengawasan industri, perdagangan, dan metrologi memastikan perlindungan konsumen serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Penguatan SDM melalui



Pusdiklat dan digitalisasi layanan melalui Pusdatin juga menjadi kunci transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang lebih adaptif. Dengan demikian, program unggulan ini tidak hanya memperkuat struktur ekonomi Jakarta, tetapi juga menempatkan Dinas PPKUKM sebagai katalis utama dalam pembangunan ekonomi perkotaan yang berdaya saing, inklusif, dan berkeadilan.

Program unggulan Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta terintegrasi erat dengan inisiatif Jakpreneur yang melalui konsep #7 Langkah PAS memberikan fasilitasi komprehensif bagi UMKM, mulai dari pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, hingga akses permodalan, sehingga mampu memperkuat daya saing sekaligus mendukung ekosistem kewirausahaan daerah secara berkelanjutan. Program Pengembangan UMKM DKI Jakarta dilaksanakan melalui inisiatif Jakarta Entrepreneur yang memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk mengikuti beberapa atau seluruh tahapan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) sesuai dengan kebutuhan mereka. Program ini dikemas dalam konsep #7 Langkah PAS (Pasti Akan Sukses) yang mencakup rangkaian fasilitasi mulai dari pendaftaran hingga akses permodalan.

Tahap awal dimulai dengan pendaftaran melalui website jakpreneur.jakarta.go.id atau tutorial di kanal YouTube Jakpreneur, yang hingga kini telah diikuti oleh 413.545 orang. Setelah itu, peserta dapat mengikuti pelatihan softskill dan hardskill baik secara offline maupun online dengan jumlah peserta mencapai 244.363 orang. Selanjutnya, program pendampingan kewirausahaan diberikan melalui pendamping Jakpreneur di setiap kecamatan dengan jumlah peserta yang sama, yaitu 224.388 orang.

Di tahap perizinan, sebanyak 235.624 pelaku UMKM telah difasilitasi dalam pengurusan dokumen usaha seperti NIB dan izin edar MD. Kemudian pada aspek pemasaran, produk UMKM dikurasi dan diikutsertakan dalam berbagai bazar serta pameran nasional maupun internasional, baik secara online maupun offline, dengan jumlah peserta 67.891 orang. Dukungan juga diberikan dalam pelaporan keuangan, di mana 67.209 peserta mendapatkan pendampingan penyusunan laporan untuk mempermudah akses bantuan permodalan. Terakhir, program permodalan difasilitasi melalui kerja sama dengan perbankan maupun bantuan sarana dan prasarana, yang telah menjangkau 18.334 pelaku UMKM.

Dengan alur yang terstruktur dan menyeluruh ini, Program Jakpreneur hadir sebagai upaya strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menciptakan



ekosistem UMKM yang kuat, mandiri, dan berdaya saing, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada perangkat daerah, tugas pokok dari Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

A. Kedudukan

1. Dinas PPKUKM dipimpin oleh Kepala Dinas.
2. Kepala Dinas PPKUKM berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas PPKUKM berada di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah.
4. Kepala Dinas PPKUKM melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

B. Tugas Dan Fungsi

1. Dinas PPKUKM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
2. Dinas PPKUKM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas PPKUKM;
 - b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PPKUKM;
 - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan



- prosedur Dinas PPKUKM;
- d. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - g. pelaksanaan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - h. pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital Dinas PPKUKM;
 - i. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas PPKUKM;
 - j. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dan pengendalian perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah;
 - k. pengoordinasian pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - l. pelaksanaan pemantauan harga dan informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - m. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
 - n. pelaksanaan promosi, penggunaan, dan pemasaran produk unggulan dalam negeri;
 - o. pelaksanaan fasilitasi ekspor impor;
 - p. pelaksanaan penerbitan surat keterangan asal;
 - q. pelaksanaan perlindungan konsumen;
 - r. pelaksanaan pengujian, inspeksi dan sertifikasi mutu produk;
 - s. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah;
 - t. pelaksanaan kemetrolagian berupa tera, tera ulang, kalibrasi dan verifikasi standar ukuran dan pengawasan;
 - u. pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan dan penilaian kesehatan

- koperasi;
- v. pengawasan perindustrian, perdagangan, koperasi, kemernologian, usaha mikro kecil dan menengah;
- w. pemberian rekomendasi perizinan atau nonperizinan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- x. pelaksanaan pendampingan perlindungan hak kekayaan intelektual;
- y. pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- z. pelaksanaan kesekretariatan Dinas PPKUKM;
- aa. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- bb. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- cc. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- dd. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

C. Susunan Organisasi

1. Susunan organisasi Dinas PPKUKM, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Dinas PPKUKM, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum; dan
 - 2) Subbagian Keuangan.
 - b. Bidang Perindustrian, terdiri atas:
 - 1) Seksi Industri Kecil dan Menengah; dan
 - 2) Seksi Industri Kreatif dan Digital.
 - c. Bidang Perdagangan;
 - d. Bidang Koperasi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Koperasi;
 - 2) Seksi Kelembagaan Koperasi; dan
 - 3) Seksi Pembiayaan Koperasi.
 - e. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - 3) Seksi Usaha Informal.

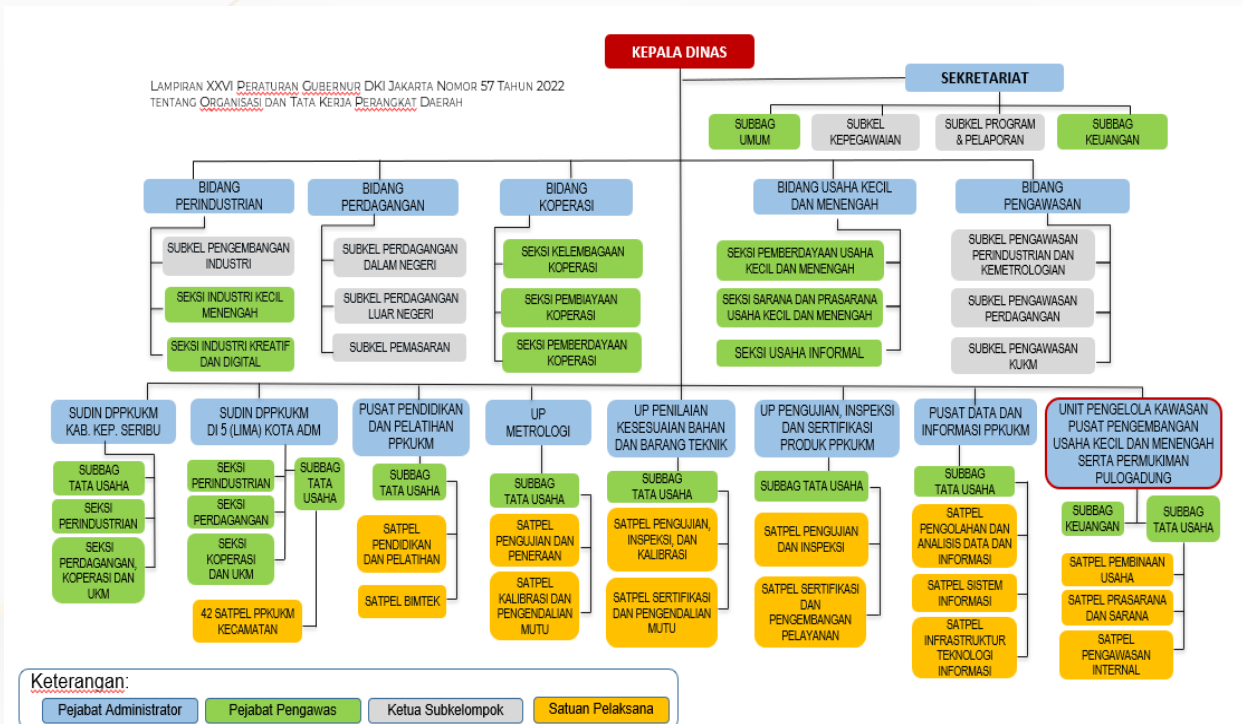


- f. Bidang Pengawasan;
 - g. Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Perindustrian;
 - 3) Seksi Perdagangan; dan
 - 4) Seksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - h. Suku Dinas PPKUKM Kabupaten Administrasi, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Perindustrian; dan
 - 3) Seksi Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - i. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
 - 1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Unit Pengelola Metrologi yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Unit Pengelola Penilaian Kesesuaian Bahan dan Barang Teknik, yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 - 4) Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
 - 5) Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung, terdiri atas:
 - a) Subbagian Tata Usaha; dan
 - b) Subbagian keuangan.
 - 6) Pusat Data dan Informasi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang membawahi Subbagian Tata Usaha.
 - j. Jabatan Fungsional; dan
 - k. Jabatan Pelaksana.
2. Pada Dinas dibentuk unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembidangnya, terdiri atas:
- a. Subkelompok pada Sekretariat dan Bidang, terdiri atas:
 - 1) Subkelompok pada Sekretariat
 - a) Subkelompok Kepegawaian
 - b) Subkelompok Program dan Pelaporan
 - 2) Subkelompok pada Bidang Perindustrian, terdiri atas:



- a) Subkelompok Pengembangan Industri
- 3) Subkelompok pada Bidang Perdagangan, terdiri atas:
 - a) Subkelompok Perdagangan Dalam Negeri
 - b) Subkelompok Perdagangan Luar Negeri
 - c) Subkelompok Pemasaran
- 4) Subkelompok pada Bidang Pengawasan, terdiri atas:
 - a) Subkelompok Pengawasan Perindustrian dan Kemetrollogian
 - b) Subkelompok Pengawasan Perdagangan
 - c) Subkelompok Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- b. Satuan Pelaksana Kecamatan pada Suku Dinas Kota Administrasi; dan
- c. Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis, yang terdiri atas:
 - 1) Satuan Pelaksana pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas:
 - a) Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan
 - b) Satuan Pelaksana Bimbingan Teknis
 - 2) Satuan Pelaksana pada Unit Pengelola Metrologi, terdiri atas:
 - a) Satuan Pelaksana Pengujian dan Penerimaan
 - b) Satuan Pelaksana Kalibrasi dan Pengendalian Mutu
 - 3) Satuan Pelaksana pada Unit Pengelola Penilaian Kesesuaian Bahan dan Barang Teknik, terdiri atas:
 - a) Satuan Pelaksana Pengujian, Inspeksi dan Kalibrasi
 - b) Satuan Pelaksana Sertifikasi dan Pengendalian Mutu
 - 4) Satuan Pelaksana pada Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas:
 - a) Satuan Pelaksana Pengujian dan Inspeksi
 - b) Satuan Pelaksana Sertifikasi dan Pengembangan Pelayanan
 - 5) Satuan Pelaksana pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung, terdiri atas:
 - a) Satuan Pelaksana Pembinaan Usaha
 - b) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana
 - 6) Satuan Pelaksana pada Pusat Data dan Informasi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah, terdiri atas:

- Satuan Pelaksana Pengolahan dan Analisis Data dan Informasi
- Satuan Pelaksana Sistem Informasi
- Satuan Pelaksana Infrastruktur Teknologi Informasi



Gambar 2. 5 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sumber: Lampiran XXVI Pergub DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022

2.1.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

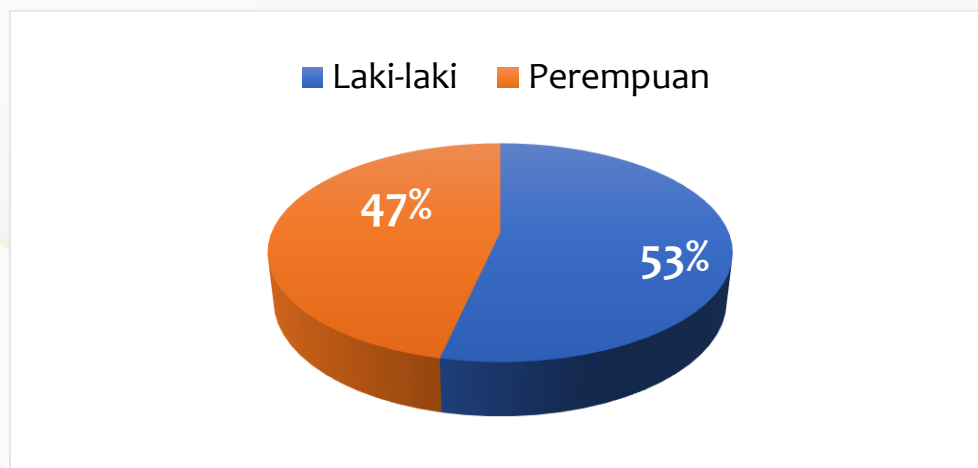
Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

Sumber daya manusia pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu jabatan struktural, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana. Pengelompokan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab bagi setiap aparatur, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dapat berjalan secara terarah, efisien, dan akuntabel.

Jabatan struktural memegang peran penting dalam aspek koordinasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam merumuskan

kebijakan dan mengelola unit kerja agar selaras dengan visi pembangunan daerah. Jabatan fungsional menitikberatkan pada keahlian teknis sesuai bidang tugas, meliputi pengembangan industri, fasilitasi perdagangan, pemberdayaan koperasi, pembinaan UMKM, hingga pengawasan dan sertifikasi. Sementara itu, jabatan pelaksana berperan mendukung aspek administrasi dan operasional sehari-hari, sehingga keseluruhan proses pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik.

Dari sisi kualitas, komposisi pegawai dinas dapat ditinjau melalui tingkat pendidikan dan pangkat/golongan. Hal ini mencerminkan kapasitas serta profesionalitas aparatur dalam mendukung penyelenggaraan urusan industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM di Provinsi DKI Jakarta. Proporsi pegawai dengan latar belakang pendidikan tinggi menjadi indikator penting bagi kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, digitalisasi layanan, serta tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks. Dengan demikian, SDM Dinas PPKUKM Jakarta diposisikan sebagai aset strategis yang harus terus ditingkatkan kompetensinya melalui program pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan karier guna menjawab tantangan pembangunan ekonomi daerah yang semakin dinamis. Berdasarkan klasifikasi jabatan, pegawai terbagi ke dalam jabatan struktural, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana. Struktur ini mencerminkan adanya pembagian tugas yang jelas, mulai dari pengambilan keputusan strategis, pelaksanaan fungsi teknis sesuai bidang, hingga dukungan administratif untuk memastikan proses pelayanan publik berjalan efektif

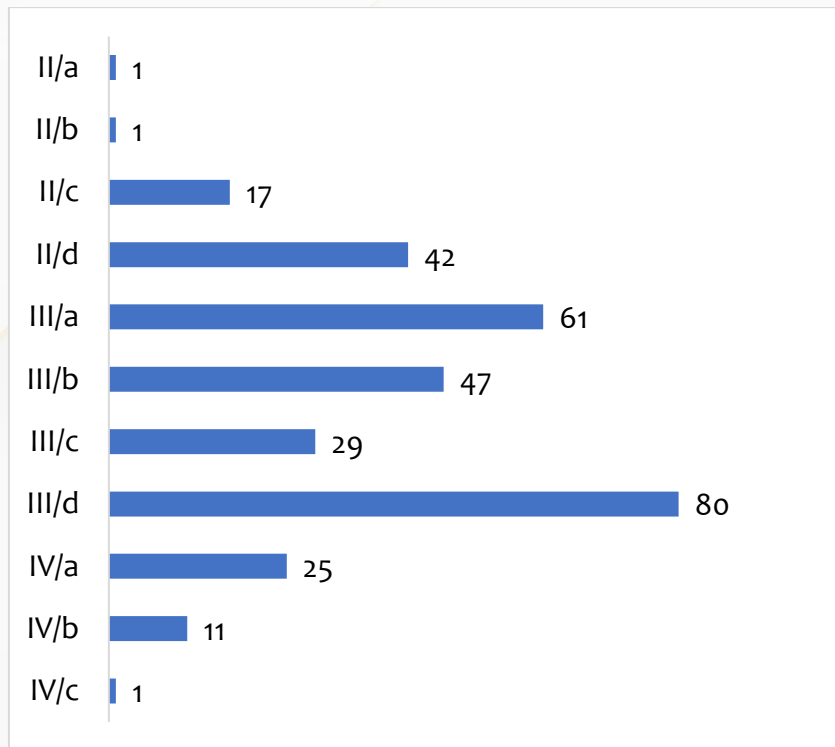


Gambar 2. 6 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Data Kepagawaian DPPKUKM DKI Jakarta, 2025

Dari sisi komposisi gender, terdapat 177 pegawai laki-laki dan 154 pegawai perempuan. Komposisi ini relatif seimbang, dengan dominasi tipis oleh pegawai laki-

laki. Keseimbangan gender ini penting sebagai cerminan keterwakilan dan keadilan dalam dunia kerja, serta memperlihatkan bahwa kesempatan berkarier di Dinas PPKUKM cukup terbuka bagi kedua kelompok. Ke depan, pengelolaan SDM berbasis kesetaraan gender dapat terus diperkuat untuk mendukung prinsip inklusivitas dan keberagaman dalam organisasi.



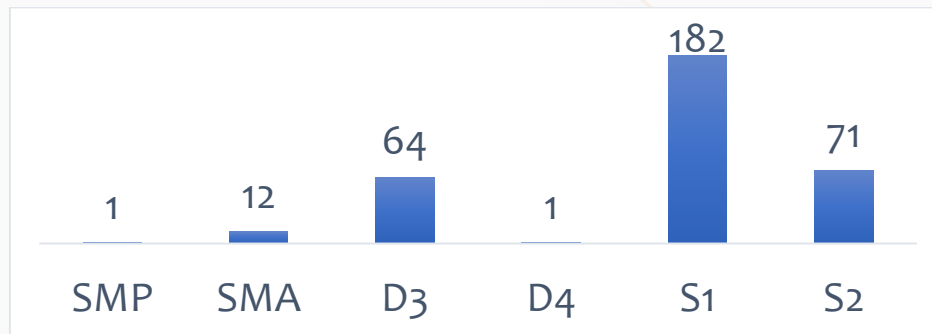
Gambar 2. 7 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan

Sumber: Data Kepagawaian DPPKUKM DKI Jakarta, 2025

Dari sisi golongan kepangkatan, mayoritas pegawai berada pada golongan III/d (80 orang), III/a (61 orang), dan III/b (47 orang), yang menggambarkan dominasi pegawai pada level menengah dengan pengalaman dan masa kerja yang cukup panjang. Sementara itu, pegawai pada golongan IV masih relatif terbatas, terutama IV/a (25 orang), IV/b (11 orang), dan IV/c (1 orang). Kondisi ini mengindikasikan perlunya pengembangan jenjang karier yang lebih intensif agar jumlah pegawai yang dapat mencapai golongan tinggi semakin meningkat. Di sisi lain, keberadaan pegawai pada golongan II masih cukup signifikan (61 orang), yang menunjukkan adanya tenaga pelaksana dan staf administrasi yang menjadi tulang punggung operasional.

Dari sisi pendidikan terakhir, sebagian besar pegawai berpendidikan S1 (182 orang) dan S2 (71 orang). Dominasi pendidikan tinggi ini menjadi modal penting dalam

menghadapi dinamika pembangunan ekonomi, digitalisasi layanan, serta tuntutan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Namun demikian, masih terdapat pegawai dengan latar belakang pendidikan D3 (64 orang), SMA (12 orang), D4 (1 orang), dan SMP (1 orang). Keberagaman ini menunjukkan perlunya strategi peningkatan kapasitas melalui program pelatihan, pengembangan kompetensi, dan peluang studi lanjut untuk memastikan seluruh pegawai dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi.



Gambar 2. 8 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Sumber: Data Kepagawaian DPPKUKM DKI Jakarta, 2025

Secara umum, analisis rekapitulasi pegawai Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa komposisi SDM cukup berimbang dari sisi gender, dominan pada golongan menengah dengan peluang pengembangan ke golongan tinggi, serta ditopang oleh tingkat pendidikan formal yang relatif baik. Dengan pengelolaan SDM yang terencana melalui peningkatan kompetensi, jenjang karier, dan program pengembangan kapasitas, pegawai Dinas PPKUKM diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam mendorong kemandirian UMKM, memperkuat sektor perdagangan, dan mengakselerasi pembangunan industri di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan tabel di atas, dapat dianalisis sumber daya Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1) Struktur pangkat/golongan & pengalaman.

Komposisi pegawai tersebar dari **Golongan II (II/a–II/d)** hingga **Golongan IV (IV/a–IV/b/IV/c)**, dengan mayoritas berada di **Golongan III (III/a–III/d)** yang menandakan tulang punggung operasional diisi oleh pejabat muda–madya. Keberadaan beberapa pejabat **IV/a–IV/c** di sekretariat, bidang teknis, dan UPT menunjukkan kapasitas manajerial serta pembinaan karier yang berjalan; namun proporsi III/a–III/b yang cukup besar mengindikasikan kebutuhan percepatan jenjang (pemetaan angka kredit, uji kompetensi, dan CPD) agar *pipeline* kepemimpinan tidak tersendat.



2) **Demografi usia & gelombang pensiun.**

Tahun pensiun tersebar dari **2025–2060**, dengan **gelombang pertama 2026–2032** (banyak pegawai kelahiran 1967–1974) berada pada posisi pengawas hingga administrator. Ini menuntut *succession planning* yang jelas, transfer pengetahuan, dan *job shadowing* minimal 1–2 tahun pada unit yang krusial (Perdagangan, Koperasi, Metrologi, LSPro/UPPKB2T, dan Pusdatin) agar layanan tidak terganggu saat pejabat senior purna tugas.

3) **Pendidikan & kecocokan keahlian.**

Latar pendidikan didominasi **S1** (manajemen, akuntansi, hukum, ekonomi/ekbang, teknik industri, teknik kimia, teknik informatika), disusul **S2** pada posisi strategis (manajemen, administrasi publik/kebijakan, teknik). Di rumpun pengujian/standarisasi dan metrologi, terdapat **D3/D4 teknis** (analisis/teknik kimia, metrologi & instrumen) yang sesuai kebutuhan laboratorium dan tera/tera ulang. Ini menunjukkan **kecocokan kompetensi inti** untuk layanan pengawasan, standardisasi, sertifikasi, serta data & digital, namun tetap perlu **upskilling digital** (**data analytics, e-catalog, e-procurement, market-intelligence**) dan **sertifikasi profesi** (pengadaan, auditor mutu, penyelia halal, analisis kebijakan).

4) **Sebaran unit & spesialisasi layanan.**

Sekretariat diisi kombinasi manajemen, akuntansi, TI, dan perpustakaan—memadai untuk tata kelola internal dan arsip. **Bidang Perindustrian** kuat pada teknik industri/kimia; **Perdagangan** dan **Pengawasan** memiliki kombinasi manajemen, hukum, dan teknik—relevan untuk stabilisasi harga, perlindungan konsumen, serta *risk-based supervision*. **Bidang Koperasi & UKM** berisi manajemen/administrasi publik—sesuai untuk pemberdayaan kelembagaan dan ekosistem UMKM. **UP/UPT** (UPPKB2T, UPPISP, Metrologi) memiliki komposisi teknis yang mumpuni untuk LSPro, pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan tera; namun beberapa catatan peralatan/sarana mengharuskan **penguatan kompetensi alat & akreditasi** agar kinerja layanan meningkat.

5) **Gender & keberagaman.**

Komposisi **P/L** relatif berimbang di sejumlah unit, dengan perempuan menempati peran strategis (administrator/pengawas dan fungsional). Ini peluang untuk memperkuat **kebijakan inklusif** (pengembangan karier setara, *leadership program* bagi pegawai perempuan) sekaligus memastikan penugasan teknis tidak bias gender—terutama di unit laboratorium dan lapangan.



2.1.3 Implikasi manajerial & rekomendasi pengembangan

a. Manajemen talenta & suksesi

Petakan posisi kritikal yang akan ditinggal pensiun 2026–2032, tetapkan *deputy/acting pool*, dan percepat kenaikan jenjang bagi talenta III/b–III/d. *Upskilling* prioritas: data/AI publik, pengawasan berbasis risiko, sertifikasi auditor mutu (ISO/IEC 17025 & 17065), penyelia halal, pengadaan barang/jasa, serta export readiness untuk pendamping UMKM. Konsolidasi fungsional: dorong pembentukan/peningkatan jabatan fungsional spesifik (Analisis Kebijakan, Pranata Laboratorium, Penera/Penera Terampil, Statistisi/Pranata Komputer) agar kinerja terukur dengan angka kredit. Rotasi terarah lintas unit ekosistem industri–perdagangan–koperasi–UMKM. Penguatan budaya kinerja: OKR/KPI tematik (stabilisasi harga, ekspor UMKM, akreditasi laboratorium, kepatuhan metrologi) ditautkan dengan insentif kinerja dan coaching rutin.

Secara keseluruhan, profil SDM Dinas PPKUKM menunjukkan fondasi kompetensi yang kuat dan *pipeline* talenta yang luas di Golongan III, dengan tantangan utama pada gelombang pensiun awal, kebutuhan sertifikasi/akreditasi teknis, dan penguatan kapabilitas digital dan market-intelligence untuk mendukung strategi: transformasi industri lokal, fasilitasi perdagangan, modernisasi koperasi, penguatan ekosistem UMKM, serta pengawasan terpadu berbasis risiko.

b. Sarana Prasarana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta memiliki sarana dan prasarana yang cukup beragam, mencerminkan fungsi strategisnya dalam mendukung pelayanan publik, pemberdayaan usaha, dan pengembangan ekonomi daerah. Dari sisi aset tanah, Dinas mengelola berbagai lokasi penting seperti tanah kantor Perintis Kemerdekaan seluas lebih dari 30.000 m² dengan nilai tercatat mencapai Rp93 miliar, serta sejumlah tanah pasar dan rumah susun binaan dengan nilai miliaran rupiah yang menjadi penopang kegiatan usaha masyarakat.

Pada kelompok aset gedung dan bangunan, terdapat sarana vital berupa gedung kantor dan pasar, antara lain gedung kantor di Kebon Melati seluas 15.264 m² dengan nilai Rp44,4 miliar, serta pasar Jatinegara Kaum dengan nilai Rp7,9 miliar. Gedung-gedung ini tidak hanya menjadi pusat operasional, tetapi juga sarana layanan ekonomi rakyat. Sarana fisik ini dilengkapi dengan infrastruktur

jalan dan jaringan, seperti jalan khusus di Perintis Kemerdekaan dengan nilai Rp1,82 miliar serta instalasi komunikasi elektronik dan gardu listrik yang mendukung mobilitas dan keberlangsungan layanan usaha.

Dari sisi peralatan dan mesin, aset yang dimiliki relatif standar berupa meja kerja, lemari besi, rak penyimpanan, dan *filing cabinet*, sebagian besar bernilai Rp1–2 juta per unit. Walaupun tergolong sederhana, peralatan ini menjadi tulang punggung administrasi pelayanan. Pada kategori aset tetap lainnya, terdapat sarana kesenian dan promosi, termasuk keramik guji, *gallery*, dan instalasi promosi dengan nilai hampir Rp1 miliar yang mendukung kegiatan pameran serta promosi produk UMKM.

Transformasi digital didukung oleh aset tidak berwujud berupa perangkat lunak dan sistem database dengan nilai tercatat Rp1,34 miliar. Hal ini sejalan dengan tuntutan modernisasi pelayanan publik yang berbasis digital. Di sisi lain, masih terdapat aset yang berstatus rusak berat, seperti gedung kantor dengan nilai Rp6,03 miliar serta berbagai kendaraan dan mesin kerja, yang membutuhkan revitalisasi atau penghapusan agar tidak membebani pengelolaan aset. Selain itu, terdapat aset ekstrakomptabel berupa perangkat teknis seperti UPS, telepon, alat ukur, dan alat pemadam kebakaran dengan nilai jutaan rupiah per unit yang mendukung kelancaran layanan harian.

Secara keseluruhan, sarana dan prasarana Dinas PPKUKM DKI Jakarta relatif lengkap untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok, namun masih dihadapkan pada tantangan revitalisasi gedung dan pasar yang menua, pemutakhiran peralatan teknis dan laboratorium, serta penguatan infrastruktur digital agar lebih sesuai dengan tuntutan pelayanan modern. Oleh karena itu, arah kebijakan ke depan adalah optimalisasi pemanfaatan aset, revitalisasi Sarana dan prasarana yang rusak atau tidak relevan, serta modernisasi berbasis teknologi informasi guna mendukung peran Dinas sebagai penggerak utama ekosistem industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM di ibu kota.

2.1.4 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Kinerja pelayanan Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta dalam periode 2023–2024 menunjukkan dinamika yang cukup beragam. Dari sisi sektor perindustrian, kontribusi terhadap perekonomian daerah masih belum mencapai target. Realisasi



kontribusi industri pada tahun 2023 sebesar 11,36 persen dan pada tahun 2024 sebesar 11,49 persen, berada di bawah target tahunan maupun target akhir sebesar 12,6 persen. Demikian pula pertumbuhan sektor perindustrian hanya tercatat 1,86 persen pada tahun 2023 dan 1,14 persen pada tahun 2024, jauh di bawah target tahunan 6,5–8 persen. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan struktural pada sektor industri di Jakarta, baik akibat keterbatasan ruang, tingginya biaya produksi, maupun transisi ekonomi yang semakin bergeser ke sektor jasa dan perdagangan.

Sebaliknya, sektor perdagangan justru mencatatkan capaian yang melampaui target. Kontribusi PDRB sektor perdagangan naik dari 15,69 persen pada tahun 2023 menjadi 18,01 persen pada tahun 2024, menembus target tahunan dan bahkan melampaui target akhir 17,2 persen. Pertumbuhan sektor perdagangan juga menunjukkan tren positif, dari 4,52 persen pada 2023 menjadi 6,87 persen pada 2024, jauh di atas target akhir 5,9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan, termasuk perdagangan digital, ritel modern, dan distribusi barang, menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Jakarta dalam periode ini.

Sementara itu, indikator terkait peran UMKM dan koperasi belum menunjukkan data realisasi yang memadai. Target peningkatan jumlah koperasi berkualitas, pertumbuhan pelaku UMKM, serta peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah belum dapat diukur dengan baik karena keterbatasan integrasi sistem pelaporan. Kondisi ini menunjukkan masih perlunya penguatan tata kelola data, integrasi sistem informasi lintas unit, serta penyusunan metode pengukuran yang lebih baku agar capaian program dapat diukur secara akurat.

Secara umum, capaian rata-rata Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta meningkat dari 85,06 persen pada 2023 menjadi 83,14 persen pada 2024, dengan rerata pencapaian 83,73 persen. Peningkatan ini didorong oleh keberhasilan sektor perdagangan, sementara sektor industri menjadi titik lemah yang menahan capaian agregat. Oleh karena itu, fokus ke depan adalah mengakselerasi kinerja sektor industri melalui revitalisasi sentra IKM, modernisasi produksi, dan fasilitasi sertifikasi standar. Di sisi lain, momentum perdagangan harus dijaga melalui penguatan sistem distribusi, stabilisasi harga, serta fasilitasi UMKM masuk ke pasar ekspor. Dengan demikian, kinerja dinas dapat bergerak lebih seimbang antara industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM, sesuai arah pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing.



Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023-2026

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target			Realisasi		Rasio Capaian		
			2023	2024	Kondisi Akhir	2023	2024	2023	2024	Eksisting terhadap Target Kondisi Akhir
Peningkatan Peran Industri Dalam Perekonomian Daerah	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap Perekonomian Daerah	12,28	12,3	12,4	12,6	11,36	11,49	92,36	92,66	91,19
Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Berwawasan Lingkungan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian	11,01	6,5	7	8	1,86	1,14	28,62	16,29	14,25
Peningkatan Peran Perdagangan Dalam Perekonomian Daerah	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	16,85	16,9	17	17,2	15,69	18,01	92,84	100	100
Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	5,46	5,6	5,7	5,9	4,52	6,87	80,71	100	100



Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target			Realisasi		Rasio Capaian		
			2023	2024	Kondisi Akhir	2023	2024	2023	2024	Eksisting terhadap Target Kondisi Akhir
Peningkatan Resiliensi Perekonomian Melalui Peran Koperasi dan Pembinaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Pelaku UMKM	52	4,5	5	5,5	7,35	7,75	100	100	100
Penumbuhan Nilai – Nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi	Jumlah Koperasi yang berkualitas	200	50	50	50	50	40	100	80	80
	Persentase Pelaku UMKM yang meningkatkan Kapasitasnya	50	55	60	70	89	89	100	100	100
RATA-RATA CAPAIAN								85,06	84,13	83,73



2.1.5 Kelompok Sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Kelompok sasaran pembangunan Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta dirumuskan dengan mengacu pada pendekatan pentahelix, yaitu sinergi lima unsur utama pembangunan yang saling melengkapi dan memperkuat. Pendekatan ini dipandang relevan mengingat kompleksitas dinamika ekonomi daerah yang membutuhkan kolaborasi multipihak, bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari dunia usaha, akademisi, komunitas masyarakat, serta media. Melalui kolaborasi *pentahelix*, diharapkan program dan kebijakan yang dijalankan Dinas PPKUKM mampu mendorong ekosistem industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan.

1. Pemerintah

Kelompok sasaran dari unsur pemerintah mencakup perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, kementerian/lembaga terkait (seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), serta pemerintah pusat sebagai regulator. Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan, pemberian fasilitas, penguatan regulasi, dan memastikan adanya iklim usaha yang kondusif.

2. Akademisi

Akademisi menjadi kelompok sasaran yang berperan dalam memberikan kontribusi riset, kajian kebijakan, pengembangan teknologi, serta inovasi yang dapat memperkuat daya saing industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM. Selain itu, perguruan tinggi dan lembaga riset berfungsi sebagai mitra dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan, dan program pendampingan.

3. Dunia Usaha

Kelompok sasaran dari dunia usaha mencakup pelaku industri, pedagang, koperasi, serta UMKM di Jakarta. Mereka adalah aktor utama yang menjalankan aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dunia usaha menjadi motor penggerak yang perlu difasilitasi agar semakin inovatif, adaptif, dan berdaya saing tinggi, baik di pasar domestik maupun global.

4. Komunitas/Masyarakat



Komunitas dan masyarakat, termasuk asosiasi pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, komunitas wirausaha, serta kelompok konsumen, merupakan kelompok sasaran yang penting dalam membangun ekosistem usaha yang sehat dan inklusif. Mereka mendorong partisipasi aktif, mengawal kepentingan anggota, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi lokal melalui jaringan sosial yang mereka miliki.

5. Media

Media massa, baik cetak, elektronik, maupun digital, menjadi kelompok sasaran strategis yang berfungsi dalam menyebarkan informasi, mempromosikan produk lokal, memberikan edukasi publik, serta membangun citra positif industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM di Jakarta. Peran media juga penting dalam menghubungkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat melalui informasi yang transparan dan edukatif.

2.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan tersebut, dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. **Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.**

Dalam perumusan permasalahan dan isu strategis, Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta melakukan analisis terhadap permasalahan dari tiap urusan, kewilayahan, dan Unit Pelaksana. Permasalahan ini didapatkan dari hasil *Forum Group Discussion* yang menghasilkan pemetaan sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Pemetaan Masalah

URUSAN	PEMETAAN PERMASALAHAN AKTUAL	
	Permasalahan	Akar Masalah
Bidang Perindustrian	Belum optimalnya pengembangan	- Belum adanya pemetaan komprehensif atas jenis industri unggulan di DKI Jakarta, yang



URUSAN	PEMETAAN PERMASALAHAN AKTUAL	
	Permasalahan	Akar Masalah
	industri lokal yang terintegrasi	<p>menghambat penetapan arah pengembangan sentra industri secara tepat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sentra industri yang ada tumbuh secara organik tanpa dasar legal formal, sehingga tidak memiliki kerangka kelembagaan dan perencanaan yang kuat - Minimnya keterhubungan antara pelaku IKM dan industri besar, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun inovasi produk. - Hasil riset dari lembaga akademik dan litbang tidak terserap secara optimal oleh sektor industri, karena kurangnya kolaborasi, platform komunikasi, atau kecocokan kebutuhan pasar. - Kualitas produk lokal masih kalah saing dibandingkan produk impor, baik dari sisi standar mutu, desain, hingga daya tahan dan citra merek.
Bidang Perdagangan	Belum optimalnya fasilitasi perdagangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Kerja sama perdagangan internasional secara legal dan diplomatik merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun pemanfaatannya oleh pelaku usaha di daerah masih sangat terbatas karena kurangnya sosialisasi, pendampingan, dan insentif. - Layanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) belum mendorong optimalisasi ekspor karena pelaku usaha belum sepenuhnya memanfaatkan skema kerja sama dagang yang ada. - Keterbatasan koordinasi dan sistem integrasi antarperangkat daerah dalam fasilitasi perdagangan, khususnya dalam hal perizinan dan promosi. --> kendala pada pelaku ekonomi



URUSAN	PEMETAAN PERMASALAHAN AKTUAL	
	Permasalahan	Akar Masalah
		belum memenuhi persyaratan data aplikasi (Pemasaran)
Bidang Koperasi	Belum optimalnya peran koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat	<ul style="list-style-type: none">- Terbatasnya kapasitas SDM dan manajerial pengurus dan pengawas koperasi, khususnya koperasi baru seperti Koperasi Kelurahan Merah Putih.- Belum terbangunnya ekosistem pembiayaan yang inklusif dan mudah diakses oleh koperasi.- Kelembagaan koperasi masih lemah, termasuk dalam aspek tata kelola, legalitas, dan digitalisasi.- Minimnya pendampingan berkelanjutan serta belum optimalnya sinergi antarinstansi dalam pembinaan koperasi.- belum optimalnya kompetensi pelaku Koperasi untuk mendorong promosi berbasis digital- Belum optimalnya kearsipan data koperasi- Belum optimalnya pameran untuk produk-produk koperasi- Kepatuhan koperasi yang rendah dikarenakan akar seperti kepatuhan menjalankan rapat, melaporkan, pelaporan sertifikat
Bidang UKM	Belum optimalnya transformasi dan daya saing UKM	<ul style="list-style-type: none">- Belum adanya kesepakatan definisi baku terkait konsep UMKM naik kelas (aspek skala usaha, omzet, aset, atau tenaga kerja).- Rendahnya pemahaman dan kepatuhan pelaku UMKM terhadap regulasi perpajakan.- Ketidakkuratan data usaha seperti pemecahan unit usaha untuk menghindari pajak menyebabkan sulitnya mengidentifikasi UMKM yang benar-benar tumbuh.



URUSAN	PEMETAAN PERMASALAHAN AKTUAL	
	Permasalahan	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> - Literasi keuangan pelaku UMKM masih rendah, sehingga menyulitkan mereka dalam mengakses pembiayaan formal. - Mindset berwirausaha pelaku UMKM masih lemah, cenderung bersifat survival dan tidak berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang. - Produk UMKM kalah bersaing dari sisi harga dan kualitas dibanding produk pabrikan dan impor.
Bidang Pengawasan	Belum optimalnya sistem pengawasan lintas sektor	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi teknis dan kewajiban administratif, seperti tera ulang, izin edar, atau standar produk. - Belum terbangunnya sistem pengawasan berbasis risiko dan data yang dapat memprioritaskan sektor dan pelaku usaha strategis - Belum optimalnya pemerataan pengawasan karena cakupan pengawasan yang luas - Belum adanya sistem pengawasan lintas sektor yang terintegrasi - Belum optimalnya sinergi antarunit dalam pengawasan koperasi, UKM, barang beredar, dan perlindungan konsumen. - Terbatasnya kapasitas dan jumlah petugas pengawas serta PPNS, baik dari sisi kompetensi, sarana kerja, maupun pendampingan hukum.
Kewilayahan		
Sudin PPKUKM JP	Pertumbuhan sektor perdagangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya akses pasar - Masih kurangnya akses ke pasar digital dan juga pembiayaan digital dan kurangnya kompetensi SDM KUMKM



URUSAN	PEMETAAN PERMASALAHAN AKTUAL	
	Permasalahan	Akar Masalah
	(UMKM) belum optimal	
Sudin PPKUKM JU	Pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan dan Perindustrian belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya koordinasi unit usaha koperasi merah putih kepada pihak distributor baik swasta maupun BUMN maupun BUMD - Pusat perbelanjaan/ritel modern belum memberikan ruang 20% untuk produk lokal/UMKM seperti yang diamanatkan - Belum adanya pemetaan komprehensif atas jenis industri unggulan, yang menghambat penetapan arah pengembangan sentra industri secara tepat
Sudin PPKUKM JB	Pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan dan Perindustrian belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak pusat perbelanjaan/ritel modern yang belum memberikan ruang 20% untuk produk lokal/UMKM seperti yang diamanatkan - Pemahaman dan komitmen pihak pengelola ritel terhadap Perda masih rendah, hanya formalitas - Kurangnya pengawasan & sanksi yang tegas terhadap pelanggaran perda, sehingga implementasi tidak konsisten - Kurangnya ruang promosi bagi UMKM di retail modern - Ruang yang disediakan terkadang ditempatkan di area yang kurang strategis, sehingga kurang menarik pembeli - Belum optimalnya Regenerasi Industri
Sudin PPKUKM JS	Pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta perdagangan belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan Industri Mikro, Kecil dan Menengah (IMKM) Belum Optimal - Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang Industri, Ruang Usaha dan Infrastruktur - Rendahnya Akses, Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi



URUSAN	PEMETAAN PERMASALAHAN AKTUAL	
	Permasalahan	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya Inovasi Produk dan Diferensiasi - Keterbatasan Akses Permodalan bagi pelaku usaha - Belum optimalnya pendampingan Legalitas, Sertifikasi dan Standar Produk UMKM - Keterbatasan Akses Pasar dan Promosi produk UKM - Masih terbatasnya Kolaborasi dan Jejaring Usaha - Pertumbuhan Industri Mikro, Kecil dan Menengah (IMKM) Belum Optimal
Sudin PPKUKM JT	Pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan dan Perindustrian belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya Kapasitas SDM Sudin PPKUKM terkait pelayanan penerbitan SKA, Kurang Sinergi Lintas OPD. Program pemberdayaan UMKM belum terintegrasi optimal antara SKPD/UKPD terkait - Rendahnya kepatuhan pelaku industri terhadap regulasi teknis dan administrative - Permasalahan persyaratan dasar SLF dan PBG bagi industri mikro kecil dgn KBLI skala risiko menengah tinggi dan tinggi, sehingga sulit untuk terbit izin/ sertifikat standar sebab kesulitan dalam pembuatan SLF dan PBG - Terbatasnya akses pasar - Pembinaan, Pemberdayaan dan pendampingan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Administrasi Jakarta Timur Pasca Pembentukan KKMP - Rendahnya pemahaman dan kesadaran akan ketentuan perpajakan bagi Koperasi dan UMKM



URUSAN	PEMETAAN PERMASALAHAN AKTUAL	
	Permasalahan	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none">- Rendahnya mindset berwirausaha bagi pelaku UMKM binaan- Kurang Sinergi Lintas OPD.- Program pemberdayaan UMKM belum terintegrasi optimal antara SKPD/UKPD terkait;- Sulitnya produk UMKM bersaing dengan produk pabrikan dan produk impor (terutama dalam harga produk)- Kurangnya kompetensi SDM UMKM
Sudin PPKUKM KS	Belum Optimalnya Pertumbuhan Sektor, Perdagangan, dan Koperasi, UKM Wilayah Kabupaten Kep. Seribu	<ul style="list-style-type: none">- Program pemberdayaan UMKM belum terintegrasi optimal antara SKPD/UKPD terkait (perdagangan, pariwisata, koperasi, dll).- Fasilitas pendukung seperti tempat produksi, peralatan, serta lokasi berjualan masih sangat terbatas atau belum memadai.- Ketiadaan agunan dan sulitnya proses administrasi menjadi hambatan utama bagi UMKM di wilayah kepulauan dalam mengakses pembiayaan formal.- Rendahnya kemampuan manajerial dan literasi digital pelaku usaha menyebabkan sulitnya adaptasi terhadap perkembangan pemasaran digital.- Banyak koperasi hanya ada di atas kertas (tidak RAT, tidak berproduksi) karena lemahnya pembinaan dan kesadaran anggota koperasi.- Keterpencilan lokasi menyebabkan produk UMKM sulit dijangkau pasar yang lebih luas, baik secara fisik maupun melalui e-commerce- Pelaku UMKM belum banyak yang memanfaatkan platform digital, baik untuk



URUSAN	PEMETAAN PERMASALAHAN AKTUAL	
	Permasalahan	Akar Masalah
		pemasaran, pembukuan, maupun transaksi non-tunai.
UPT		
UPPKB2T	Belum optimalnya kontribusi retribusi dari sertifikasi oleh LSPPro UPPKB2T	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya permintaan layanan pengujian seiring dengan berkurangnya Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2025. - Banyak alat uji tidak berfungsi, sehingga mengurangi cakupan layanan pengujian yang dapat diberikan. - Ruang lingkup pengujian belum berkembang, karena keterbatasan sarana, SDM, dan belum adanya fasilitas pendukung untuk ekspansi layanan. - Belum adanya klien LSPPro UPPKB2T, di tengah persaingan ketat dengan LSPPro lain yang sudah mapan pada lingkup bahan dan barang teknik - Relokasi mitra strategis (seperti Mako Satpol PP) berpotensi berkurangnya pengunjung langsung ke lokasi layanan UPPKB2T.
UPPISP	Belum optimalnya pelayanan standarisasi SNI terhadap produk sepatu, perlengkapan bayi dan mainan anak	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada penunjukkan dari Kementerian Perindustrian sebagai lembaga penilaian kesesuaian untuk produk SNI wajib sepatu pengaman dan pakaian bayi - Belum lengkapnya fasilitas pengujian yang dimiliki oleh laboratorium untuk pengujian sepatu pengaman dan mainan anak - Belum terakreditasinya lingkup produk Mainan anak pada LSPPro UPPISP
UP Metrologi	Belum optimalnya jangkauan layanan metrologi sehingga impactnya	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terkait kewajiban tera/tera ulang masih rendah - kontrol, pengawasan dan penegakan hukum terkait tera/tera ulang rendah



URUSAN	PEMETAAN PERMASALAHAN AKTUAL	
	Permasalahan	Akar Masalah
	terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan belum maksimal	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana kemetrolagian masih kurang inline dengan perkembangan zaman - Layanan belum berbasis digital secara menyeluruh - Belum ada data potensi alat ukur takar timbang dan perlengkapannya sebagai dasar penentuan target cakupan pelayanan
UPK PPKUKMP Pulogadung	Belum optimalnya pengawasan dan layanan berbasis digital secara menyeluruh	<ul style="list-style-type: none"> - Sub bag Tata usaha: Belum optimalnya peran pembinaan serta pemasaran pada UKM/IKM di Kawasan UPK PPUKMP Pulogadung karena tumpang tindih dengan tugas dan fungsi Sudin PPKUKM Jakarta Timur; - Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di Kawasan UPK PPUKMP Pulogadung; - Struktur organisasi saat ini belum optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsi UPK PPUKMP Pulogadung - Sub bag keuangan: belum optimlanya pengelolaan aset di Kawasan UPK PPUKMP Pulogadung, sehingga terdapat penguasaan lahan secara ilegal oleh masyarakat dan/atau wanprestasi terhadap Kerja Sama Operasional (KSO)
Pusdiklat	Belum optimalnya kapasitas pelaku ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terintegrasinya data pelatihan antara peserta pelatihan dan anggota jakpreneur - Kurang optimalnya sarana dan prasarana gedung pusdiklat
Pusdatin	Pengembangan kebijakan berbasis data terhadap pelaku UMKM di DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya literasi digital masyakat dalam mengakses layanan aplikasi yang disediakan pemerintah



URUSAN	PEMETAAN PERMASALAHAN AKTUAL	
	Permasalahan	Akar Masalah
	mengalami hambatan signifikan akibat belum terintegrasinya sistem data antar instansi, seperti NIB (BKPM), NPWP (Kementerian Keuangan), dan data jumlah pelaku usaha (Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM).	<ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya akun layanan pemerintah yang harus diakses dengan tata cara berbeda-beda membuat masyarakat kesulitan dalam mengakses sistem dan memperbarui informasi terkait usahanya - Adanya kepentingan sektoral antar instansi menjadi hambatan dalam berbagi data masyarakat untuk kepentingan bersama. - Perbedaan tingkat kesiapan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun anggaran, serta waktu pelaksanaan antar instansi menjadi kendala dalam proses integrasi.

2.3 IDENTIFIKASI ISU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA

Identifikasi isu strategis pada bidang-bidang yang Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai tantangan dan peluang pembangunan di wilayah ibu kota. Telaah isu ini disusun dengan memperhatikan identifikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan, perkembangan isu global, nasional, dan regional, serta hasil Forum *Focus Group Discussion* (FGD) bersama para pemangku kepentingan. Pendekatan tersebut bertujuan agar isu yang diidentifikasi benar-benar mencerminkan kondisi aktual, relevan dengan dinamika lingkungan strategis, serta mampu menjadi dasar dalam perumusan strategi, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Dengan demikian, identifikasi isu diharapkan dapat memperkuat transformasi lokal menuju ekosistem yang terintegrasi, berdaya saing, berbasis inovasi, dan berkelanjutan. Identifikasi isu didapatkan dari telaah isu berdasarkan Dokumen Perencanaan Pembangunan, urusan, kewilayahan, dan UPT. Telaah isu Dokumen Perencanaan Pembangunan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, regulasi



teknis (Permendagri, Inmendagri), serta prinsip perencanaan yang akuntabel dan terintegrasi. Penyusunan dokumen Renstra Dinas PPKUKM DKI Jakarta perlu memedomani beberapa dokumen perencanaan Pembangunan, yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) yang terkait, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029, RPJPD, RTRW, dan KLHS. Berikut beberapa penelaahan terhadap dokumen tersebut yang terkait dengan tugas pokok fungsi dari Dinas PPKUKM DKI Jakarta.

2.3.1 Telaah Dokumen RPJMN Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025. Terdapat isu strategis yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kinerja Dinas PPKUKM DKI Jakarta. Sasaran dan Prioritas Nasional yang menjadi rujukan penelaahan isu nasional pada Rencana Strategis Dinas PPKUKM, di antaranya:

- **Prioritas Nasional 3:** Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
Dengan Sasaran Pembangunan:

- a. Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas

- **Prioritas Nasional 5:** Melanjutkan Hilirasasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Dengan sasaran Pembangunan:

- a. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan
- b. Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.3.2 Telaah Renstra K/L

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya, Dinas PPKUKM mengacu pada 4 Kementerian/Lembaga Terkait sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yaitu: Kementerian Perindustrian, Kementerian



Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Masing-masing kementerian memiliki kinerja yang memerlukan upaya penyalarsan oleh Dinas terkait. Berikut kinerja dari masing-masing Kementerian:

Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Kementerian

Kementerian/ Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Kementerian Perindustrian				
Pertumbuhan PDB industri pengolahan	Persen	4,64 (2023)	5,50	8,14
Rasio PDRB industri pengolahan di Provinsi KL/KEK prioritas terhadap PDB industri pengolahan	persen	47,92 (2023)	48,06	48,57
Kementerian Perdagangan				
Ekspor barang dan jasa	Persen PDB	21,7 (2023)	21,7	22,6
Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia	Persen	1,11 (2023)	1,12	1,43
Nilai ekspor jasa Indonesia	Miliar USD	23,10 (2023)	29,93	42,24
Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yangtergabung dalam rantai nilai global	Persen	0,81 (2023)	0,99	1,20
Nilai total pembelian perdagangan antar wilayah	Triliun rupiah	1.622 (2023)	1.803	3.013
Kementerian Koperasi				
Rasio Volume usaha koperasi terhadap PDB	persen	1,07 (2021)	1,10	1,20
Kementerian Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah				
Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah	persen	3,06	3,10	3,30
Rasio kewirausahaan	persen	3,08	3,10	3,60



2.3.3 Telaah Isu KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2025-2029

Perumusan isu strategis yang dilakukan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2025-2029 didasarkan pada penelaahan terhadap kondisi lingkungan hidup, indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta penelaahan terhadap dokumen strategis yang relevan dengan pembangunan Jakarta selama 5 tahun ke depan. Berdasarkan telaah dokumen KLHS, terdapat isu strategis pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kinerja Dinas PPKUKM DKI Jakarta adalah **Ketimpangan sosial-ekonomi**. Dinas PPKUKM DKI Jakarta turut andil dalam mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi di Jakarta antara lain: Skenario moderate: Peningkatan PDRB perkapita; Penurunan tingkat kemiskinan masyarakat kepulauan; Penurunan tingkat pengangguran terbuka. Serta Skenario akselerasi: Pengembangan ekonomi makro berskala global berbasis bisnis dan jasa.

2.3.4 Telaah Isu RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024–2044

Isu penataan ruang di Jakarta dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu rendahnya penyediaan sarana dan prasarana dasar yang memadai serta kebijakan perencanaan tata ruang yang belum relevan dalam menjawab tantangan yang dihadapi. Isu strategis penataan ruang tersebut diantaranya adalah:

- Kemacetan dan *high-cost economy*
- Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi digital
- *Squatter* dan *sprawling*
- Permasalahan lingkungan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024–2044 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024. Dalam dokumen RTRW terdapat tujuan dan kebijakan Pembangunan kota dalam RTRW Jakarta 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Telaah Isu RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024–2044

Tujuan	Kebijakan
1. Penataan ruang yang mendukung peran Jakarta sebagai kota bisnis berskala global	- Peningkatan daya saing bisnis dan investasi Jakarta sebagai kota bisnis berskala global



Tujuan	Kebijakan
	- Pengembangan sistem logistik kota yang efisien dan terkoneksi secara optimal dengan sistem logistik regional/ internasional

2.3.5 Telaah RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045

Isu strategis dalam RPJPD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2025-2045 dirumuskan berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan Jakarta, isu pembangunan global, nasional, dan regional (wilayah Aglomerasi Jabodetabekpunjur). Berdasarkan analisis tersebut, dirumuskan isu strategis jangka panjang pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kinerja Dinas PPKUKM DKI Jakarta adalah **Peningkatan produktivitas ekonomi yang setara dengan kota global di negara maju dan stabilitas ekonomi yang kokoh**. Dalam menjawab tantangan dan isu pembangunan Jakarta, serta dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara, Maju, Berdaulat dan Berkelanjutan, maka visi jangka panjang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2025-2045 adalah Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.

2.3.6 Telaah RPJMD DKI Jakarta Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025. Terdapat isu strategis yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kinerja Dinas PPKUKM DKI Jakarta adalah **Perekonomian Produktif, Kompetitif, dan Atraktif di Pasar Global**. Perdagangan di DKI Jakarta memiliki posisi yang sangat strategis, tidak hanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga sebagai *economic node* Asia Tenggara. Keberadaan Sekretariat ASEAN di Jakarta semakin memperkuat peran ini, menjadikan kota ini sebagai simpul utama interaksi ekonomi, diplomasi, dan perdagangan antarnegara kawasan maupun mitra global. Dari segi industri, Sektor Industri di DKI Jakarta memegang peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi motor transformasi menuju pembangunan berkelanjutan. Sebagai pusat kegiatan produksi, distribusi, dan inovasi, sektor industri Jakarta tidak hanya



menopang kebutuhan pasar domestik, tetapi juga terhubung erat dengan rantai pasok regional dan global.

Integrasi konsep ekonomi sirkular menjadi langkah strategis bagi industri Jakarta untuk mengoptimalkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi ketergantungan pada bahan baku baru, serta menekan jumlah limbah.

Lebih lanjut, Jakarta terus berupaya memperkuat ekosistem Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan meningkatkan kapasitas usaha melalui program inkubasi serta pengembangan rantai pasok yang berkelanjutan. Langkah ini dilakukan melalui optimalisasi peran *creative hub* di setiap kota administrasi dan pembangunan kemitraan antara industri besar dengan IKM, sehingga produktivitas dan daya saing pelaku IKM dapat meningkat melalui perluasan akses terhadap bahan baku berkualitas, penerapan teknologi modern, dan jaminan pasar yang lebih luas.

2.3.7 Telaah Isu Berdasarkan Urusan

Dinas PPKUKM DKI Jakarta mengampu 3 urusan antara lain urusan Koperasi dan UKM, Urusan Perindustrian dan urusan Perdagangan yang di dalam struktur organisasi didukung oleh 5 bidang antara lain Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Koperasi, Bidangn UKM dan Bidang Pengawasan. Penelaahan isu berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

1. Bidang Perindustrian

Perkembangan Teknologi Industri 5.0 secara global menuntut percepatan transformasi industri dengan orientasi pada digitalisasi, otomasi, dan efisiensi ramah lingkungan. Di tingkat nasional, hal ini tercermin pada agenda penguatan ekspor produk teknologi tinggi dan ramah lingkungan serta pendalaman struktur dan diversifikasi produk ekspor daerah. Adapun di Jakarta, investasi dan perizinan yang semakin menarik serta pengembangan industri ramah lingkungan mendorong perlunya akselerasi transformasi industri lokal. Oleh karena itu, isu strategis bagi Jakarta adalah mewujudkan transformasi industri lokal menuju ekosistem yang terintegrasi, berbasis potensi unggulan, inovasi, daya saing, dan berkelanjutan.

2. Bidang Perdagangan

Geopolitik dan geoekonomi global memengaruhi kestabilan rantai pasok dan harga komoditas yang berdampak pada perdagangan daerah. Nasionalnya, pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat



ekspor serta menjaga pasokan domestik. Di level regional, Jakarta sebagai pusat perdagangan di Indonesia Dimana stabilitas perekonomian Jakarta dan kawasan sekitarnya sangat ditentukan oleh kelancaran distribusi barang dan efisiensi logistik. Dengan demikian, isu strategis perdagangan Jakarta adalah fasilitasi perdagangan daerah dalam menjaga stabilitas harga, kemudahan usaha, serta peningkatan akses pasar global.

3. Bidang Koperasi

Globalisasi dengan dinamika geopolitik dan geoekonomi menuntut koperasi beradaptasi terhadap persaingan internasional dan kebutuhan akan tata kelola yang lebih modern. Agenda nasional menekankan pemerataan ekspor antarwilayah melalui penguatan kelembagaan koperasi yang mampu membuka akses pasar. Sementara itu, di tingkat regional, kualitas tata Kelola koperasi menjadi kebutuhan mendesak, di mana koperasi berperan sebagai wadah integrasi modal, pasar, dan kapasitas usaha. Karena itu, isu strategis bagi Jakarta adalah penguatan peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat secara modern dan adaptif.

4. Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Dinamika global dalam konteks geoekonomi menuntut UMKM mampu bersaing di pasar internasional dengan produk inovatif dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Nasionalnya, pemerintah mendorong percepatan transformasi digital UMKM dan penguatan e-commerce ekspor agar produk lokal dapat menembus pasar global. Pada level regional, pengelolaan UMKM dan sektor informal di Jakarta masih menjadi tantangan, sehingga perlu strategi pembinaan, sarpras, dan integrasi layanan. Dengan kondisi ini, isu strategis utama adalah penguatan ekosistem UMKM yang inklusif dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan komitmen daerah dalam menciptakan ekosistem kewirausahaan yang tangguh dan inklusif, upaya untuk memperluas ruang usaha terus menjadi prioritas strategis.

5. Bidang Pengawasan

Secara global, tata kelola pengawasan perdagangan dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi infomasi. Nasionalnya, pemerintah menekankan peningkatan kelembagaan dan sertifikasi untuk memastikan perlindungan konsumen dan kepatuhan usaha. Pada tataran regional, Jakarta perlu mengoptimalkan sistem Optimalisasi sistem pengawasan sektor Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dan UMKM. Karena itu, isu strategis yang muncul



adalah penguatan sistem pengawasan terpadu dan berbasis risiko agar kepastian hukum dan perlindungan konsumen dapat diwujudkan secara optimal.

2.3.8 Telaah Isu berdasarkan Kewilayahan

1. Sudin PPKUKM Jakarta Pusat (JP)

Pengembangan Kawasan Tanah Abang dan Kawasan Segitiga Emas sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Jakarta Pusat menjadi isu di tingkat regional Jakarta Pusat. Dalam dokumen RPJMD DKI Jakarta Tahun 2025-2029, Jakarta Pusat menjadi Pusat Bisnis, Jasa Keuangan, dan Sentra Perdagangan Internasional. Pengembangan Kawasan strategis meliputi (1) Kawasan Tanah Abang dikembangkan sebagai pusat grosir dan perdagangan jasa berskala global melalui pembangunan fasilitas kebutuhan sarana tempat usaha dan penentuan alokasi ruang bagi sektor informal dan golongan usaha kecil secara terintegrasi dengan pengembangan sektor informal dari berbagai jenis kegiatan perekonomian. (2) Kawasan Segitiga Emas dikembangkan sebagai kawasan bisnis terpadu berskala nasional, regional, dan global yang meliputi sebagian Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Setiabudi, dan Kecamatan Kebayoran Baru. Serta kawasan-kawasan lain yang perlu dikembangkan menyesuaikan kebijakan, di antaranya pada lingkup kawasan Pasar Baru, dan kawasan lainnya

2. Sudin PPKUKM Jakarta Utara (JU)

Pengembangan Kawasan pesisir utara bagian timur sebagai sentra industri menjadi isu utama di Jakarta Utara. Hal ini tertuang dalam dokumen RPJMD DKI Jakarta bahwa Jakarta Utara menjadi Kota Pesisir dengan Hub Logistik, Industri Perikanan, dan Pelabuhan Modern. Salah satu pengembangan ekonomi di Jakarta Utara yang sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas PPKUKM Adalah Kawasan Pesisir Utara Bagian Timur dikembangkan sebagai sentra industri, pergudangan dan perikanan berskala global.

3. Sudin PPKUKM Jakarta Barat (JB)

Pengembangan peran strategis sektor perdagangan di Jakarta Barat menjadi isu utama di Sudin PPKUKM Jakarta Barat. Tema pengembangan wilayah untuk Jakarta Barat Adalah Kota Niaga, Pusat Riset dan Pendidikan Tinggi, serta Destinasi Warisan Budaya. Jakarta Barat memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian DKI Jakarta, dengan potensi yang signifikan untuk dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan jasa. Penggunaan lahan untuk perdagangan dan jasa di Jakarta Barat cukup besar, yaitu sekitar 20% dari total



luas wilayah lahan perdagangan dan jasa Provinsi DKI Jakarta. Hal ini turut diperkuat dengan kontribusi ekonomi Jakarta Barat pada sektor ‘Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor’ (G) mencapai 19,73% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta Barat pada tahun 2024, menggambarkan peran strategis sektor perdagangan di Jakarta Barat dalam mendukung aktivitas ekonomi Provinsi DKI Jakarta. Hal ini didukung oleh keberadaan sejumlah kawasan tersier yang telah berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi, seperti Kawasan Lokasari-Mangga Besar, Rawa Belong, Asem Reges, Pasar Cengkareng, dan Tanjung Duren. Kawasan-kawasan ini, dengan karakteristik dan fungsi yang beragam, menunjukkan keunggulan kompetitif yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.

4. Sudin PPKUKM Jakarta Selatan (JS)

Jakarta Selatan mengusung tema Pembangunan Sentra ASEAN, Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru, serta Destinasi Wisata Urban. Dimana isu yang terkait dengan PPKUKM Adalah Pengembangan Kawasan Blok-M dan Kawasan segitiga emas sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Jakarta Selatan. Pengembangan ekonomi di Jakarta Selatan di fokuskan pada (1) Kawasan Blok-M dikembangkan sebagai ibukota diplomatik *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang dikembangkan dengan konsep Kawasan Berorientasi Transit. (2) Kawasan Segitiga Emas dikembangkan sebagai kawasan bisnis terpadu berskala nasional, regional, dan global yang meliputi sebagian Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Setiabudi, dan Kecamatan Kebayoran Baru.

5. Sudin PPKUKM Jakarta Timur (JT)

Wilayah Jakarta Timur memiliki tema Sentra Kawasan Industri Produktif, Permukiman, dan Hub Transportasi Regional. Isu yang sesuai dengan Sudin PPKUKM Jakarta Timur Adalah pengembangan kawasan *Jakarta industrial Estate* Pulogadung dan Kawasan Pusat industri Kecil Pulogadung sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Jakarta Timur. Pengembangan ekonomi di Jakarta Timur terdiri dari (1) Kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung dikembangkan sebagai kawasan industri terpadu yang mengintegrasikan bisnis kreativitas, dan komunitas. (2) Kawasan Pusat Industri Kecil Pulogadung dikembangkan sebagai sentra UMKM.

6. Sudin PPKUKM Kepulauan Seribu (KS)



Kepulauan Seribu merupakan Kabupaten Kepulauan yang terpisah dari daratan utama. Tema dalam dokumen RPJMD DKI Jakarta Tahun 2025-2029 untuk Kepulauan Seribu Adalah Kawasan Konservasi dan Pengembangan Ekonomi Biru yang Berkelanjutan. Isu utama di Kepulauan Seribu Adalah Optimalisasi sistem rantai pasok muncul karena adanya disparitas harga barang kebutuhan pokok antara wilayah kepulauan dan daratan Jakarta. Kondisi geografis yang terpisah oleh laut menyebabkan biaya transportasi dan distribusi lebih tinggi, sehingga harga barang di kepulauan cenderung lebih mahal dibandingkan di daratan. Keterbatasan infrastruktur logistik, seperti dermaga, kapal pengangkut, dan gudang penyimpanan, semakin memperburuk ketidakstabilan pasokan.

2.3.9 Telaah Isu berdasarkan UPT

1. UPPKB2T (Unit Pengelola Penilaian Kesesuaian Bahan dan Barang Teknik)

Secara Nasional, perkembangan standar teknis dan transformasi industri menuntut laboratorium pengujian memiliki alat uji mutakhir dan ruang lingkup sertifikasi masih belum semua memenuhi kebutuhan pasar, sehingga mendorong UPPKB2T untuk memperluas ruang lingkup LSPro, termasuk produk pipa dengan SNI terbaru. Pada tingkat regional, implementasi SNI dan penguatan industri dalam negeri harus lebih intensif agar produk Jakarta berdaya saing. Karena itu, isu strategisnya meliputi pemutakhiran alat pengujian yang sering bermasalah, penambahan ruang lingkup LSPro, serta mitigasi dampak pembangunan Mako Satpol PP yang berpotensi mengganggu layanan UPPKB2T.

2. UPPISP (Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi, dan Sertifikasi Produk)

Di level nasional, penguatan sistem *market intelligence* dan perlindungan pasar ekspor menjadi fokus agar produk Indonesia mampu bersaing. Pada regional Jakarta, UPPISP berperan penting dalam menyediakan layanan standarisasi dan pengujian produk yang kredibel. Isu strategisnya antara lain sosialisasi produk ber-SNI, pemutakhiran alat uji laboratorium, pengembangan kompetensi SDM, serta penguatan pelayanan, yang di antaranya penguatan pelayanan Lembaga Pemeriksa Halal untuk memperluas jangkauan pasar.

3. Unit Pengelola Metrologi

Dalam skala Nasional, penguatan digitalisasi layanan menuntut kualitas metrologi yang lebih andal. Secara regional, Jakarta perlu mengoptimalkan jangkauan dan mutu layanan metrologi untuk melindungi konsumen. Isu strategisnya meliputi edukasi metrologi sesuai UU No. 2 Tahun 2024, mempertahankan predikat Daerah



Tertib Ukur, pengembangan sarana dan prasarana (misalnya untuk SPKLU), sistem/aplikasi layanan mandiri, penguatan kompetensi SDM, revisi tarif layanan kalibrasi, serta akreditasi tambahan guna meningkatkan kepercayaan publik.

4. **UPK PPKUKMP Pulogadung (Kawasan Pusat Pengembangan UKM & Permukiman)**

Secara nasional, penguatan sistem *market intelligence* dan perlindungan pasar ekspor menjadi keharusan untuk mendorong daya saing. Di tingkat regional, fungsi kelembagaan UPK Pulogadung perlu dioptimalkan agar dapat mendukung pembinaan UMKM secara terintegrasi. Isu strategisnya antara lain pengamanan aset, pendampingan hukum, perubahan tarif layanan, sinergi pembinaan dengan Sudin Jaktim, peningkatan sarpras kawasan (akses jalan, saluran, renovasi ruang usaha), sistem layanan terpadu, penyesuaian struktur organisasi, serta penajaman tupoksi agar tidak tumpang tindih.

5. **Pusdiklat (Pusat Pendidikan dan Pelatihan)**

Secara global, kebutuhan peningkatan kapasitas pelaku ekonomi terus meningkat seiring transformasi digital dan perubahan pasar kerja. Dalam lingkup Nasional, percepatan transformasi digital UMKM dan *e-commerce* ekspor membutuhkan dukungan pelatihan kewirausahaan yang adaptif. Pada regional Jakarta, Pusdiklat berperan memperkuat sistem pelatihan kewirausahaan, koperasi, Perindustrian dan Perdagangan agar mampu menjawab kebutuhan Jakpreneur dan pelaku usaha. Isu strategisnya mencakup peningkatan interoperabilitas data peserta pelatihan dan anggota Jakpreneur, serta pengembangan sarana dan prasarana pelatihan yang modern.

6. **Pusdatin (Pusat Data dan Informasi)**

Isu global yang terkait tugas dan fungsi Pusdatin Adalah adanya tuntutan integrasi data lintas sektor dan transformasi digital dalam mendukung kebijakan berbasis data. Nasionalnya, penguatan sistem *market intelligence* dan perlindungan pasar ekspor membutuhkan data yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses. Pada regional Jakarta, Pusdatin menjadi kunci dalam integrasi data pelaku ekonomi agar program pembinaan lebih tepat sasaran. Isu strategisnya antara lain interoperabilitas data antar sistem K/L dan antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, peningkatan literasi digital pelaku UMKM,



koordinasi dan komitmen berbagi pakai data antarinstansi, serta penguatan kapasitas SDM dan pendanaan integrasi sistem.

Tabel 2. 7 Telaah Isu Dinamis

URUSAN	ISU DINAMIS		
	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU REGIONAL
Bidang Perindustrian	Perkembangan Teknologi Industri 5.0	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Ekspor Produk Teknologi Tinggi dan Ramah Lingkungan Pendalaman Struktur dan Diversifikasi Produk Ekspor Daerah 	-Investasi dan perizinan di Jakarta semakin menarik dan mudah diakses Pengembangan industri yang ramah lingkungan
Bidang Perdagangan	Geopolitik dan Geoekonomi	Kolaborasi Lintas Sektor untuk Akselerasi Ekspor Nasional	Jakarta sebagai pusat perdagangan di Indonesia
Bidang Koperasi	Geopolitik dan Geoekonomi	Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan	Kualitas tata Kelola Koperasi
Bidang UKM	Geopolitik dan Geoekonomi	Percepatan Transformasi Digital UMKM dan E-Commerce	Pengelolaan UMKM dan Sektor Informal
Bidang Pengawasan	Perkembangan teknologi informasi	Peningkatan Kelembagaan dan Sertifikasi	Optimalisasi sistem pengawasan sektor Perindustrian, perdagangan, dan Koperasi dan UMKM
Sudin PPKUKM JP			Pengembangan Kawasan Tanah Abang dan Kawasan Segitiga Emas sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Jakarta Pusat
Sudin PPKUKM JU			Pengembangan Kawasan pesisir utara bagian timur sebagai sentra industri
Sudin PPKUKM JB			Pengembangan peran strategis sektor perdagangan di Jakarta Barat (20% total luas wilayah



URUSAN	ISU DINAMIS		
	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU REGIONAL
			merupakan lahan perdagangan dan jasa)
Sudin PPKUKM JS			Pengembangan Kawasan Blok-M dan Kawasan segitiga emas sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Jakarta Selatan
Sudin PPKUKM JT			Pengembangan kawasan Jakarta industrial Estate Pulogadung dan Kawasan Pusat industry Kecil Pulogadung sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Jakarta Timur
Sudin PPKUKM KS			Optimalisasi sistem rantai pasok guna menjamin tercapainya harga yang sama antara kepulauan dan daratan
UPT			
UPPKB2T		Standar teknis dan transformasi industri	Implementasi SNI dan penguatan industri dalam negeri
UPPISP		Digitalisasi layanan publik	Layanan standardisasi dan pengujian produk
Up. Metrologi		Digitalisasi layanan publik	Optimalisasi jangkauan dan mutu layanan
UPK PPKUKMP Pulogadung		Penguatan Sistem Market Intelligence dan Perlindungan Pasar Ekspor	Optimalisasi fungsi kelembagaan
Pusdiklat		Percepatan Transformasi Digital UMKM dan E-Commerce	Sistem pelatihan kewirausahaan, koperasi, industri dan perdagangan



URUSAN	ISU DINAMIS		
	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU REGIONAL
Pusdatin		Penguatan Kebutuhan integrasi data lintas sektor dan transformasi digital	Integrasi data pelaku ekonomi

2.3.10 Isu Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung upaya Jakarta menuju kota global, Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta turut andil melalui pelaksanaan 3 bidang yaitu bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. Dalam hal Perindustrian, Perekonomian Jakarta ke depan ditopang oleh kebutuhan untuk **mentransformasi industri lokal menuju ekosistem yang terintegrasi, berbasis potensi unggulan, inovasi, daya saing, dan keberlanjutan**. Dorongan global menuju industrialisasi ramah lingkungan, arah kebijakan nasional terkait hilirisasi dan P3DN, serta dinamika regional dalam keterbatasan ruang industri menuntut Jakarta melakukan akselerasi konversi industri kecil dan menengah menuju industri kreatif, digital, serta berwawasan lingkungan. Sejalan dengan arah transformasi tersebut, Jakarta terus berupaya memperkuat ekosistem Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan meningkatkan kapasitas usaha melalui program inkubasi serta pengembangan rantai pasok yang berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan melalui optimalisasi peran *creative hub* di setiap kota administrasi dan pembangunan kemitraan antara industri besar dengan IKM, sehingga produktivitas dan daya saing pelaku IKM dapat meningkat melalui perluasan akses terhadap bahan baku berkualitas, penerapan teknologi modern, dan jaminan pasar yang lebih luas. Dengan transformasi dan penguatan ini, Jakarta diharapkan tidak hanya menjadi pusat konsumsi, tetapi juga pusat produksi dan inovasi berkelanjutan.

Dalam bidang perdagangan, **fasilitasi perdagangan daerah dalam menjaga stabilitas harga, kemudahan usaha, dan peningkatan akses pasar global** menjadi prioritas strategis. Geopolitik dan geoekonomi global yang memengaruhi rantai pasok, kebijakan nasional yang menekankan stabilisasi bahan pokok dan akselerasi ekspor, serta posisi Jakarta sebagai pusat distribusi regional menjadikan penguatan



logistik, operasi pasar, promosi produk unggulan, serta perluasan akses pasar internasional sebagai langkah krusial.

Koperasi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi rakyat, sehingga **penguatan peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat secara modern** harus terus dilakukan. Arus global menuntut koperasi bertransformasi dalam tata kelola dan digitalisasi, kebijakan nasional menekankan pemerataan ekspor antarwilayah, sementara di level regional Jakarta, koperasi perlu tampil sebagai penghubung antara UMKM dan sektor informal dengan akses modal, pasar, serta manajerial. Dengan demikian, koperasi Jakarta tidak hanya menjadi wadah usaha tradisional, tetapi juga motor pemberdayaan ekonomi yang adaptif.

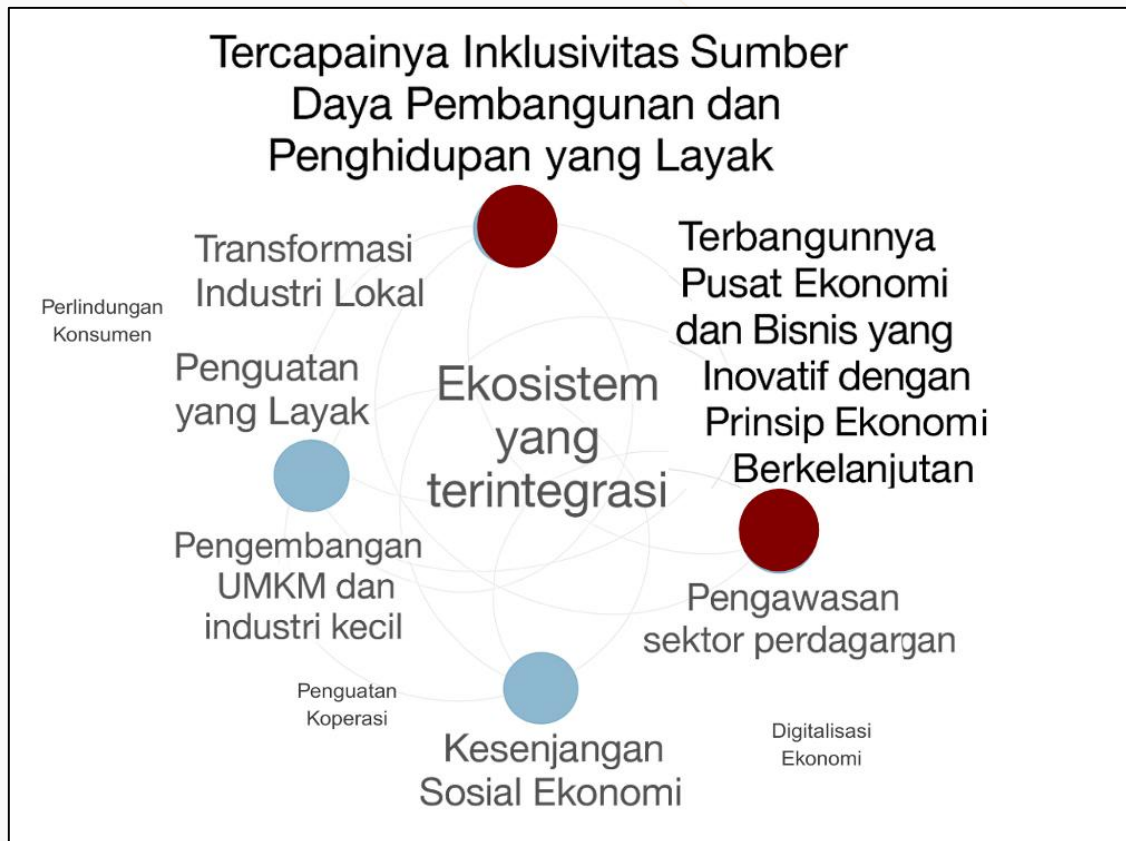
Di sisi lain, pertumbuhan UMKM perlu diarahkan agar lebih inklusif. **Penguatan ekosistem UMKM yang inklusif dan berdaya saing** menjadi jawaban atas tantangan global berupa persaingan digital dan pasar e-commerce, prioritas nasional transformasi digital UMKM, serta kebutuhan regional akan pembinaan, sarana dan prasarana, dan penataan usaha informal. Strategi ini mencakup peningkatan literasi digital, akses pembiayaan, kurasi produk, penyediaan ruang usaha, hingga integrasi program lintas sektor untuk memastikan UMKM Jakarta mampu menjadi pilar pertumbuhan ekonomi yang merata dan inovatif.

Akhirnya, seluruh proses pembangunan ekonomi harus dijaga dengan mekanisme kontrol yang kuat. Oleh karena itu, **penguatan sistem pengawasan terpadu dan berbasis risiko** menjadi elemen vital. Tuntutan global pada standar perlindungan konsumen, kebijakan nasional mengenai peningkatan kelembagaan dan sertifikasi, serta kebutuhan regional akan koordinasi pengawasan di tengah aktivitas perdagangan metropolitan mendorong Jakarta membangun sistem pengawasan yang modern, transparan, dan berbasis risiko. Hal ini akan menjamin kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan menciptakan iklim usaha yang sehat.

Isu strategis Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 diturunkan dari *framework* pembangunan ekonomi yang menekankan terciptanya ekosistem terintegrasi dan inklusif. Dari kerangka tersebut, lima isu strategis utama berhasil diidentifikasi, yaitu: transformasi industri lokal menuju ekosistem berbasis potensi unggulan, inovasi, daya saing, dan keberlanjutan; fasilitasi perdagangan daerah dalam menjaga stabilitas harga, kemudahan usaha, serta peningkatan akses pasar global; penguatan peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat secara modern; penguatan ekosistem UMKM yang inklusif dan berdaya saing; serta



penguatan sistem pengawasan terpadu dan berbasis risiko. Seluruh isu ini saling berkaitan dan membentuk kerangka pembangunan yang berorientasi pada terbangunnya pusat ekonomi dan bisnis yang inovatif dengan prinsip keberlanjutan, tercapainya perlindungan konsumen, sekaligus terwujudnya pemerataan kesejahteraan melalui penguatan sektor industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM.



Gambar 2. 9 Framework Telaahan Isu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Tabel 2. 8 Perumusan Isu Strategis

URUSAN	POTENSI	PERMASALAHAN	ISU KLHS	TELAAH ISU			ISU STRATEGIS
				ISU DINAMIS			
				ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU REGIONAL	
Bidang Perindustrian	Potensi perindustrian DKI Jakarta terletak pada transformasi industri lokal menuju ekosistem yang terintegrasi, berbasis inovasi dan ramah lingkungan, meskipun kontribusi sektor industri terhadap PDRB baru mencapai 11,49%, jauh di bawah Jawa Barat (41,39%) dan Jawa Timur (30,85%).	Belum optimalnya pengembangan industri lokal yang terintegrasi	Ketimpangan sosial-ekonomi	Perkembangan Teknologi Industri 5.0	Penguatan Ekspor Produk Teknologi Tinggi dan Ramah Lingkungan Pendalaman Struktur dan Diversifikasi Produk Ekspor Daerah	Investasi dan perizinan di Jakarta semakin menarik dan mudah diakses Pengembangan industri yang ramah lingkungan semakin diperluas	Transformasi industri lokal menuju ekosistem yang terintegrasi, berbasis potensi unggulan, inovasi, daya saing dan berkelanjutan
Bidang Perdagangan	Perdagangan menjadi motor utama perekonomian dengan kontribusi	Belum optimalnya fasilitasi perdagangan daerah		Geopolitik dan Geoekonomi	Kolaborasi Lintas Sektor untuk Akselerasi	Jakarta sebagai pusat perdagangan di Indonesia	Fasilitasi perdagangan daerah dalam menjaga stabilitas harga, kemudahan



URUSAN	POTENSI	PERMASALAHAN	ISU KLHS	TELAAH ISU			ISU STRATEGIS
				ISU DINAMIS			
				ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU REGIONAL	
	mencapai 18,01% terhadap PDRB, kedua tertinggi setelah Jawa Timur (18,81%), serta pertumbuhan mencapai 6,87% yang melampaui provinsi lain.				Ekspor Nasional		usaha, dan peningkatan akses pasar global
Bidang Koperasi	Koperasi di Jakarta memiliki potensi strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui modernisasi kelembagaan dan integrasi ekosistem pembiayaa	Belum optimalnya peran koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat		Geopolitik dan Geoekonomi	Kelembagaan Ekonomi Kerakyatan	Kualitas tata Kelola Koperasi	Penguatan peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat secara modern
Bidang UKM	Potensi UMKM Jakarta ditunjang oleh percepatan transformasi digital dan e-	Belum optimalnya transformasi dan daya saing UMKM		Geopolitik dan Geoekonomi	Percepatan Transformasi Digital UMKM dan E-	Pengelolaan UMKM dan Sektor Informal	Penguatan ekosistem UMKM yang inklusif dan berdaya saing



URUSAN	POTENSI	PERMASALAHAN	ISU KLHS	TELAAH ISU			ISU STRATEGIS
				ISU DINAMIS			
				ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU REGIONAL	
	commerce ekspor, dengan jumlah pelaku usaha yang terus tumbuh, meski realisasi peningkatan kapasitas pelaku UMKM masih di bawah target, yakni sekitar 50% dari sasaran 70%.				Commerce Ekspor		
Bidang Pengawasan	Bidang pengawasan memiliki potensi besar untuk menjamin kepastian usaha dan perlindungan konsumen melalui penguatan sistem berbasis risiko, didukung status Jakarta sebagai Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib	Belum optimalnya sistem pengawasan lintas sektor		Perkembangan teknologi informasi	Peningkatan Kelembagaan dan Sertifikasi	Optimalisasi sistem pengawasan sektor Perindustrian, perdagangan, dan Koperasi dan UMKM	Penguatan sistem pengawasan terpadu dan berbasis risiko



URUSAN	POTENSI	PERMASALAHAN	ISU KLHS	TELAAH ISU			ISU STRATEGIS
				ISU DINAMIS			
				ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU REGIONAL	
	Ukur, meskipun masih menghadapi tantangan optimalisasi sarana kemetrollogian.						



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (2), yang mengamanatkan bahwa visi dan misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Provinsi DKI Jakarta harus berpedoman pada visi dan misi Gubernur DKI Jakarta, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu pada visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029, sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah periode tahun 2025–2029 bertujuan untuk menerjemahkan visi dan misi RPJMD ke dalam arah kebijakan serta langkah-langkah strategis pembangunan ekonomi daerah yang lebih operasional dan terukur. Renstra ini mencakup perumusan tujuan, sasaran, program, serta kegiatan pembangunan yang difokuskan pada penguatan daya saing industri, peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah, pengembangan koperasi yang sehat dan modern, serta perluasan akses pasar perdagangan dalam maupun luar negeri. Seluruh proses perencanaan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap intervensi kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan merata, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi DKI Jakarta secara menyeluruh. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2025 – 2029 adalah:

JAKARTA KOTA GLOBAL DAN PUSAT PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN, DAN MENYEJAHTERAKAN SELURUH WARGANYA

Misi disusun dalam rangka merencanakan langkah-langkah yang akan diimplementasikan dalam mewujudkan visi yang telah dideskripsikan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan Upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan menjadi alat navigasi arah kebijakan yang mempengaruhi rekomendasi kerja berupa program prioritas dalam proses pencapaian kinerja yaitu tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu,



untuk mewujudkan visi Jakarta pada tahun 2030, lima misi pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera
2. Mewujudkan Pusat Ekonomi Inovatif dengan Pembangunan dan Akses Sumber Daya yang Merata
3. Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal
4. Mewujudkan Ruang Kota Layak Huni, Berketahanan, dan Berkelanjutan
5. Mewujudkan Konektivitas dan Sinergi Kegiatan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Dari perumusan visi dan misi tersebut di dalam dokumen RPJMD sudah diejawantahkan dalam tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan indikator sebagai ukuran kebeehasilan. Berikut Adalah gambar hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah dalam dokumen RPJMD DKI Jakarta Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.



RPJMD
DKI
JAKARTA
2025-2029

RENSTRA
DINAS
PPKUKM
2025-2029



Gambar 3. 1 Kerangka Logis Urusan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Pada gambar di atas, urusan industri dan perdagangan mendukung ekonomi makro daerah melalui sasaran tumbuhnya sektor usaha produktif, kompetitif dan bernilai tambah tinggi dengan indikator Total PDRB. Sedangkan urusan Koperasi dan UMKM mendukung sasaran meningkatnya kesempatan kerja layak dan relisiensi tenaga kerja. Harapannya sektor koperasi dan UMKM dapat menyerap tenaga kerja mandiri sehingga langsung membuka lebih banyak kesempatan kerja.

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dirumuskan dengan mengacu pada visi dan misi dalam dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029, yang mencerminkan kontribusi strategis sektor industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan inklusivitas sumber daya pembangunan. Tujuan dan sasaran ini merupakan bentuk operasionalisasi kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang akan diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahun ke depan.

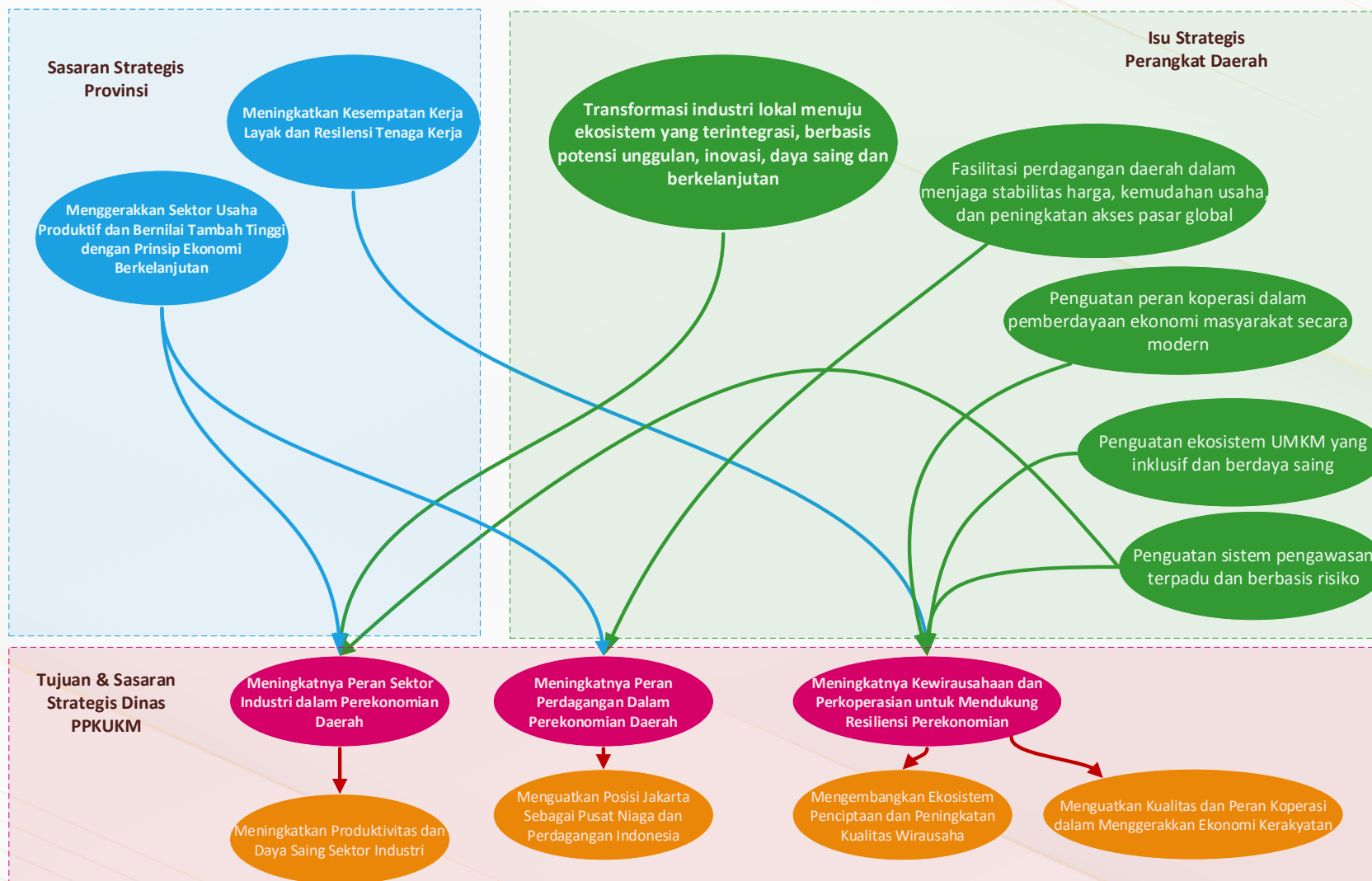
Urusan Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM memiliki ranahnya tersendiri meskipun berada di kapal yang sama dalam meningkatkan perekonomian DKI Jakarta. Kinerja urusan perindustrian di DKI Jakarta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah melalui pengembangan industri kreatif, manufaktur, dan inovasi berbasis teknologi. Dengan posisi Jakarta sebagai pusat bisnis nasional, penguatan kualitas dan kapasitas sumber daya industri serta pengembangan ekosistem industri digital mendorong penciptaan nilai tambah produk lokal berorientasi ekspor. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan memperkuat basis produksi yang menjadi fondasi ketahanan ekonomi daerah.

Urusan perdagangan memainkan peran strategis sebagai tulang punggung distribusi barang dan jasa, baik untuk kebutuhan masyarakat Jakarta maupun sebagai simpul utama perdagangan nasional dan global. Penguatan logistik perkotaan dan pemasaran produk lokal berbasis ekspor memungkinkan peningkatan stabilitas harga, kelancaran arus barang, dan peningkatan efisiensi rantai pasok. Dengan jaringan perdagangan yang kuat, Jakarta mampu menjaga kestabilan perekonomian sekaligus mendukung peranannya sebagai hub perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara.



Sementara itu, koperasi dan UMKM menjadi motor utama inklusi ekonomi di Jakarta, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus menciptakan peluang usaha baru di berbagai sektor. Penguatan akses pembiayaan, digitalisasi, dan kemitraan koperasi-UMKM dengan industri besar maupun platform perdagangan daring mendorong UMKM naik kelas serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, kinerja urusan ini tidak hanya menopang pertumbuhan ekonomi Jakarta, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan melalui penciptaan lapangan kerja layak, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan ekonomi lokal.

Gambaran *Logical Framework* kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menggambarkan korelasi antara Sasaran Strategis RPJMD Provinsi DKI Jakarta dan Isu-Isu Strategis sebagaimana yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya, adalah sebagai berikut:

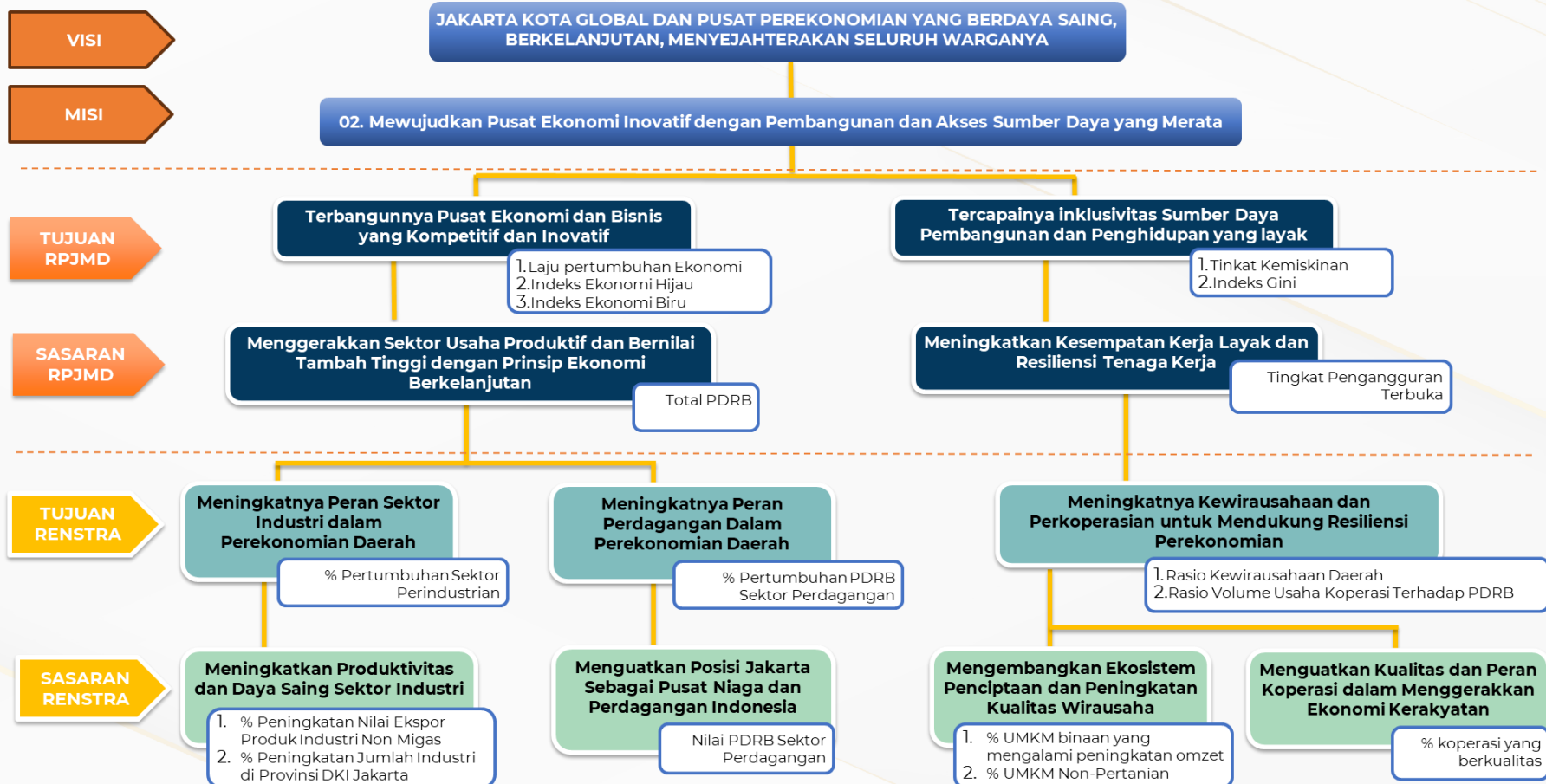


Gambar 3. 2 Logical Framework Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Logical Framework di atas menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat berkontribusi dalam perekonomian daerah. Urusan Perindustrian, Urusan Perdagangan, dan Urusan Koperasi UKM saling terkait secara erat dalam membangun perekonomian daerah. Industri menghasilkan produk bernilai tambah yang membutuhkan pasar, sementara perdagangan menyediakan jaringan distribusi dan akses pasar bagi produk industri maupun UMKM. Di sisi lain, koperasi dan UMKM menjadi basis ekonomi rakyat yang memperkuat rantai produksi dan konsumsi, sekaligus menyerap tenaga kerja. Dengan keterpaduan ketiganya, terbentuk ekosistem ekonomi yang berkelanjutan: industri tumbuh, perdagangan lancar, dan UMKM serta koperasi naik kelas, sehingga daya saing dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Dalam peningkatan keempat sektor urusan baik Koperasi, UKM, Industri dan perdagangan membutuhkan unsur pengawasan. Fungsi unsur pengawasan dalam lingkup perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan tata kelola sektor berjalan sesuai aturan, transparan, dan berdaya saing.

Setelah melihat *Logical Framework* kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dirumuskan gambaran tujuan ke dalam sasaran yang lebih spesifik sekaligus penyelarannya dengan tujuan dan sasaran RPJMD DKI Jakarta Tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 3. 3 Rumusan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Gambar di atas memperlihatkan bahwa tujuan (akhir) yang ingin dicapai dari penyelenggaraan layanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta sebagai wujud nyata pelaksanaan amanat tugas dan fungsi bidang urusan Perindustrian, perdagangan dan koperasi dan UMK. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Adalah:

1. **Tujuan 1:** Meningkatnya Kewirausahaan dan Perkoperasian untuk Mendukung Resiliensi Perekonomian, dengan indikatornya rasio kewirausahaan Daerah dan Rasio volume usaha terhadap PDRB.
 - **Sasaran:** Mengembangkan ekosistem penciptaan dan peningkatan kualitas wirausaha dengan indiktaor Persentase UMKM binaan yang mengalami peningkatan omset dan persentase UMKM non pertanian
 - **Sasaran:** Memperkuat kualitas dan peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan indikator Persentase koperasi yang berkualitas
2. **Tujuan 2:** Meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian daerah, dengan indikatornya Persentase pertumbuhan sektor Perindustrian
 - **Sasaran:** Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor industri, dengan indikatornya peningkatan nilai ekspor produk industri non migas dan peningkatan jumlah industri di Provinsi DKI Jakarta
3. **Tujuan 3:** Meningkatnya Peran perdagangan dalam Perekonomian Daerah dengan indikatornya Persentase pertumbuhan sektor Perdagangan
 - **Sasaran:** Memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat niaga dan perdagangan Indonesia dengan indikator nilai PDRB sektor perdagangan

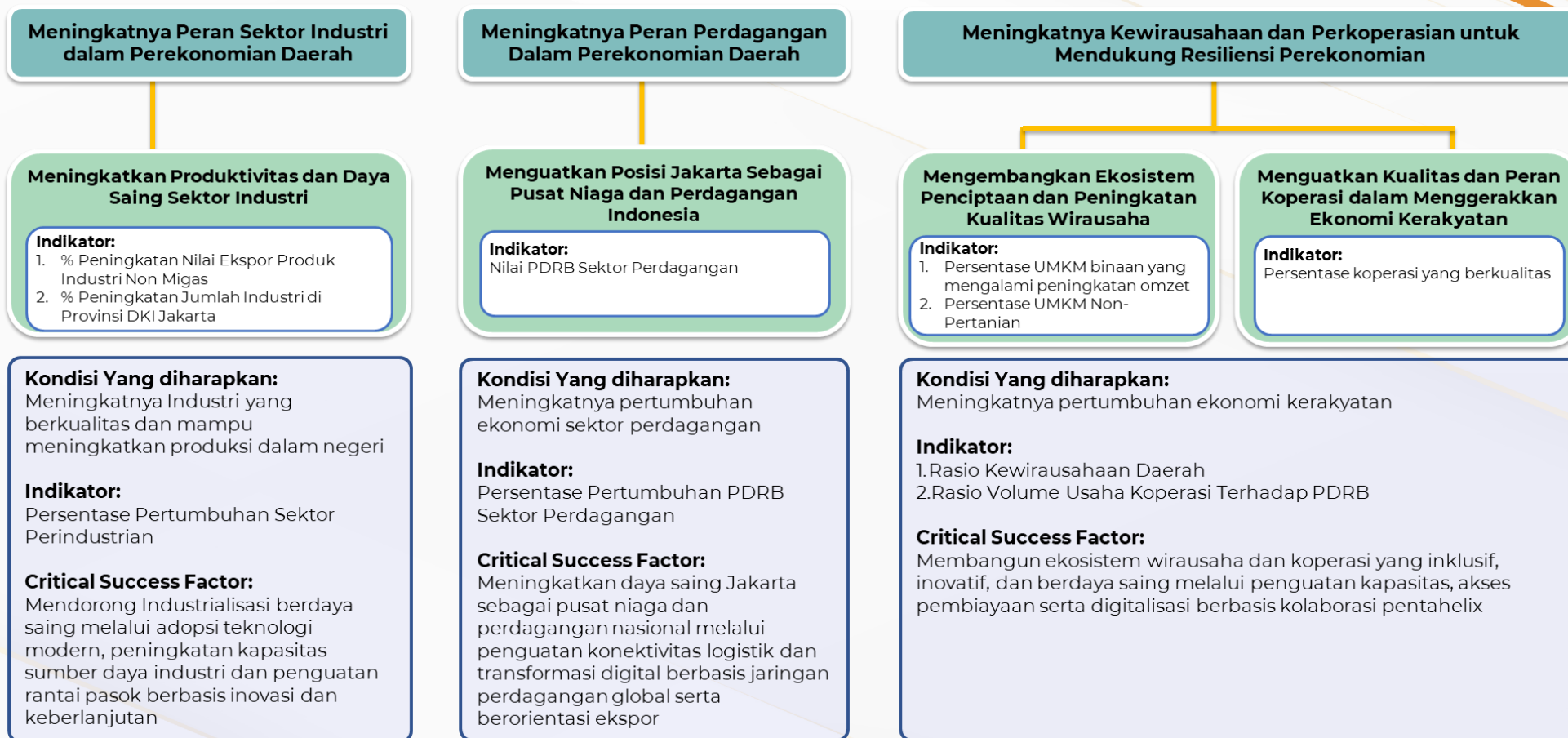
Rumusan tujuan dan sasaran yang terukur serta indikator kinerja yang relevan, setiap unit kerja dalam lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta diharapkan mampu bergerak secara terpadu untuk menyelenggarakan program dan kegiatan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta diharapkan menjadi motor penggerak penguatan ekonomi daerah melalui langkah yang terpadu dan berkesinambungan. Dalam mendukung tumbuhnya kewirausahaan, dinas perlu memperluas akses pembiayaan, memberikan pendampingan manajemen usaha,



serta memfasilitasi pelatihan keterampilan berbasis digital agar lahir wirausaha baru yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Pada saat yang sama, penguatan peran koperasi diwujudkan melalui pembinaan kelembagaan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta digitalisasi tata kelola agar koperasi mampu menjadi wadah ekonomi rakyat yang sehat dan mandiri. Di sisi perindustrian, upaya peningkatan produktivitas dan daya saing dilakukan dengan membangun sentra-sentra industri kecil dan menengah, mengembangkan inovasi produk, serta mendorong penerapan teknologi yang merata di seluruh wilayah kota.

Untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat niaga dan perdagangan Indonesia, dinas berperan dalam pengawasan barang beredar, dan fasilitasi promosi perdagangan domestik maupun internasional. Dengan sinergi dari ketiga aspek utama tersebut—industri, perdagangan, serta koperasi dan UMKM—Jakarta dapat semakin kokoh sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus pusat perdagangan global yang berdaya saing tinggi.



Gambar 3. 4 Kerangka Pohon Kinerja Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA				
						2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan Kesempatan Kerja Layak dan Resiliensi Tenaga Kerja	Meningkatnya Kewirausahaan Dan Perkoperasian Untuk Mendukung Resiliensi Perekonomian		Persentase Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,56	3,58	3,6	3,61	3,65	3,66
			Persentase Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	0,04	0,041	0,042	0,043	0,044	0,045
		Mengembangkan Ekosistem Penciptaan dan Peningkatan Kualitas Wirausaha	Persentase UMKM binaan yang mengalami peningkatan omzet	Persen	2,24	2,28	2,33	2,37	2,41	2,46
			Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Non-pertanian	Persen	30,38	30,4	30,45	30,5	30,55	30,6
		Menguatkan Kualitas Dan Peran Koperasi Dalam Menggerakkan	Persentase koperasi yang berkualitas	Persen	21,90	22,38	22,87	23,36	23,84	24,33



SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA				
						2026	2027	2028	2029	2030
		Ekonomi Kerakyatan								
Tumbuhnya Sektor Usaha Produktif, Kompetitif, dan Bernilai Tambah Tinggi	Meningkatnya Peran Sektor Industri Dalam Perekonomian Daerah		Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Persen	1,14	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35
		Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Sektor Industri	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Produk Industri Non Migas	Persen	21,97	20	20	20	20	20
			Persentase peningkatan jumlah industri di Provinsi DKI Jakarta	Persen	53,08	10	10	10	10	10
	Meningkatnya Peran Perdagangan Dalam Perekonomian Daerah		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	6,87	6	6,1	6,2	6,3	6,4



SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA				
						2026	2027	2028	2029	2030
		Menguatkan Posisi Jakarta Sebagai Pusat Niaga dan Perdagangan Indonesia	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Miliar Rupiah	343.770	364,396	364,740	365,084	365,428	365,771



Untuk mengevaluasi ketercapaian atas tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan indikator-indikator yang akan digunakan yang definisi operasional dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut.

Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Definisi:

Persentase realisasi laju pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan (C to C ADHK).

Metode pengukuran:

$$((\text{PDRB Sektor Perdagangan tahun } n - \text{PDRB Sektor Perdagangan tahun } n-1) / \text{PDRB Sektor Perdagangan tahun } n-1) \times 100\%$$

Metadata:

BPS

Nilai PDRB Sektor Perdagangan

Definisi:

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Sektor Perdagangan tahun berjalan.

Metode pengukuran:

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Sektor Perdagangan tahun berjalan dalam Miliyar Rupiah

Metadata:

BPS

Rasio Kewirausahaan Daerah

Definisi:

Rasio Kewirausahaan adalah perbandingan populasi Wirausaha terhadap populasi angkatan kerja Indonesia. Populasi Wirausaha adalah populasi Wirausaha Pemula ditambah populasi Wirausaha Mapan.

Metode pengukuran:

$$(\text{Populasi Wirausaha Pemula} + \text{Populasi Wirausaha Mapan}) / \text{Populasi Angkatan Kerja DKI Jakarta}$$

Metadata:

Sakernas, BPS



Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Definisi:

Rasio ini mengukur seberapa besar volume usaha koperasi berbanding dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Volume Usaha Koperasi : Total nilai usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh koperasi. Ini mencakup seluruh pendapatan yang dihasilkan koperasi dari berbagai jenis usaha yang dijalankan oleh koperasi tersebut

PDRB : Total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor ekonomi dalam suatu wilayah tertentu (seperti provinsi atau kabupaten) dalam periode tertentu.

Metode pengukuran:

$(\text{Volume Usaha Koperasi} / \text{PDRB}) \times 100\%$

Metadata:

Online Data Sistem (ODS) Kemenkop
BPS

Persentase UMKM binaan yang mengalami peningkatan omzet

Definisi:

UMKM binaan yang mengalami peningkatan omzet dihitung dari omzet tahun x - tahun $(x-1)$.

Metode pengukuran:

Jumlah UMKM binaan yang mengalami peningkatan omzet di tahun x / Jumlah Total UMKM binaan yang memiliki usaha di tahun $x-1 \times 100\%$

Peningkatan omzet dihitung dari omzet tahun x - tahun $(x-1)$

Metadata:

website jakpreneur.jakarta.go.id

Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Non-pertanian

Definisi:

Jumlah persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Non- pertanian (Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, Pengangkutan dan pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Real Estat, Jasa Perusahaan, Pendidikan dan Jasa Lainnya) dibandingkan dengan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah binaan.

Metode pengukuran:



$$\left(\frac{\text{Jumlah UMKM binaan non-pertanian yang memiliki usaha tahun } x}{\text{Total UMKM binaan yang memiliki usaha tahun } x} \right) \times 100\%$$

Metadata:

website jakpreneur.jakarta.go.id

Persentase koperasi yang berkualitas

Definisi:

Persentase Koperasi yang meningkat kualitasnya yang diantaranya berdasarkan : 1. Bersertifikat NIK 2. Melaksanakan RAT 3. Peningkatan volume usaha dan/atau aset. Dasar Hukum: Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Metode pengukuran:

$$\left(\frac{\text{Jumlah koperasi yang berkualitas/Koperasi yang memiliki sertifikat NIK tahun } x-1}{\text{Jumlah koperasi yang memiliki sertifikat NIK tahun } x-1} \right) \times 100\%$$

Metadata:

ODS KemenKopUKM dan Data Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta.

Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian

Definisi:

Persentase realisasi laju pertumbuhan PDRB sektor industri. (C to C ADHK).

Metode pengukuran:

$$\left(\frac{\text{PDRB Sektor Industri tahun } n - \text{PDRB Sektor Industri tahun } n-1}{\text{PDRB Sektor Industri tahun } n-1} \right) \times 100\%$$

Metadata:

BPS Provinsi DKI Jakarta.

Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Produk Industri Non Migas

Definisi:

Persentase peningkatan nilai ekspor produk industri non migas dibandingkan tahun sebelumnya.

Metode pengukuran:

$$\left(\frac{\text{Nilai ekspor produk industri non migas tahun } (n) - \text{Nilai ekspor produk industri non migas tahun } (n-1)}{\text{Nilai ekspor produk industri non migas tahun } (n-1)} \right) \times 100\%$$

Metadata:

BPS DKI Jakarta, SIINas.



Persentase peningkatan jumlah industri di Provinsi DKI Jakarta

Definisi:

Persentase peningkatan jumlah Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar yang beroperasi dan terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional Menghitung pertambahan jumlah Industri (Kecil, Menengah, dan Besar) dibandingkan dengan jumlah industri pada tahun sebelumnya.

Metode pengukuran:

$$\frac{(\text{Jumlah Industri tahun } (n) - \text{Jumlah Industri tahun } (n-1))}{\text{Jumlah Industri tahun } (n-1)} \times 100\%$$

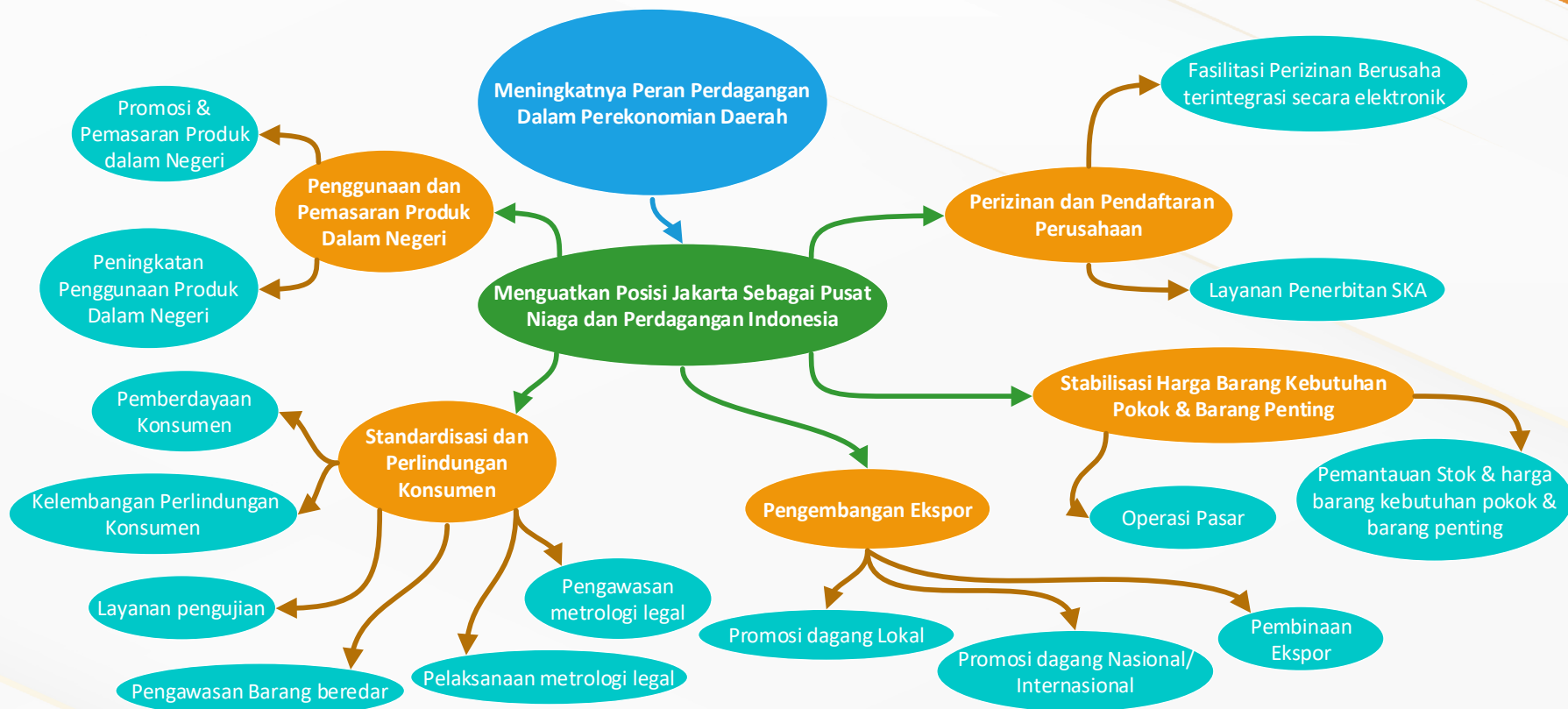
Metadata:

BPS DKI Jakarta, SIINas.

Atas dasar *logical framework* strategis Perangkat Daerah yang dirumuskan ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah, maka perlu disusun *logical framework* masing-masing urusan yang mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah. *Logical Framework* masing-masing urusan tersebut digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. *Logical Framework* masing-masing urusan berbasis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900,1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. *Logical Framework* masing-masing urusan sebagai tersaji dalam grafik-grafik berikut.



Gambar 3. 5 Logical Framework Urusan Perindustrian



Gambar 3. 6 Logical Framework Urusan Perdagangan



Gambar 3. 7 Logical Framework Suburusan Usaha Kecil dan Menengah



Gambar 3. 8 Logical Framework Suburutan Koperasi

3.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, serta mendukung pencapaian RPJMD secara efektif dan efisien. Pendekatan strategis yang menyeluruh diperlukan agar dinas mampu mengoptimalkan kinerjanya dalam memperkuat sektor industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM. Perencanaan ini mencakup pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ekonomi daerah, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta penyediaan layanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika perekonomian.

3.2.1 Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta memerlukan strategi yang tepat dan responsif terhadap tantangan pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah daerah. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif, berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan, termasuk di dalamnya optimalisasi sumber daya, penetapan tahapan dan fokus, serta penyesuaian terhadap lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi pembangunan disusun berdasarkan critical success factor dari kondisi yang diharapkan di tahun akhir pelaksanaan Renstra dari masing-masing tujuan dan sasaran pembangunan. Proses ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi kebijakan lintas sektor dan bidang urusan mana yang memiliki kontribusi terhadap pencapaian kondisi akhir yang diinginkan. Hasil analisis tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2 Perumusan Critical Success Factor

Tujuan/ Sasaran Renstra	Critical Success Factor		Bidang Utama	Bidang Pendukung
	Kondisi yang diharapkan di akhir Renstra	Strategi		
Meningkatnya Kewirausahaan Dan Perkoperasian Untuk Mendukung Resiliensi Perekonomian				
Mengembangkan Ekosistem Penciptaan Dan Peningkatan Kualitas Wirausaha	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi kerrakyatan	Membangun ekosistem wirausaha dan koperasi yang inklusif, inovatif, dan	<ul style="list-style-type: none">• Bidang Koperasi• Bidang UKM	<ul style="list-style-type: none">• Sudin JP• Sudin JU• Sudin JB



Tujuan/ Sasaran Renstra	Critical Success Factor		Bidang Utama	Bidang Pendukung
	Kondisi yang diharapkan di akhir Renstra	Strategi		
Menguatkan Kualitas Dan Peran Koperasi Dalam Menggerakkan Ekonomi Kerakyatan		berdaya saing melalui penguatan kapasitas, akses pembiayaan, serta digitalisasi berbasis kolaborasi pentahelix	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Sudin JS Sudin JT Sudin KS UPK PPKUKMP Pusdatin Pusdiklat
Meningkatnya Peran Sektor Industri Dalam Perekonomian Daerah				
Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Sektor Industri	meningkatnya industri yang berkualitas dan mampu meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri	Mendorong industrialisasi berdaya saing melalui adopsi teknologi modern, peningkatan kapasitas sumber daya industri, dan penguatan rantai pasok berbasis inovasi dan keberlanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Perindustrian Bidang Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Sudin JP Sudin JU Sudin JB Sudin JS Sudin JT Sudin KS UPK PPKUKMP Pusdatin Pusdiklat
Meningkatnya Peran Perdagangan Dalam Perekonomian Daerah				
Menguatkan Posisi Jakarta Sebagai Pusat Niaga dan Perdagangan Indonesia	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi sektor Perdagangan	Meningkatkan daya saing Jakarta sebagai pusat niaga dan perdagangan nasional melalui penguatan konektivitas logistik dan transformasi digital berbasis jaringan perdagangan global serta berorientasi ekspor	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Perdagangan Bidang Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Sudin JP Sudin JU Sudin JB Sudin JS Sudin JT Sudin KS Pusdatin Pusdiklat Metrologi UPPISP UPPKB2T

Strategi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam kebijakan operasional yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Seluruh strategi dan kebijakan ini disusun secara sistematis dalam tahapan implementasi tahunan sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan lima tahunan yang terarah dan berkelanjutan. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 3 Tahapan Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029

Strategi PD	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
	2026	2027	2028	2029	2030
Membangun ekosistem wirausaha dan koperasi yang inklusif, inovatif,					



Strategi PD	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
	2026	2027	2028	2029	2030
dan berdaya saing melalui penguatan kapasitas, akses pembiayaan, serta digitalisasi berbasis kolaborasi pentahelix					
Meningkatkan daya saing Jakarta sebagai pusat niaga dan perdagangan nasional melalui penguatan konektivitas logistik dan transformasi digital berbasis jaringan perdagangan global serta berorientasi ekspor					
Mendorong industrialisasi berdaya saing melalui adopsi teknologi modern, peningkatan kapasitas sumber daya industri, dan penguatan rantai pasok berbasis inovasi dan keberlanjutan					

3.2.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan merupakan rangkaian kerja yang menjadi operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, serta selaras dengan arah kebijakan RPJMD dan strategi pembangunan daerah dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah. Arah kebijakan ini memberikan panduan umum bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah agar pelaksanaan program dan kegiatan lima tahunan dapat berjalan secara terstruktur, adaptif, dan terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan lokal yang dihadapi.

Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah yang selaras dengan Arah Kebijakan Pemerintah Daerah

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
-	Sistem perlindungan sosial tepat sasaran, Pengentasan kemiskinan berbasis wilayah, Inklusivitas ekonomi, Kemudahan investasi dan	1. Memperkuat Fungsi koperasi dan Koperasi Kelurahan Merah Putih dalam tata kelola, kelembagaan, transparansi keuangan, dan manajemen koperasi berbasis digital



Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
	membuka usaha, Tenaga kerja berdaya saing	<ol style="list-style-type: none">2. Pendampingan dan mentoring pelaku usaha di sektor Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM, serta bagi Pengurus dan Anggota Koperasi3. Pelatihan teknis dan manajerial pelaku usaha secara inklusif di sektor Industri, Perdagangan dan UMKM serta Pengurus dan Anggota Koperasi melalui Peningkatan pemahaman dan pengetahuan proses produksi, pemasaran, Sumber Daya Manusia, bahan baku, sisa hasil produksi, desain dan teknologi4. Mendorong peningkatan sertifikasi produk halal5. Optimalisasi perizinan, non-perizinan, pemenuhan legalitas, sertifikasi dan standardisasi produk dan unit usaha di sektor Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM, serta perkoperasian6. Pemenuhan sarana dan prasarana yang inklusif untuk mendukung aktivitas pelaku usaha industri, Perdagangan, UMKM dan koperasi7. Pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting8. Pemantauan dan pelaporan stok dan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting melalui pemanfaatan teknologi informasi9. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dan ekspor10. Penegakan kewajiban tera/tera ulang alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)



Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
		<ol style="list-style-type: none"> 11. Meningkatkan promosi dan pemasaran melalui penyelenggaraan dan partisipasi pameran bagi produk unggulan daerah, <i>business matching</i>, dan kampanye digital marketing yang melibatkan pelaku UMKM, koperasi, dan industri lokal 12. Fasilitasi digitalisasi proses produksi melalui penerapan <i>Industry 4.0</i> secara otomatisasi, IoT, AI atau big data. 13. Mendorong kemitraan antar pelaku usaha industri, perdagangan, UMKM dan koperasi dalam rantai nilai dengan turut meningkatkan peran unit pelaksana teknis di Dinas PPKUKM. 14. Peningkatan pemahaman industri berwawasan lingkungan 15. Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian sektor industri 16. Peningkatan pengawasan barang beredar, jasa, dan tertib niaga 17. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan koperasi 18. Mendorong Peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri 19. Perlindungan konsumen melalui pemberdayaan konsumen peningkatan literasi konsumen, perlindungan hak-hak konsumen, serta mendorong partisipasi aktif dalam memilih produk berkualitas

3.2.3 Kebijakan Perangkat Daerah di Tingkat UPT

UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dinas Perindustrian, Perdagangan,



Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta mempunyai UPT yang membantu beberapa urusan di bidang Perindustrian, Perdagangan maupun Koperasi dan UKM. Arah Kebijakan Perangkat Daerah di Tingkat UPT adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 5 Arah Kebijakan Perangkat Daerah di Tingkat UPT

UNIT KERJA	ARAH KEBIJAKAN DINAS
UPPKB2T	<ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi layanan pengujian dan perluasan jangkauan pelayanan2. Peningkatan ruang lingkup pengujian melalui peningkatan sarana, SDM serta fasilitas pendukung3. Peningkatan penyelenggaraan sertifikasi dan pengendalian mutu produk industri bahan dan barang teknik
UPPISP	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan sarana fasilitas pengujian laboratorium terkait standardisasi SNI2. Pengembangan ruang lingkup pengujian dan sertifikasi produk/ jasa melalui peningkatan sarana, SDM serta fasilitas pendukung3. Peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap penerapan standard sebagai pondasi jaminan kualitas produk
UP Metrologi	<ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi pelaksanaan edukasi metrologi terhadap Kewajiban Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP)2. Peningkatan sarana dan prasarana kemetreologian berbasis digital3. Peningkatan layanan pada laboratorium kalibrasi melalui penguatan fasilitas pendukung4. Metrologi legal
UPK PPKUKMP Pulogadung	<ol style="list-style-type: none">1. pengembangan sarana dan prasarana di Kawasan UPK PPUKMP Pulogadung2. Optimalisasi pelayanan sewa fasilitas usaha di kawasan UPK PPUKMP Pulogadung
Pusdiklat	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan Sinergi dan Integrasi pelatihan bagi pelaku ekonomi, terutama anggota jakpreunuer2. Peningkatan Sertifikasi personil koperasi
Pusdatin	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan literasi digital melalui peningkatan akses dan integrasi sistem data antar instansi



3.2.4 Kebijakan Perangkat Daerah di Tingkat Kewilayahan

Kebijakan kewilayahan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi DKI Jakarta merupakan instrumen strategis yang dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan ekonomi di setiap wilayah kota administrasi dan kabupaten kepulauan. Kebijakan kewilayahan berlaku secara umum dan inklusif di seluruh Suku Dinas PPKUKM pada 6 Wilayah Kota/kabupaten yang menyesuaikan dengan Tugas dan Fungsi utama Dinas PPKUKM, dengan rincian, yaitu:

1. Peningkatan sektor perdagangan, di antaranya melalui perluasan akses pasar, baik secara daring dan luring serta secara digital; perluasan akses pembiayaan digital, optimalisasi sistem distribusi dan rantai pasok; penguatan perdagangan, promosi dan pemasaran berbasis potensi lokal dan berorientasi ekspor
2. Peningkatan dan pengembangan tata kelola koperasi dan Koperasi Kelurahan Merah Putih, di antaranya melalui Pembinaan, Pemberdayaan dan pendampingan Koperasi dan Koperasi Kelurahan Merah Putih pada aspek kelembagaan dan manajerial; revitalisasi dan modernisasi Koperasi; penguatan akses permodalan dan akses pembiayaan koperasi dan Koperasi dan Koperasi Kelurahan Merah Putih; peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan Koperasi Kelurahan Merah Putih; peningkatan fungsi koordinasi unit usaha koperasi dan Koperasi Kelurahan Merah Putih, baik dengan distributor, swasta dan BUMD; dan peningkatan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan koperasi dan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
3. Peningkatan sektor UMKM, di antaranya melalui peningkatan daya saing, inovasi dan diversifikasi produk UMKM; optimalisasi pendampingan dan inkubasi usaha; Peningkatan Kapasitas, Literasi dan kemampuan manajerial Pelaku UMKM; peningkatan integrasi pemberdayaan dan kemitraan UMKM dengan PD/UKPD terkait, swasta dan BUMD serta kolaborasi dan jejaring usaha Masyarakat; *Business matching* terutama ditujukan agar produk UMKM yang memiliki sertifikat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dapat memenuhi kebutuhan pengadaan pemerintah daerah; pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran produk UMKM; optimalisasi perizinan dan pemenuhan legalitas, sertifikasi dan standardisasi produk UMKM, yang di antaranya berupa NIB, izin edar, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sertifikasi halal; Fasilitasi akses pasar terutama di retail modern terkait produk-produk UMKM, Peningkatan dan penataan sarana dan prasarana pendukung bagi pelaku UMKM, baik dari sisi lokasi produksi, perlengkapan dan peralatan serta lokasi pemasaran.



4. Peningkatan sektor Perindustrian, di antaranya melalui peningkatan P3DN (Penggunaan Produk Dalam Negeri) sebagai bagian dari upaya hilirisasi industri dan meninggikan nilai tambah dalam negeri, penguatan regulasi kawasan industri termasuk aspek perizinan; pemberdayaan pengelolaan sisa hasil industri secara efisien dan berwawasan lingkungan; integrasi digital dan teknologi tinggi, terutama dalam pemasaran produk Industri; peningkatan daya saing, inovasi dan diversifikasi produk Industri; peningkatan integrasi pemberdayaan dan kemitraan Industri dengan PD/UKPD terkait, swasta dan BUMD serta kolaborasi dan jejaring usaha Masyarakat; optimalisasi perizinan dan pemenuhan legalitas, serta sertifikasi dan standardisasi produk, proses produksi dan sumber daya industri; Optimalisasi pendampingan, peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya industri, termasuk pemenuhan sarana dan prasarana industri, baik dari sisi tempat produksi, perlengkapan dan peralatan.

Selain pemetaan kebijakan, Bappeda sudah Menyusun *roadmap* kebijakan menuju Kota Global. Dinas PPKUKM DKI Jakarta yang menangani tiga urusan yaitu urusan Perindustrian, Urusan perdagangan dan Urusan Koperasi UKM ikut andil dalam mensukseskan Jakarta Sebagai Kota Global. Pemetaan Kebijakan antara lain:

Tabel 3. 6 Pemetaan Program Jakarta Sebagai Kota Global

Elemen Kerangka Kerja	Program Utama	Inisiatif		Arah Kebijakan yang Terkait Dalam Renstra DPPKUKM
1a	1a.1 Membangun pusat industri maju yang berkembang di Jakarta	1a.1.1	Membangun pusat manufaktur hijau dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengintegrasikan inovasi terkini, fasilitas R&D, serta akademi keterampilan yang dikembangkan melalui kerja sama dengan lembaga akademis, dan didukung oleh insentif strategis seperti pembebasan pajak, potongan harga ekspor, dan pemrosesan bea cukai yang efisien.	Penerapan industri berwawasan lingkungan melalui penerapan daur ulang limbah dan efisiensi energi



Elemen Kerangka Kerja	Program Utama	Inisiatif		Arah Kebijakan yang Terkait Dalam Renstra DPPKUKM
		1a.1.2	Menarik perusahaan domestik dan internasional untuk mendorong AI, cloud, dan teknologi digital, dengan opsi pembiayaan termasuk KPBU dan insentif lain seperti hibah bebas pajak	Fasilitasi digitalisasi proses produksi melalui penerapan Industry 4.0 (otomasi, IoT, AI, big data).
		1a.1.3	Merelokasi industri tradisional dan industri dengan emisi tinggi (seperti tekstil dan manufaktur dasar) ke luar Jakarta, namun tetap dalam wilayah Jabodetabekpunjur, secara bertahap	Mendorong kemitraan antara industri besar dengan UMKM/koperasi dalam rantai nilai melalui peningkatan peran unit pelaksana teknis pengujian dan sertifikasi di DPPKUKM
1c Pusat Ekonomi dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	1c.1 mengarahkan kluster industri dan ekonomi Jakarta menuju industri ramah lingkungan, teknologi tinggi, serta manufaktur bernilai tambah seperti JIEP dan KBN	1c.1.1	Membentuk kluster manufaktur dan mempercepat transformasi hijau di kawasan industri yang ada, dengan potensi untuk mengintegrasikannya menjadi kota mandiri (misalnya: KBN, JIEP), didukung oleh insentif fiskal, biaya sewa yang kompetitif, dan peningkatan infrastruktur	Penerapan industri berwawasan lingkungan melalui penerapan daur ulang limbah dan efisiensi energi



Elemen Kerangka Kerja	Program Utama	Inisiatif		Arah Kebijakan yang Terkait Dalam Renstra DPPKUKM
		1c.1.2	Menetapkan kawasan strategis dan mengembangkan rencana induk untuk pembentukan KEK di Jakarta, dengan fokus pada sektor-sektor strategis, dilengkapi dengan pagu layanan terpadu untuk perizinan dan bea cukai, serta didukung oleh energi terbarukan untuk menarik investor yang peduli lingkungan	Fasilitasi digitalisasi proses produksi melalui penerapan Industry 4.0 (otomasi, IoT, AI, big data)
1d Pengembangan UMKM dan Sektor Informal	1d.1 Meningkatkan literasi keuangan dan memperluas akses keuangan untuk UMKM	1d.1.1	Memperluas jaringan pembiayaan Jakpreneur (yang saat ini hanya terbatas pada 3 mitra, seperti Bank DKI) ke bank-bank komersial lainnya, serta mendorong lembaga-lembaga teknologi finansial (tekfin) untuk menawarkan produk pinjaman terjangkau dengan rencana pembayaran yang disesuaikan berdasarkan pola perdagangan	Pelatihan keterampilan dan manajemen bisnis (manajemen usaha, pemasaran, inovasi produk, literasi digital) bagi pelaku UMK
		1d.1.2	Mewajibkan partisipasi UMKM dalam program Jakpreneur, dengan mengaitkan partisipasi tersebut dengan prasyarat dukungan penting, seperti akses pembiayaan, dukungan perdagangan, dan lain-lain	Pendampingan dan mentoring pelaku UMKM



Elemen Kerangka Kerja	Program Utama	Inisiatif		Arah Kebijakan yang Terkait Dalam Renstra DPPKUKM
	1d.2 Memperluas pasar bagi UMKM	1d.2.1	Memperluas program Jakpreneur, termasuk penyediaan kredit ekspor yang didukung pemerintah dan asuransi kredit perdagangan untuk mendukung UMKM dalam berekspansi ke pasar internasional	Mendorong standardisasi produk UMKM (SNI, halal, organik, ekspor)
		1d.2.2	Menciptakan pusat perdagangan UMKM (misalnya, pusat jajanan) untuk meningkatkan keberadaan pasar lokal dan mendorong pertumbuhan finansial, termasuk revitalisasi Pasar Tanah Abang, seperti meningkatkan integrasi vendor perdagangan elektronik, memodernisasi infrastruktur, dan menghilangkan biaya parkir serta layanan ilegal	Pemenuhan sarana dan prasarana yang inklusif untuk mendukung aktivitas pelaku UMKM dan perdagangan
		1d.2.3	Menerapkan program perlindungan UMKM untuk mendorong persaingan perdagangan yang adil dengan melarang praktik dumping harga dari aplikasi <i>direct-to-consumer</i> (D2C) yang merugikan bisnis lokal	Pelatihan keterampilan dan manajemen bisnis (manajemen usaha, pemasaran, inovasi produk, literasi digital) bagi pelaku UMK



Elemen Kerangka Kerja	Program Utama	Inisiatif		Arah Kebijakan yang Terkait Dalam Renstra DPPKUKM
		1d.2.4	Mendirikan pusat dukungan ekspor yang menawarkan layanan terpadu bagi UMKM, termasuk dukungan perizinan ekspor, penyediaan wawasan pasar secara <i>real time</i> , dan pengawasan kepatuhan terhadap standar internasional	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dan ekspor
		1d.2.5	Menyelenggarakan pameran perdagangan virtual untuk membantu UMKM terhubung dengan pembeli global dan mempermudah proses pembayaran serta logistik lintas batas	Meningkatkan promosi perdagangan melalui penyelenggaraan pameran produk unggulan daerah, business matching, dan kampanye digital marketing yang melibatkan pelaku UMKM, koperasi, dan industri lokal.
		1d.2.6	Meningkatkan program akses pasar Jakpreneur dengan memperluas ke platform digital yang lebih luas	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dan ekspor
	1d.3 Meningkatkan kemampuan UMKM, termasuk digital dan operasional	1d.3.1	Menghubungkan UMKM dengan siswa magang, memberikan kesempatan untuk pengembangan bakat dan keterampilan yang terjangkau bagi kedua belah pihak; berpotensi terkait dengan program Merdeka Belajar dari Kemendikti Saintek	Pelatihan keterampilan dan manajemen bisnis (manajemen usaha, pemasaran, inovasi produk, literasi digital) bagi pelaku UMK



Elemen Kerangka Kerja	Program Utama	Inisiatif		Arah Kebijakan yang Terkait Dalam Renstra DPPKUKM
		1d.3.2	Mendirikan inkubator kecil yang berfokus pada komunitas di berbagai lingkungan, menyediakan ruang kantor bersama, pendampingan, dan lokakarya untuk mendukung UMKM di tingkat akar rumput serta memperkuat skema pengentasan kemiskinan nasional	Pelatihan keterampilan dan manajemen bisnis (manajemen usaha, pemasaran, inovasi produk, literasi digital) bagi pelaku UMK
		1d.3.3	Menyediakan pelatihan khusus untuk membantu UMKM memenuhi standar halal di pasar syariah	Mendorong standarisasi produk UMKM (SNI, halal, organik, ekspor)
		1d.3.4	Meluncurkan program klinik pembinaan berbasis mobile yang berfokus pada penganggaran, perencanaan, keuangan, penggunaan perangkat digital, dan pembukuan serta dilengkapi dengan sertifikasi untuk membangun kepercayaan pemberi pinjaman dan meningkatkan akses terhadap kredit	Pendampingan dan mentoring pelaku UMKM
		1d.3.5	Menyediakan alat manajemen digital bersubsidi, seperti perangkat lunak manajemen investasi, untuk membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional	Pendampingan dan mentoring pelaku UMKM



Elemen Kerangka Kerja	Program Utama	Inisiatif		Arah Kebijakan yang Terkait Dalam Renstra DPPKUKM
1f Iklim Bisnis	1f.1 Meningkatkan kemudahan berbisnis di Jakarta	1f.1.2	Menyederhanakan prosedur yang diperlukan untuk memulai usaha guna meningkatkan peringkat Jakarta dalam metrik "memulai usaha"	Pendampingan dan mentoring pelaku UMKM



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN OPD

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi DPPKUKM DKI Jakarta untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:



Tabel 4. 1 Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR BARU	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMEKLATUR	UNIT PENANGGUNG JAWAB
Menggerakkan sektor usaha produktif dan bernilai tambah tinggi dengan prinsip ekonomi berkelanjutan	MENINGKATNYA PERAN PERDAGANGAN DALAM PEREKONOMIAN DAERAH				Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan		Bid Perdagangan
		Menguatkan Posisi Jakarta Sebagai Pusat Niaga dan Perdagangan Indonesia			Nilai PDRB Sektor Perdagangan		Bid Perdagangan
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha		Persentase Rekomendasi Teknis dan Non-perizinan di sektor Perdagangan yang diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Bid Perdagangan
					Persentase Pemanfaatan SKA		1. Bid Perdagangan 2. Sudin 6 Wilayah
				Meningkatnya penyelesaian Rekomendasi Teknis Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Rekomendasi Teknis Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diverifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Bid Perdagangan
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Bid Perdagangan
				Meningkatnya kualitas pelayanan dokumen ekspor	Persentase pertumbuhan Eksportir Pemanfaat Surat Keterangan Asal (SKA)	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	1. Bid Perdagangan 2. Sudin 6 Wilayah
					Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	1. Bid Perdagangan 2. Sudin 6 Wilayah
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilisasi harga		Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan	Bid Perdagangan



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR BARU	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMEKLATUR	UNIT PENANGGUNG JAWAB
			barang kebutuhan pokok dan barang penting			POKOK DAN BARANG PENTING	
				Terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok	Persentase pasar rakyat yang menyediakan barang pokok	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Bid Perdagangan
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Bid Perdagangan
			Terpantaunya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting		Persentase pasar rakyat yang terpantau harga barang pokok dan barang pentingnya	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Bid Perdagangan
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Bid Perdagangan
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor		Nilai Ekspor Provinsi DKI Jakarta	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Bid Perdagangan
			Meningkatnya jumlah pembeli potensial		Jumlah pembeli potensial	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Bid Perdagangan
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Bid Perdagangan
					Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Pameran Dagang Lokal	Bid Perdagangan
					Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Bid Perdagangan



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR BARU	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMEKLATUR	UNIT PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk		1. Nilai Dimensi Perilaku Komplain pada Indeks Keberdayaan Konsumen	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Bid. Pengawasan
					2. Nilai Dimensi Perilaku Pembelian pada Indeks Keberdayaan Konsumen		1. UPPISP 2. UPPKB2T
			Meningkatnya kemudahan penyampaian keluhan konsumen		Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Bid. Pengawasan
					Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Bid. Pengawasan
			Terjaminnya mutu produk pada sektor perdagangan di seluruh daerah kabupaten/kota		Persentase hasil uji yang tepat waktu dan akurat	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1. UPPISP 2. UPPKB2T
					Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	Pengembangan Layanan Pengujian	1. UPPISP 2. UPPKB2T
			Terjaminnya kondisi peredaran barang sesuai ketentuan		Persentase barang beredar dan jasa yang sesuai ketentuan	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Bid. Pengawasan
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Bid. Pengawasan
			Terlaksananya pengawasan pelaku usaha yang menggunakan metrologi Legal		Persentase pelaku usaha yang menggunakan metrologi legal yang diawasi	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Bid Pengawasan
					Persentase pelaksanaan hasil metrologi legal berupa tera dan tera ulang pada alat ukur, takaran, timbangan dan perlengkapannya yang akurat		UP Metrologi
					Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	UP Metrologi
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Bid Pengawasan



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR BARU	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMEKLATUR	UNIT PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		Nilai transaksi yang terjadi pada pemasaran produk dalam negeri oleh pelaku usaha binaan yang terfasilitasi	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1. Bid Perdagangan 2. Sudin 6 Wilayah
				Terfasilitasinya promosi pemasaran produk dalam negeri yang memiliki profil usaha di tingkat provinsi	Persentase pelaku usaha binaan yang terfasilitasi dalam promosi produk dalam negeri yang memiliki profil usaha di tingkat Provinsi	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Bid Perdagangan
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Bid Perdagangan
				Terlaksananya kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat	jumlah pelaku usaha yang mengikuti fasilitasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Bid Perindustrian
					Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Bid Perindustrian
				terfasilitasinya promosi pemasaran produk dalam negeri yang memiliki profil usaha di tingkat kota/kabupaten	Persentase pelaku usaha binaan yang terfasilitasi dalam promosi produk dalam negeri yang memiliki profil usaha di tingkat Kota/Kabupaten	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Sudin 6 Wilayah
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kota/Kabupaten	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Sudin 6 Wilayah
	MENINGKATNYA PERAN SEKTOR INDUSTRI DALAM PEREKONOMIAN DAERAH				Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian		Bid Perindustrian
		Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Sektor Industri			Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Produk Industri Non Migas		Bid Perindustrian
					Persentase peningkatan jumlah industri di Provinsi DKI Jakarta		Bid Perindustrian
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri		Persentase peningkatan omzet Industri Kecil dan Menengah	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1. Bid Perindustrian 2. Sudin 6 Wilayah



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR BARU	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMEKLATUR	UNIT PENANGGUNG JAWAB
					Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan Industri yang Memiliki Sertifikat TKDN		1. Bid Perindustrian 2. Sudin 6 Wilayah
				meningkatnya industri yang berkualitas dan mampu meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri	Jumlah industri yang difasilitasi	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1. Bid Perindustrian 2. Sudin 6 Wilayah
					Jumlah Produk yang difasilitasi sertifikasi TKDN untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		1. Bid Perindustrian 2. Sudin 6 Wilayah
					Jumlah produk Terfasilitasi Sertifikat Halal		1. Bid Perindustrian 2. Sudin 6 Wilayah
					Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kreatif		Bid Perindustrian
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1. Bid Perindustrian 2. Sudin 6 Wilayah
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1. Bid Perindustrian 2. Sudin 6 Wilayah
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian		Persentase Industri Tertib Perizinan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Bid Pengawasan
				meningkatnya pengawasan dan pengendalian izin usaha industri	Persentase Izin Industri yang diawasi	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Bid Pengawasan
					Persentase Permohonan Izin yang Diterbitkan Berita Acara Verifikasi Teknis Pemenuhan Persyaratan		1. Bid Perindustrian 2. Sudin 6 Wilayah
					-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Bid Pengawasan



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR BARU	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMEKLATUR	UNIT PENANGGUNG JAWAB
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	Facilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1. Bid Perindustrian 2. Sudin 6 Wilayah
Meningkatkan kesempatan kerja layak dan resiliensi tenaga kerja	MENINGKATNYA KEWIRAUUSAHAAN DAN PERKOPERASIAN UNTUK Mendukung Resiliensi I PEREKONOMIAN				Rasio Kewirausahaan Daerah		Bid. UKM
					Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB		1. Bid Koperasi 2. Sudin 6 Wilayah
		Mengembangkan Ekosistem Penciptaan Dan Peningkatan Kualitas Wirausaha			Persentase UMKM binaan yang mengalami peningkatan omzet		Bid. UKM
					Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Non-pertanian		Bid. UKM
		Menguatkan Kualitas Dan Peran Koperasi Dalam Menggerakkan Ekonomi Kerakyatan			Persentase koperasi yang berkualitas		1. Bid Koperasi 2. Sudin 6 Wilayah
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		1. Persentase wirausaha yang tangguh dan mandiri	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Bid. UKM
				Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan pelaku	1. Persentase SDM Usaha Mikro Kecil dan kewirausahaan yang meningkat	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui	1. Bid. UKM 2. Pusdiklat



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR BARU	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMEKLATUR	UNIT PENANGGUNG JAWAB
				UMKM tentang kewirausahaan	pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro Kecil serta kapasitas dan kompetensinya	Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	3. Sudin 6 Wilayah
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1. Bid. UKM 2. Sudin 6 Wilayah
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Pusdiklat PPKUKM
					Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	1. Bid. UKM 2. Sudin 6 Wilayah
			Meningkatnya skala usaha dan omset UMKM		Persentase UMKM yang aktif secara keuangan digital	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1. Bid. UKM 2. Sudin 6 Wilayah
				Meningkatnya UMKM yang mapan dan terdigitalisasi	1. Persentase UMKM yang terdigitalisasi	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	1. Bid. UKM 2. Sudin 6 Wilayah
					Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	1. Bid. UKM 2. Sudin 6 Wilayah
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi		Persentase Koperasi Aktif yang Patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Bid Pengawasan
				Terjaminnya kegiatan koperasi sesuai dengan kaidah aturan dan perundang-undangan	Persentase koperasi yang diperiksa dan diawasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Bid Pengawasan
					Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Bid Pengawasan



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR BARU	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMEKLATUR	UNIT PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya kompetensi, pemahaman dan pengetahuan di bidang perkoperasian bagi pengurus/pengelola koperasi yang keanggotaannya di Provinsi DKI Jakarta		Persentase koperasi aktif yang SDMnya mendapatkan pendidikan dan meningkat kapasitasnya	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pusdiklat PPKUKM
				Meningkatnya kompetensi, pemahaman dan pengetahuan di bidang perkoperasian bagi pengurus/pengelola koperasi yang keanggotaannya di Provinsi DKI Jakarta	Persentase SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pusdiklat PPKUKM
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pusdiklat PPKUKM
			Meningkatnya produktivitas koperasi		Persentase koperasi yang mengalami peningkatan volume usaha/aset	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1. Bid Koperasi 2. Sudin 6 Wilayah
					Persentase Koperasi konvensional yang bertransformasi digital		1. Bid Koperasi 2. Sudin 6 Wilayah
				Terwujudnya koperasi yang kapasitasnya meningkat	Persentase koperasi yang kapasitasnya meningkat	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Bid Koperasi 2. Sudin 6 Wilayah
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1. Bid Koperasi 2. Sudin 6 Wilayah
					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	1. Bid Koperasi 2. Sudin 6 Wilayah
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas	1. Bid Koperasi 2. Sudin 6 Wilayah



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR BARU	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMEKLATUR	UNIT PENANGGUNG JAWAB
						Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Bid Koperasi 2. Sudin 6 Wilayah
				Terlaksananya pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase koperasi yang meningkat kapasitasnya	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sudin 6 Wilayah
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Sudin 6 Wilayah
			Terlaksananya fungsi-fungsi pendukung pemerintah daerah provinsi secara efektif dan efisien		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. UPMetrologi 4. UPPKB2T 5. UPPISP 6. Pusdiklat 7. Pusdatin 8. UPKPPUKMP Pulogadung
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat
				Tersedianya administrasi keuangan daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. UPMetrologi 4. UPPKB2T 5. UPPISP 6. Pusdiklat 7. Pusdatin
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR BARU	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMEKLATUR	UNIT PENANGGUNG JAWAB
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. UP Metrologi 4. UPPKB2T 5. UPPISP 6. Pusdiklat 7. Pusdatin
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekretariat
				Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. Pusdiklat 4. Pusdatin 5. UP Metrologi 6. UPPISP 7. UPPKB2T
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. Pusdiklat 4. Pusdatin 5. UP Metrologi 6. UPPISP 7. UPPKB2T
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. Pusdiklat 4. Pusdatin 5. UP Metrologi 6. UPPISP 7. UPPKB2T
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. Pusdiklat 4. Pusdatin 5. UP Metrologi 6. UPPISP 7. UPPKB2T
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. Pusdiklat 4. Pusdatin



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR BARU	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMEKLATUR	UNIT PENANGGUNG JAWAB
							5. UP Metrologi 6. UPPISP 7. UPPKB2T
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. Pusdiklat 4. Pusdatin 5. UP Metrologi 6. UPPISP 7. UPPKB2T
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. Pusdiklat 4. Pusdatin 5. UP Metrologi 6. UPPISP 7. UPPKB2T
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. Pusdiklat 4. Pusdatin 5. UP Metrologi 6. UPPISP 7. UPPKB2T
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (kepmen)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. Pusdiklat 4. Pusdatin 5. UP Metrologi 6. UPPISP 7. UPPKB2T
				Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. Pusdiklat 4. Pusdatin 5. UP Metrologi 6. UPPISP 7. UPPKB2T
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. Pusdiklat 4. Pusdatin 5. UP Metrologi 6. UPPISP 7. UPPKB2T



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR BARU	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMEKLATUR	UNIT PENANGGUNG JAWAB
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. Pusdiklat 4. Pusdatin 5. UP Metrologi 6. UPPISP 7. UPPKB2T
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. Pusdiklat 4. Pusdatin 5. UP Metrologi 6. UPPISP 7. UPPKB2T
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. Pusdiklat 4. Pusdatin 5. Metrologi 6. UPPISP 7. UPPKB2T
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. Pusdiklat 4. Pusdatin 5. UP Metrologi 6. UPPISP 7. UPPKB2T
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. Pusdiklat 4. Pusdatin 5. UP Metrologi 6. UPPISP 7. UPPKB2T
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. Pusdiklat 4. Pusdatin 5. UP Metrologi 6. UPPISP 7. UPPKB2T
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. Pusdiklat



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR BARU	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN NOMEKLATUR	UNIT PENANGGUNG JAWAB
							4. Pusdatin 5. UP Metrologi 6. UPPISP 7. UPPKB2T
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. Pusdiklat 4. Pusdatin 5. UP Metrologi 6. UPPISP 7. UPPKB2T
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. Pusdiklat 4. Pusdatin 5. UP Metrologi 6. UPPISP 7. UPPKB2T
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks kepuasan layanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	UPKPPUKMP Pulogadung
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	UPKPPUKMP Pulogadung



Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Mendukung pencapaian program prioritas dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. 2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas

NO	PROGRAM / KEGIATAN UNGGULAN	OUTCOME	KEGIATAN (K) / SUB KEGIATAN (SK)	UNIT KERJA
1.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, melalui Penyelenggaraan Business matching P3DN dan Fasilitasi Sertifikasi TKDN	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	K: Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dinas PPKUKM
			SK: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
2	Fasilitasi keamanan pangan bagi Industri dan Penjamah Pangan	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	K: Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
			SK: Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	
3	Pendampingan Industri Kreatif dan Digital serta Batik Betawi	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	K: Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
			SK: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
4	Fasilitasi Pemasaran Tingkat Provinsi, di antaranya melalui	Terfasilitasinya promosi pemasaran produk dalam negeri yang memiliki	K: Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	



NO	PROGRAM / KEGIATAN UNGGULAN	OUTCOME	KEGIATAN (K) / SUB KEGIATAN (SK)	UNIT KERJA
	penyelenggaraan bazar Provinsi dan JITEX	profil usaha di tingkat provinsi		
			SK: Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	
5	Pengembangan Produk Ekspor, melalui Partisipasi Pameran Dalam Kota, Luar Kota, Luar Negeri dan Pendampingan Peningkatan Mutu dan Kualitas Produk Ekspor	terfasilitasinya promosi pemasaran produk dalam negeri yang memiliki profil usaha di tingkat kota/kabupaten	K: Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
			SK: Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
6	Fasilitas Promosi dan Pemasaran, melalui kurasi produk	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat	K: Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
			SK: Fasilitas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	
7	Stabilisasi Harga, melalui Penyelenggaraan Pasar Murah	Terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok	K: Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	
			SK: Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	
8	Pemberdayaan Koperasi, di antaranya melalui Fasilitas Pendirian Akta Koperasi	Terwujudnya koperasi yang kapasitasnya meningkat	K: Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			SK: Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	



NO	PROGRAM / KEGIATAN UNGGULAN	OUTCOME	KEGIATAN (K) / SUB KEGIATAN (SK)	UNIT KERJA
9	Pengawasan Perindustrian, Perdagangan, UKM dan Metrologi serta Pemeriksaan Kesehatan Koperasi	Terjaminnya kegiatan koperasi sesuai dengan kaidah aturan dan perundang-undangan	K: Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			SK: Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	
		Meningkatnya kemudahan penyampaian keluhan konsumen	K: Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
			SK: Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	
10	Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen, melalui Penyelenggaraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	Meningkatnya kemudahan penyampaian keluhan konsumen	K: Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
			SK: Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	
11	Pendampingan Industri Kecil dan Menengah Berkualitas, melalui sertifikasi Halal, HKI, Desain Kemasan, Izin Edar	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	K: Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Sudin PPKUKM Kota & Kabupaten
			SK: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
	Fasilitasi pemasaran Tingkat Wilayah, di antaranya melalui penyelenggaraan Bazar Tingkat Kota, Bazar Tingkat Kecamatan dan partisipasi APKASI/APEKSI	terfasilitasinya promosi pemasaran produk dalam negeri yang memiliki profil usaha di tingkat kota/kabupaten	K: Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
			SK: Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	



NO	PROGRAM / KEGIATAN UNGGULAN	OUTCOME	KEGIATAN (K) / SUB KEGIATAN (SK)	UNIT KERJA
	Penumbuhan Wirausaha Industri Baru	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	K: Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
			SK: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
	Penataan Sarana & Prasarana Pedagang Kaki Lima (PKL)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	K: Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
			SK: Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
	Pembinaan Kewirausahaan Usaha Kecil dan Menengah, melalui pelatihan Softskill	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	K: Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
			SK: Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	
	Pendampingan Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	K: Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	



NO	PROGRAM / KEGIATAN UNGGULAN	OUTCOME	KEGIATAN (K) / SUB KEGIATAN (SK)	UNIT KERJA
			SK: Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	
15	Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM Perkoperasian dan SDM Kewirausahaan	Meningkatnya kompetensi, pemahaman dan pengetahuan di bidang perkoperasian bagi pengurus/pengelola koperasi yang keanggotaannya di Provinsi DKI Jakarta	K: Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pusdiklat PPKUKM
			SK: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
16	Perlindungan Konsumen melalui metrologi legal (tera dan tera ulang), pengujian dan kalibrasi bahan teknik dan tekstil	Terlaksananya pengawasan pelaku usaha yang menggunakan metrologi Legal	K: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	• UP Metrologi
			Sk: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
	Peningkatan Pelayanan Kalibrasi dan sertifikasi melalui Sumber daya lain yang memadai seperti pengadaan alat uji dan manajemen	Terjaminnya mutu produk pada sektor perdagangan di seluruh daerah kabupaten/kota	K: Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	• UP PISP • UP PKB2T
			SK: Pengembangan Layanan Pengujian	
17	Peningkatan kinerja Sistem Pemerintahan Bersasis Elektronik (SPBE), melalui peningkatan dan pemeliharaan sistem Informasi PPKUKM	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	K: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pusdatin PPKUKM



NO	PROGRAM / KEGIATAN UNGGULAN	OUTCOME	KEGIATAN (K) / SUB KEGIATAN (SK)	UNIT KERJA
			SK: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disertai pendanaan dan target indikator berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta terdapat pada Tabel berikut



Tabel 4. 3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan DPPKUKM

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR BARU	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		UNIT PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		target	Rp	
MENINGKATKAN PERAN PERDAGANGAN DALAM PEREKONOMIAN DAERAH	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	6,87	6	48.946.281.762	6,1	50.196.127.615	6,2	51.446.132.693	6,3	52.696.300.979	6,4	53.946.636.551	6,4	257.231.479.600	Bid Perdagangan
Menguatkan Posisi Jakarta Sebagai Pusat Niaga dan Perdagangan Indonesia	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Miliar Rupiah	343.770	364.396	48.946.281.762	364.740	50.196.127.615	365.084	51.446.132.693	365.428	52.696.300.979	365.771	53.946.636.551	365.771	257.231.479.600	Bid Perdagangan
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN																
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Rekomendasi Teknis dan Non-perizinan di sektor Perdagangan yang diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	Persen	84%	75	160.000.000	76	160.000.000	77	160.000.000	78	160.000.000	79	160.000.000	79	800.000.000	Bid Perdagangan
	Persentase Pemanfaatan SKA	Persen	70%	65		65		70		70		70		70		1. Bid Perdagangan 2. Sudin 6 Wilayah
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi																
Meningkatnya penyelesaian Rekomendasi Teknis Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan	Persentase Rekomendasi Teknis Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diverifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persen	84%	85	50.000.000	85	50.000.000	85	50.000.000	85	50.000.000	85	50.000.000	85	250.000.000	Bid Perdagangan
Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	0	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	250.000.000	Bid Perdagangan
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi																



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR BARU	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		UNIT PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)																
Meningkatnya kualitas pelayanan dokumen ekspor	Persentase pertumbuhan Eksportir Pemanfaat Surat Keterangan Asal (SKA)	Persen	15	3	110.000.000	4	110.000.000	4	110.000.000	5	110.000.000	5	110.000.000	5	550.000.000	1. Bid Perdagangan 2. Sudin 6 Wilayah
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	4	4	110.000.000	4	110.000.000	4	110.000.000	4	110.000.000	4	110.000.000	4	550.000.000	1. Bid Perdagangan 2. Sudin 6 Wilayah
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING																
Terciptanya stabilitas harga barang kebutuhan pokok	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Nilai	14	14	35.000.000	14	35.000.000	14	35.000.000	14	35.000.000	14	35.000.000	14	175.000.000	Bid Perdagangan
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi																
Terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok	Persentase pasar rakyat yang menyediakan barang pokok	Persen	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	50.000.000	Bid Perdagangan
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	50.000.000	Bid Perdagangan
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																
Terpantaunya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase pasar rakyat yang terpantau harga barang pokok dan barang pentingnya	Persen	100	90	25.000.000	90	25.000.000	90	25.000.000	90	25.000.000	90	25.000.000	90	125.000.000	Bid Perdagangan
Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	5	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	125.000.000	Bid Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR																



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR BARU	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		UNIT PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatnya potensi transaksi	Nilai Ekspor Provinsi DKI Jakarta	Juta USD	13534.67	14.076 ,0568	7.432.609.140	14.639 ,09907	7.626.799.368	15.224 ,66303	7.825.469.352	15.833 ,64956	8.028.731.086	16.466 ,99554	8.236.699.362	16.466 ,996	39.150.308.308	Bid Perdagangan
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi																
Meningkatnya jumlah pembeli potensial	Jumlah pembeli potensial	Entitas	3	5	7.432.609.140	6	7.626.799.368	7	7.825.469.352	8	8.028.731.086	9	8.236.699.362	9	39.150.308.308	Bid Perdagangan
Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	31	35	3.583.804.570	37	3.673.399.684	39	3.765.234.676	41	3.859.365.543	43	3.955.849.681	43	18.837.654.154	Bidang Perdagangan
Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	80	84	3.583.804.570	86	3.673.399.684	88	3.765.234.676	90	3.859.365.543	92	3.955.849.681	92	18.837.654.154	Bidang Perdagangan
Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk	0	120	265.000.000	125	280.000.000	130	295.000.000	135	310.000.000	140	325.000.000	140	1.475.000.000	Bidang Perdagangan
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN																
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Nilai Dimensi Perilaku Komplain pada Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks	55,75	55,76	17.171.453.989	55,77	17.520.415.158	55,78	17.842.225.235	55,79	18.135.947.284	55,8	18.400.608.038	55,8	89.070.649.704	Bid Pengawasan
	Nilai Dimensi Perilaku Pembelian pada Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks	65,43	65,43		65,45		65,46		65,47		65,48		65,48		1. UPPISP 2. UPPKB2T
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota																
Meningkatnya kemudahan penyampaian keluhan konsumen	Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	10.000.000.000	Bid Pengawasan
Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK	1	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	10.000.000.000	Bid Pengawasan
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota																
Terjaminnya mutu produk pada sektor perdagangan di seluruh daerah kabupaten/kota	Persentase hasil uji yang tepat waktu dan akurat	Persen	98,51	90	9.653.965.143	90	9.505.677.427	90	9.280.513.731	90	8.972.564.630	90	8.575.387.119	90	45.988.108.050	1. UPPISP 2. UPPKB2T
Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat	Laporan	5558	4192	9.653.965.143	4000	9.505.677.427	4080	9.280.513.731	4160	8.972.564.630	4192	8.575.387.119	4192	45.988.108.050	1. UPPISP 2. UPPKB2T



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR BARU	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		UNIT PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan															
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota																
Terjaminnya kondisi peredaran barang sesuai ketentuan	Persentase barang beredar dan jasa yang sesuai ketentuan	Persen	65	66	500.000.000	67	500.000.000	68	500.000.000	69	500.000.000	70	500.000.000	70	2.500.000.000	Bid Pengawasan
Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	1	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	2.500.000.000	Bid Pengawasan
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan																
Terlaksananya kondisi pengawasan pelaku usaha yang menggunakan metrologi Legal	Persentase pelaku usaha yang menggunakan metrologi legal yang diawasi	Persen	3,03	3,04	5.017.488.846	3,05	5.514.737.731	3,07	6.061.711.504	3,08	6.663.382.654	3,09	7.325.220.919	3,09	30.582.541.654	Bid Pengawasan
	Persentase pelaksanaan hasil metrologi legal berupa tera dan tera ulang pada alat ukur, takaran, timbangan dan perlengkapannya yang akurat	Persen	91	92		92,5		93		93,5		94		94		UP Metrologi
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	30.000	30.200	4.972.488.846	30.400	5.469.737.731	30.600	6.016.711.504	30.800	6.618.382.654	31.000	7.280.220.919	31.000	30.357.541.654	UP Metrologi
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	380	390	45.000.000	400	45.000.000	410	45.000.000	420	45.000.000	430	45.000.000	430	225.000.000	Bid Pengawasan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI																
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Nilai transaksi yang terjadi pada pemasaran produk dalam negeri oleh pelaku usaha binaan yang terfasilitasi	Rupiah	907 .000.000	1.000 .000.000	24.147.218.633	1.000 .000.000	24.853.913.089	1.000 .000.000	25.583.438.106	1.000 .000.000	26.336.622.609	1.000 .000.000	27.114.329.151	1.000 .000.000	128.035.521.588	1. Bid Perdagangan 2. Sudin 6 Wilayah
Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri																
terfasilitasinya promosi pemasaran produk dalam negeri yang memiliki profil usaha di tingkat provinsi	Persentase pelaku usaha binaan yang terfasilitasi dalam promosi produk dalam negeri yang	Persen	0,99	1,00	4.130.559.616	1,10	4.337.087.597	1,20	4.553.941.977	1,30	4.781.639.076	1,40	5.020.721.030	6,99	22.823.949.296	Bid Perdagangan



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR BARU	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		UNIT PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	memiliki profil usaha di tingkat Provinsi															
Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	UMKM	848	850	4.130.559.616	850	4.337.087.597	850	4.553.941.977	850	4.781.639.076	850	5.020.721.030	850	22.823.949.296	Bid Perdagangan
Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri																
Terlaksananya kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat	jumlah pelaku usaha yang mengikuti fasilitasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Pelaku Usaha	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	50.000.000	Bid Perdagangan
Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer	Laporan	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	Bid Perdagangan
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri																
terfasilitasinya promosi pemasaran produk dalam negeri yang memiliki profil usaha di tingkat kota/kabupaten	Persentase pelaku usaha binaan yang terfasilitasi dalam promosi produk dalam negeri yang memiliki profil usaha di tingkat Kota/Kabupaten	Persen	53,74	4,9	20.006.659.017	4,9	20.506.825.492	4,9	21.019.496.129	4,9	21.544.983.533	4,9	22.083.608.121	24,50	105.161.572.292	Sudin 6 Wilayah
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kota/Kabupaten	UMKM	12.323	8500	20.006.659.017	8500	20.506.825.492	8500	21.019.496.129	8500	21.544.983.533	8500	22.083.608.121	8500	105.161.572.292	Sudin 6 Wilayah
MENINGKATNYA PERAN SEKTOR INDUSTRI DALAM PEREKONOMIAN DAERAH	Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Persen	1,14	1,15	61.081.984.121	1,20	68.690.182.534	1,25	77.058.907.212	1,30	86.264.210.784	1,35	96.389.751.139	1,35	389.485.035.790	Bid Perindustrian
MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING SEKTOR INDUSTRI	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Produk Industri Non Migas	Persen	21,97	20	61.081.984.121	20	68.690.182.534	20	77.058.907.212	20	86.264.210.784	20	96.389.751.139	20	389.485.035.790	Bid Perindustrian
	Persentase peningkatan jumlah industri di Provinsi DKI Jakarta	Persen	53,08	10		10		10		10		10		10		Bid Perindustrian
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI																



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR BARU	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		UNIT PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	1. Persentase peningkatan omzet Industri Kecil dan Menengah	Persen	36,51	10	61.041.901.651	10	68.646.091.816	10	77.010.700.998	10	86.211.771.098	10	96.332.948.208	10	389.243.413.771	Bid. Industri, Sudin PPKUM
	2. Persentase Peningkatan Jumlah Perusahaan Industri yang Memiliki Sertifikat TKDN	Persen	76,46	50		50		50		50		50		50		1. Bid Perindustrian 2. Sudin 6 Wilayah
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi																
Meningkatnya industri yang berkualitas dan mampu meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri	Jumlah industri yang difasilitasi	Industri	23735	20000	61.041.901.651	21000	68.646.091.816	22000	77.010.700.998	23000	86.211.771.098	24000	96.332.948.208	24000	389.243.413.771	1. Bid Perindustrian 2. Sudin 6 Wilayah
	Jumlah Produk yang difasilitasi sertifikasi TKDN untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Produk	0	850		1270		1690		2110		2530		8450		1. Bid Perindustrian 2. Sudin 6 Wilayah
	Jumlah produk Terfasilitasi Sertifikat Halal	Produk	2125	1075		1075		1075		1075		1075		7500		1. Bid Perindustrian 2. Sudin 6 Wilayah
	Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kreatif	Persen	0	14,57		29,15		43,72		58,29		72,87		72,87		1. Bid Perindustrian 2. Sudin 6 Wilayah
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	1	36.112.386.147	1	40.473.624.762	1	45.270.987.238	1	50.548.085.962	1	56.352.894.558	1	228.757.978.667	1. Bid Perindustrian 2. Sudin 6 Wilayah
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1	24.929.515.504	1	28.172.467.054	1	31.739.713.760	1	35.663.685.136	1	39.980.053.650	1	160.485.435.104	1. Bid Perindustrian 2. Sudin 6 Wilayah
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI																
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Industri Tertib Perizinan	Persen	60	65	40.082.470	70	44.090.718	75	48.206.214	80	52.439.686	85	56.802.931	85	241.622.019	Bid Pengawasan
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi																
meningkatkan pengawasan dan	Persentase Izin Industri yang diawasi	Persen	20,43	25	40.082.470	26	44.090.718	27	48.206.214	28	52.439.686	29	56.802.931	29	241.622.019	Bid Pengawasan



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR BARU	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		UNIT PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
pengendalian izin usaha industri																
	Persentase Permohonan Izin yang Diterbitkan Berita Acara Verifikasi Teknis Pemenuhan Persyaratan	Persen	100	100		100		100		100		100		100		1. Bid Perindustrian 2. Sudin 6 Wilayah
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	4	4	10.725.000	4	11.797.501	4	12.977.250	4	14.274.975	4	15.702.473	4	65.477.199	Bid Pengawasan
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota.	Dokumen	4	4	29.357.470	4	32.293.217	4	35.228.964	4	38.164.711	4	41.100.458	4	176.144.820	1. Bid Perindustrian 2. Sudin 6 Wilayah



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR BARU	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		UNIT PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.															
MENINGKATNYA KEWIRAUSAHAAN DAN PERKOPERASIAN UNTUK Mendukung RESILIENSI PEREKONOMIAN	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,56	3,58	231.434.490.747	3,6	235.836.133.429	3,61	239.470.059.372	3,65	242.259.860.400	3,66	244.121.505.408	3,66	1.193.122.049.356	Bid UKM
	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	0,04	0.041		0.042		0.043		0,044		0,045		0,045		1. Bid Koperasi 2. Sudin 6 Wilayah
MENGEMBANGKAN EKOSISTEM Penciptaan dan Peningkatan Kualitas WIRUSAHA	Persentase UMKM binaan yang mengalami peningkatan omzet	Persen	2,24	2,28	229.456.473.102	2,33	233.757.668.311	2,37	237.286.290.507	2,41	239.964.765.648	2,46	241.709.785.090	2,46	1.182.174.982.658	Bid UKM
	Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Non-pertanian	Persen	30,38	30,4		30,45		30,5		30,55		30,6		30,6		Bid UKM
MENGUATKAN KUALITAS DAN PERAN KOPERASI DALAM MENGGERAKAN EKONOMI KERAKYATAN	Persentase koperasi yang berkualitas	Persen	21,90	22,38	1.978.017.645	22,87	2.078.465.118	23,36	2.183.768.865	23,84	2.295.094.752	24,33	2.411.720.318	24,33	10.947.066.698	1. Bid Koperasi 2. Sudin 6 Wilayah
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)																
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase wirausaha yang tangguh dan mandiri	Persen	3,27	3,34	48.600.986.284	3,4	41.167.594.461	3,47	45.204.710.282	3,54	49.645.537.684	3,61	54.530.447.827	3,61	239.149.276.538	Bid UKM
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan																
Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan pelaku UMKM tentang kewirausahaan	1. Persentase SDM Usaha Mikro Kecil dan kewirausahaan yang meningkat pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro Kecil serta kapasitas dan kompetensinya	Persen	80,1	81	48.600.986.284	81	41.167.594.461	81	45.204.710.282	81	49.645.537.684	81	54.530.447.827	81	239.149.276.538	1. Bid. UKM 2. Pusdiklat 3. Sudin 6 Wilayah
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi.	Unit Usaha	19993	2808	36.701.052.914	2808	40.371.158.205	2808	44.408.274.026	2808	48.849.101.428	2808	53.734.011.571	34033	224.063.598.144	1. Bid UKM 2. Sudin 6 Wilayah



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR BARU	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		UNIT PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		target	Rp	
	dan Pengentasan Kemiskinan															
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	orang	468	600	796.436.256	600	796.436.256	600	796.436.256	600	796.436.256	600	796.436.256	3468	3.982.181.280	Pusdiklat
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Usaha	619	338	11.103.497.114	-	-	-	-	-	-	-	-		11.103.497.114	1. Bid UKM 2. Sudin 6 Wilayah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM																
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase UMKM yang aktif secara keuangan digital	Persen	28,49	29	396.123.482	29,5	435.735.830	30	479.309.413	30,5	527.240.355	31	579.964.390	31	2.418.373.470	1. Bid UKM 2. Sudin 6 Wilayah
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah																
Meningkatnya UMKM yang mapan dan terdigitalisasi	1. Persentase UMKM yang terdigitalisasi	Persen	82,63	84,28	396.123.482	85,9	435.735.830	87,68	479.309.413	89,44	527.240.355	91,23	579.964.390	91,23	2.418.373.470	1. Bid UKM 2. Sudin 6 Wilayah
Fasilitas Inkubator Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Usaha	0	50	396.123.482	50	435.735.830	50	479.309.413	50	527.240.355	50	579.964.390	250	2.418.373.470	1. Bid UKM 2. Sudin 6 Wilayah
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI																
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Koperasi Aktif yang Patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan	Persen	57	30	7.500.000	32	7.500.000	35	7.500.000	37	7.500.000	40	7.500.000	40	37.500.000	Bid Pengawasan
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																
Terjaminnya kegiatan koperasi sesuai dengan kaidah aturan dan perundang-undangan	Persentase koperasi yang diperiksa dan diawasi	Persen	1,6	0,9	7.500.000	0,9	7.500.000	0,9	7.500.000	0,9	7.500.000	0,9	7.500.000	6,1	37.500.000	Bid Pengawasan
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	24	24	7.500.000	24	7.500.000	24	7.500.000	24	7.500.000	24	7.500.000	144	37.500.000	Bid Pengawasan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN																
Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian	Persentase koperasi aktif yang SDMnya mendapatkan pendidikan dan meningkat kapasitasnya	Persen	60	70	1.095.508.965	70	1.150.284.240	70	1.207.798.634	70	1.268.188.566	70	1.331.597.994	70	6.053.378.399	Pusdiklat



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR BARU	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		UNIT PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																
Meningkatnya kompetensi, pemahaman dan pengetahuan di bidang perkoperasian bagi pengurus/pengelola koperasi yang keanggotaannya di Provinsi DKI Jakarta	Persentase SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	Persen	60	70	1.095.508.965	71	1.150.284.240	72	1.207.798.634	73	1.268.188.566	74	1.331.597.994	74	6.053.378.399	Pusdiklat
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	orang	400	400	1.095.508.965	420	1.150.284.240	420	1.207.798.634	420	1.268.188.566	420	1.331.597.994	2.480	6.053.378.399	Pusdiklat
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI																
Meningkatnya produktivitas koperasi	1. Persentase koperasi yang mengalami peningkatan volume usaha/aset	Persen	1,7	1,8	865.008.680	1,9	920.680.878	2,0	968.470.231	2,1	1.019.406.186	2,2	1.072.622.324	2,2	4.856.188.299	1. Bid Koperasi 2. Sudin 6 Wilayah
	2. Persentase Koperasi konvensional yang bertransformasi digital	Persen	0.506	0,6		0,674		0.758		0.842		0.927		0.927		1. Bid Koperasi 2. Sudin 6 Wilayah
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																
Terwujudnya koperasi yang kapasitasnya meningkat	Persentase koperasi yang kapasitasnya meningkat	Persen	100	100	865.008.680	100	910.680.878	100	958.470.231	100	1.009.406.186	100	1.062.622.324	100	4.806.188.299	1. Bid Koperasi 2. Sudin 6 Wilayah
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	25	30	827.277.442	35	868.641.314	40	912.073.380	45	957.677.049	50	1.005.560.901	225	4.571.230.086	1. Bid Koperasi 2. Sudin 6 Wilayah
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	20	30	4.860.000	40	6.480.000	50	8.100.000	60	9.720.000	70	11.340.000	270	40.500.000	1. Bid Koperasi 2. Sudin 6 Wilayah
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	20	30	7.550.000	40	8.200.000	50	8.850.000	75	10.475.000	100	12.100.000	315	47.175.000	1. Bid Koperasi 2. Sudin 6 Wilayah



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR BARU	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		UNIT PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	20	30	25.321.238	40	27.359.564	50	29.446.851	60	31.534.137	70	33.621.423	270	147.283.213	1. Bid Koperasi 2. Sudin 6 Wilayah
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota																
Terlaksananya pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase koperasi yang meningkat kapasitasnya	Persen	0	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	50.000.000	Sudin 6 Wilayah
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	0	53	10.000.000	53	10.000.000	53	10.000.000	54	10.000.000	54	10.000.000	267	50.000.000	Sudin 6 Wilayah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																
Terlaksananya fungsi-fungsi pendukung pemerintah daerah provinsi secara efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	180.459.363.336	4	192.154.338.020	4	191.602.270.812	4	189.791.987.609	4	186.599.372.873	4	940.607.332.650	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. UP Metrologi 4. UPPKB2T 5. UPPISP 6. Pusdiklat 7. Pusdatin 8. UPKPPUKMP Pulogadung
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persen	100	100	150.895.568	100	165.985.125	100	182.583.637	100	200.842.001	100	220.926.201	100	921.232.532	Sekretariat
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	2	150.895.568	2	165.985.125	2	182.583.637	2	200.842.001	2	220.926.201	2	921.232.532	Sekretariat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
Tersedianya administrasi keuangan daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Indeks	4	4	130.226.474.952	4	137.862.997.531	4	132.846.633.012	4	126.125.622.764	4	117.531.208.281	4	644.592.936.538	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. UP Metrologi 4. UPPKB2T 5. UPPISP 6. Pusdiklat 7. Pusdatin



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR BARU	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		UNIT PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	275	300	130.135.944.770	300	137.763.414.331	290	132.737.091.492	290	126.005.127.092	280	117.398.663.042	280	644.040.240.727	Sekretariat
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12	90.530.182	12	99.583.200	12	109.541.520	12	120.495.672	12	132.545.239	12	552.695.813	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. UP Metrologi 4. UPPKB2T 5. UPPISP 6. Pusdiklat 7. Pusdatin
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks	0	4	444.807.652	4	444.807.652	4	444.807.652	4	444.807.652	4	444.807.652	4	2.224.038.260	Sekretariat
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	100	444807652	100	444807652	100	444807652	100	444807652	100	444807652	500	2.224.038.260	Sekretariat
Administrasi Umum Perangkat Daerah																
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Indeks	4	4	12.333.345.058	4	13.566.679.565	4	14.923.347.521	4	16.415.682.273	4	18.057.250.499	4	75.296.304.916	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. UP Metrologi 4. UPPKB2T 5. UPPISP 6. Pusdiklat 7. Pusdatin
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	3.939.594.999	12	4.333.554.499	12	4.766.909.949	12	5.243.600.944	12	5.767.961.038	12	24.051.621.429	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. UP Metrologi 4. UPPKB2T 5. UPPISP 6. Pusdiklat 7. Pusdatin
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	48	48	973.000.646	48	1.070.300.711	48	1.177.330.782	48	1.295.063.860	48	1.424.570.246	48	5.940.266.245	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. UP Metrologi 4. UPPKB2T 5. UPPISP 6. Pusdiklat 7. Pusdatin
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	348.037.601	12	382.841.361	12	421.125.497	12	463.238.047	12	509.561.851	12	2.124.804.357	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. UP Metrologi 4. UPPKB2T 5. UPPISP 6. Pusdiklat 7. Pusdatin
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Laporan	24	24	1.040.413.617	24	1.144.454.978	24	1.258.900.476	24	1.384.790.524	24	1.523.269.576	24	6.351.829.171	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. UP Metrologi



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR BARU	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		UNIT PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
																4. UPPKB2T 5. UPPISP 6. Pusdiklat 7. Pusdatin
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	144	144	325.206.081	144	357.726.689	144	393.499.358	144	432.849.294	144	476.134.223	144	1.985.415.645	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. UP Metrologi 4. UPPKB2T 5. UPPISP 6. Pusdiklat 7. Pusdatin
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	144	144	1.017.063.080	144	1.118.769.388	144	1.230.646.327	144	1.353.710.959	144	1.489.082.055	144	6.209.271.809	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. UP Metrologi 4. UPPKB2T 5. UPPISP 6. Pusdiklat 7. Pusdatin
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	48	48	3.986.367.978	48	4.385.004.777	48	4.823.505.254	48	5.305.855.779	48	5.836.441.358	48	24.337.175.146	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. UP Metrologi 4. UPPKB2T 5. UPPISP 6. Pusdiklat 7. Pusdatin
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (kepmen)	Dokumen	0	12	703.661.056	12	774.027.162	12	851.429.878	12	936.572.866	12	1.030.230.152	12	4.295.921.114	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. UP Metrologi 4. UPPKB2T 5. UPPISP 6. Pusdiklat 7. Pusdatin
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Indeks	4	4	4.569.834.231	4	5.026.817.654	4	5.529.499.419	4	6.082.449.361	4	6.690.694.297	4	27.899.294.962	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. UP Metrologi 4. UPPKB2T 5. UPPISP 6. Pusdiklat 7. Pusdatin
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	541	92	4.569.834.231	92	5.026.817.654	92	5.529.499.419	92	6.082.449.361	92	6.690.694.297	1.001	27.899.294.962	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. UP Metrologi 4. UPPKB2T 5. UPPISP 6. Pusdiklat 7. Pusdatin
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR BARU	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		UNIT PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	15.946.630.940	4	17.541.294.035	4	19.295.423.439	4	21.224.965.783	4	23.347.462.360	4	97.355.776.558	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. UP Metrologi 4. UPPKB2T 5. UPPISP 6. Pusdiklat 7. Pusdatin
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	4.765.906.406	12	5.242.497.046	12	5.766.746.751	12	6.343.421.426	12	6.977.763.569	12	29.096.335.198	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. UP Metrologi 4. UPPKB2T 5. UPPISP 6. Pusdiklat 7. Pusdatin
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	48	48	727.474.251	48	800.221.676	48	880.243.843	48	968.268.228	48	1.065.095.051	48	4.441.303.049	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. UP Metrologi 4. UPPKB2T 5. UPPISP 6. Pusdiklat 7. Pusdatin
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	144	144	10.453.250.284	144	11.498.575.313	144	12.648.432.844	144	13.913.276.129	144	15.304.603.741	144	63.818.138.311	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. UP Metrologi 4. UPPKB2T 5. UPPISP 6. Pusdiklat 7. Pusdatin
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	7.583.815.228	4	8.342.196.752	4	9.176.416.427	4	10.094.058.069	4	11.103.463.876	4	46.299.950.352	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. UP Metrologi 4. UPPKB2T 5. UPPISP 6. Pusdiklat 7. Pusdatin
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	62	90	1.520.802.254	90	1.672.882.480	90	1.840.170.728	90	2.024.187.801	90	2.226.606.581	512	9.284.649.844	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. UP Metrologi 4. UPPKB2T 5. UPPISP 6. Pusdiklat 7. Pusdatin
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	1.601.394.038	12	1.761.533.442	12	1.937.686.786	12	2.131.455.465	12	2.344.601.011	12	9.776.670.742	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. UP Metrologi 4. UPPKB2T 5. UPPISP 6. Pusdiklat 7. Pusdatin



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR BARU	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		UNIT PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	1.694.518.681	3	1.863.970.549	3	2.050.367.604	3	2.255.404.364	3	2.480.944.801	3	10.345.205.999	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. UP Metrologi 4. UPPKB2T 5. UPPISP 6. Pusdiklat 7. Pusdatin
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	187	136	2.767.100.255	184	3.043.810.281	136	3.348.191.309	184	3.683.010.439	136	4.051.311.483	963	16.893.423.767	1. Sekretariat 2. Sudin 6 Wilayah 3. UP Metrologi 4. UPPKB2T 5. UPPISP 6. Pusdiklat 7. Pusdatin
Peningkatan Pelayanan BLUD																
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks kepuasan layanan BLUD	Indeks	4	4	9.203.559.706	4	9.203.559.706	4	9.203.559.706	4	9.203.559.706	4	9.203.559.706	4	46.017.798.530	UPKPPUKMP Pulogadung
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Unit Kerja	1	1	9.203.559.706	1	9.203.559.706	1	9.203.559.706	1	9.203.559.706	1	9.203.559.706	1	46.017.798.532	UPKPPUKMP Pulogadung



4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama entitas. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :



Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

No	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,56	3,58	3,6	3,61	3,65	3,66
2	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	0,04	0,041	0,042	0,043	0,044	0,045
3	Persentase UMKM binaan yang mengalami peningkatan omzet	Persen	2,24	2,28	2,33	2,37	2,41	2,46
4	Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Non-pertanian	Persen	30,38	30,4	30,45	30,5	30,55	30,6
5	Persentase koperasi yang berkualitas	Persen	21,90	22,38	22,87	23,36	23,84	24,33
6	Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Persen	1,14	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35
7	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Produk Industri Non Migas	Persen	21,97	20	20	20	20	20
8	Persentase peningkatan jumlah industri di Provinsi DKI Jakarta	Persen	53,08	10	10	10	10	10
9	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	6,87	6	6,1	6,2	6,3	6,4
10	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Miliar Rupiah	343.770	364,396	364,740	365,084	365,428	365,771



Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

No	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA				
				2026	2027	2028	2029	2030
	Urusan Koperasi dan UMKM							
1	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,56	3,58	3,6	3,61	3,65	3,66
2	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	0,04	0,041	0,042	0,043	0,044	0,045
3	Persentase UMKM binaan yang mengalami peningkatan omzet	Persen	2,24	2,28	2,33	2,37	2,41	2,46
4	Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Non-pertanian	Persen	30,38	30,4	30,45	30,5	30,55	30,6
5	Persentase koperasi yang berkualitas	Persen	21,90	22,38	22,87	23,36	23,84	24,33
	Urusan Perindustrian							
1	Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Persen	1,14	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35
2	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Produk Industri Non Migas	Persen	21,97	20	20	20	20	20
3	Persentase peningkatan jumlah industri di Provinsi DKI Jakarta	Persen	53,08	10	10	10	10	10
	Urusan Perdagangan							
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	6,87	6	6,1	6,2	6,3	6,4
2	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Miliar Rupiah	343.770	364,396	364,740	365,084	365,428	365,771



BAB V PENUTUP

Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD DKI Jakarta Tahun 2025-2029 yang sinergis, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu, yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

5.1 PEDOMAN TRANSISI

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengisi kekosongan Renja setelah Renstra berakhir. Terkait hal tersebut, saat penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 Tahun 2026, dokumen Renstra Tahun 2025-2029 belum ditetapkan. Maka Renja disusun dengan berpedoman pada Rancangan Akhir Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029, serta RKPD DKI Jakarta Tahun 2026, dimana RKPD disusun dengan mengacu pada RPJMN, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045 periode pertama, serta memperhatikan Visi, Misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Tahun 2025-2030. Adapun Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 Tahun 2026 tersebut akan menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan serta indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan merupakan aturan atau patokan dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, kegiatan serta sub kegiatan, agar terwujud efisiensi dan



efektivitas dalam pelaksanaannya. Adapun kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- a. Seluruh personil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 beserta para pemangku kepentingan agar melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 ini dengan sebaik-baiknya, dalam rangka mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir;
- b. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renstra ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. Untuk penjabaran Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 lebih lanjut, akan disusun Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada setiap tahunnya, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya Renja akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029.

Jakarta, 2 Oktober 2025

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi DKI Jakarta

Elisabeth Ratu Rante Allo
NIP 197009241998032004

Halaman ini sengaja dikosongkan



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**